SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/163 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA DAFTAR DATA DAERAH JAWA TENGAH JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, dalam menyusun daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya mengacu pada daftar data yang telah ditentukan instansi Pusat dan selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah;

b. bahwa penetapan Rencana Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Forum Satu Data Tingkat Daerah Jawa Tengah dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentan Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/ 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 108/M.PPN/HK/12/ 2025 tentang Rencana Data Prioritas Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun untuk menyelaraskan siklus Perencanaan Data Satu Data Jawa Tengah dengan siklus Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dipilih dari Daftar Data instansi Daerah Jawa Tengah yang menjadi acuan bagi penyelenggara Satu Data Jawa Tengah dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang memuat Daftar Data sebagai berikut:
a. Daftar Data Statistik;
b. Daftar Data Geospasial Tematik;
c. Daftar DSSD E-Walidata.

KETIGA : Data terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disusun berdasarkan:

a. Rencana Data Prioritas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang telah ditentukan instansi Pusat melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 108/M.PPN/ HK/12/2025, yang membutuhkan dukungan Data Daerah;
b. Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317/2023 yang merupakan Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;

d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

e. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

f. Kebutuhan Data berdasarkan kebutuhan mendesak atas arahan Kepala Daerah atau Pengarah dan/atau Hasil Forum Satu Data Jawa Tengah; dan

g. Usulan Walidata Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencantumkan Kode Daftar Data Pusat (ID DDP) dan Kode DSSD yang ditetapkan oleh Pusat dan berfungsi sebagai identitas utama (*primary key*) atau identitas relasi (*foreign key*) bagi seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pengumpulan, pemeriksaan, serta penyebarluasan data dan metadata sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

KELIMA : Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat daftar Data yang ditetapkan dan disepakati untuk dikumpulkan oleh Produsen Data setiap tahun sesuai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data, wajib diperiksa kesesuaian terhadap Prinsip Satu Data Indonesia baik oleh Walidata Pendukung maupun Walidata Daerah, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan ulang oleh Pembina Data Tingkat Daerah.

KEENAM : Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup penetapan daftar Data Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, selanjutnya daftar Data Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 yang tercantum dalam Rencana Daftar Data Daerah Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dimaksud dapat dimutakhirkan berdasarkan adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan/atau adanya kebijakan tertentu, dan disepakati melalui Forum Satu Data Jawa Tengah dan kemudian dituangkan dalam penetapan daftar Data tahunan.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Prioritas Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasu, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/163 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DAFTAR DATA DAERAH JAWA
TENGAH JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 - 2029

RENCANA DAFTAR DATA DAERAH JAWA TENGAH JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

A. DATA STATISTIK DAN DATA GEOSPASIAL TAHUN 2025 - 2029

No	ID DDP	Sumber Referensi	Nama Data	Definisi	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	2025	2026	2027	2028	2029
1	06.01.002	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	03.07.0001	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Angka Kematian Menurut Umur	Jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam kelompok umur tertentu dalam satu tahun	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	06.01.003	RPJMN 2025-2029;	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun ajaran ini terhadap jumlah peduduk usia 3-6 tahun. Dalam hal ini, pendidikan prasekolah yang dimaksud meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), Raudatul Athfal (RA), dan Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll).	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	06.01.004	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan jumlah penduduk usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun (misalnya, yang masuk kuliah lebih cepat atau lebih lambat dari usia ideal).	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	06.01.0002	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Kuintil Terendah	Rasio jumlah mahasiswa (semua usia) dari kelompok pendapatan kuintil 1 (terendah) yang sedang menempuh pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun dari kuintil tersebut	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	06.01.0003	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Kuintil Tertinggi	Rasio jumlah mahasiswa (semua usia) dari kelompok pendapatan kuintil 5 (tertinggi) yang sedang menempuh pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun dari kuintil tersebut	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	06.01.0004	SDGs;	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Laki-laki	Rasio jumlah laki-laki, berapapun usianya, yang sedang kuliah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk laki-laki usia 19–23 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	06.01.0006	SDGs;	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Penduduk Perdesaan	Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah penduduk usia berapapun yang sedang bersekolah di perguruan tinggi, yang bertempat tinggal di perdesaan, terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun yang tinggal di perdesaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9	06.01.0007	SDGs;	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Penduduk Perkotaan	Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah penduduk usia berapapun yang sedang bersekolah di perguruan tinggi, yang bertempat tinggal di perkotaan, terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun yang tinggal di perdesaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10	06.01.0008	SDGs;	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Perempuan	Rasio jumlah perempuan, berapapun usianya, yang sedang kuliah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk perempuan usia 19–23 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
11	06.01.0009	RPJMN 2025-2029; SDGs;	APK SMA/SMK Kuintil Teratas (APK-SMA Q5)	Rasio jumlah siswa dari kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan tertinggi (Q5), berapapun usianya, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun pada kelompok kuintil tersebut.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
12	06.01.0010	RPJMN 2025-2029; SDGs;	APK SMA/SMK Kuintil Terbawah (APK-SMA Q1)	Rasio jumlah siswa dari kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan terbawah (Q1), berapapun usianya, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun pada kelompok kuintil tersebut.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
13	06.01.0012	SDGs;	APK SMA/SMK Penduduk Laki-laki (APK-Male	Rasio jumlah penduduk laki-laki, tanpa memperhatikan usia, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk laki-laki usia 16–18 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14	06.01.0014	SDGs;	APK SMA/SMK Penduduk Perdesaan (APK-Rural)	Rasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat (tanpa memperhatikan usia), terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun di wilayah perdesaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
15	06.01.0015	SDGs;	APK SMA/SMK Penduduk Perempuan (APK-Female)	Rasio jumlah penduduk perempuan, tanpa memperhatikan usia, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk perempuan usia 16–18 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
16	06.01.0016	SDGs;	APK SMA/SMK Penduduk Perkotaan (APK-Urban)	Rasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat (tanpa memperhatikan usia), terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun di wilayah perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
17	06.01.0017	SDGs;	APK SMP Kuintil Penghasilan Terendah (APK-Q1)	Rasio jumlah penduduk pada kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan terbawah (Q1), berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk Q1 yang berusia 13–15 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
18	06.01.0018	SDGs;	APK SMP Kuintil Penghasilan Tertinggi (APK-Q5)	Rasio jumlah penduduk pada kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan tertinggi (Q5), berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk Q5 yang berusia 13–15 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
19	06.01.0019	SDGs;	APK SMP Laki-laki (APK-L)	Rasio jumlah penduduk laki-laki, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk laki-laki usia 13–15 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
20	06.01.0022	SDGs;	APK SMP Penduduk Perdesaan (APK-R)	Rasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun di wilayah perdesaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
21	06.01.0023	SDGs;	APK SMP Penduduk Perkotaan (APK-U)	Rasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun di wilayah perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
22	06.01.0024	SDGs;	APK SMP Perempuan (APK-P)	Rasio jumlah penduduk perempuan, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk perempuan usia 13–15 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
23	06.01.0026	SDGs;	APM SD untuk Penduduk Laki-laki (APML)	Rasio jumlah penduduk laki-laki usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk laki-laki usia 7–12 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
24	06.01.0028	SDGs;	APM SD untuk Penduduk Perdesaan (APMr)	Rasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perdesaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perdesaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25	06.01.0029	SDGs;	APM SD untuk Penduduk Perempuan (APMP)	Rasio jumlah penduduk perempuan usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk perempuan usia 7–12 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
26	06.01.0030	SDGs;	APM SD untuk Penduduk Perkotaan (APMu)	Rasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perkotaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
27	02.02.001	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Ekspor Barang dan Jasa	Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
28	02.02.0003	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Harga Konsumen	Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi Bulan ke Bulan (month to month) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi Tahun Kalender (year to date) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi Tahun ke Tahun (year on year) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Persentase perubahan IHK yang bernilai negatif disebut juga dengan deflasi.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

29	09.03.008	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK)	Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: 1. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan 2. Mengukur kesenjangan digital 3.Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
30	02.03.006	SDGs;	Indikator anomali harga pangan	Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan gabungan tertimbang dari harga-harga pangan, baik dalam satu tahun atau beberapa tahun. IAHP ini secara langsung mengevaluasi peningkatan harga-harga pangan dalam satu bulan tertentu selama beberapa tahun, dengan memperhitungkan sifat pasar pertanian musiman dan inflasi, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah perubahan harga tersebut dikategorikan abnormal atau tidak dalam suatu periode tertentu.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
31	06.02.0002	SDGs;	Jumlah anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu	Jumlah anak berusia 5–11 tahun yang bekerja setidaknya 1 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
32	03.07.0004	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun	Jumlah total anak berusia 0 hingga 59 bulan pada pertengahan tahun yang sama.?	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
33	06.02.0003	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu (PAB13-14,JK15)	Jumlah anak berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
34	06.02.0004	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (PAB15-17,JK40)	Jumlah anak berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

35	06.02.0005	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (PAB5-12)	Jumlah anak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
36	06.02.0009	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran)	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
37	09.04.0001	SDGs;	Jumlah Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (JITG)	Jumlah individu yang memiliki telepon genggam, termasuk smartphone, yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui jaringan seluler atau nirkabel.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
38	03.07.0023	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas	Total penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, mencakup angkatan kerja dan bukan angkatan kerja	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
39	06.02.0028	SDGs;	Jumlah penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu	Jumlah penduduk berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
40	06.02.0029	SDGs;	Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Bekerja (PTB15-24)	Jumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak terlibat dalam kegiatan kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
41	06.02.0030	SDGs;	Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Mengikuti Pelatihan (PTP15-24)	Jumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak berpartisipasi dalam program pelatihan atau kursus untuk pengembangan keterampilan	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
42	06.02.0031	SDGs;	Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Sekolah (PTS15-24)	Jumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

43	06.02.0033	SDGs;	Jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal non-pertanian	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor non-pertanian dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tak dibayar.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
44	04.02.0007	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (JPM)	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
45	06.02.0034	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
46	09.03.0030	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Pengguna Internet	Jumlah individu yang telah mengakses internet dalam periode tertentu	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
47	03.07.0025	SDGs;	Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun (JPM)	Total responden perempuan berusia 18-24 tahun yang berpartisipasi dalam survei	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
48	02.03.017	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Jagung	Jumlah Produksi Jagung mengacu pada total volume jagung yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. Produksi jagung ini biasanya diukur dalam bentuk jagung pipilan kering dengan kadar air standar	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
49	03.07.0029	RPJMN 2025-2029;	Jumlah total penduduk usia 16–30 tahun	Keseluruhan penduduk Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun, tanpa memandang status kegiatan mereka.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
50	09.02.026	SDGs;	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
51	02.02.0017	RPJMN 2025-2029;	Nilai Ekspor Barang per Provinsi	Jumlah nilai barang yang diekspor dari suatu provinsi, dihitung berdasarkan nilai FOB	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

52	02.02.0018	RPJMN 2025-2029;	Nilai ekspor barang per pulau	Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
53	09.02.0015	RPJMN 2025-2029;	Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan Akomodasi	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan akomodasi , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
54	09.02.0016	RPJMN 2025-2029;	Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan Jasa Makan dan Minum	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan jasa makan dan minum, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
55	02.01.0024	SDGs;	Nilai Tambah Industri Manufaktur (NTIM)	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
56	02.03.034	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
57	02.01.0027	SDGs;	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (NTSIM)	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan pada tahun sebelumnya	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
58	02.01.0028	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan per tahun	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri manufaktur, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahun	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

59	09.02.0021	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	PDB Nasional (ADHB)	Jumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
60	02.03.0035	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
61	09.02.0023	RPJMN 2025-2029;	PDRB Provinsi	Total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu provinsi dalam periode tertentu	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
62	02.11.014	RPJMN 2025-2029;	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) adalah persen bagian PDRB Provinsi yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata yang meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
63	06.02.0049	SDGs;	Pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu	Jumlah penduduk yang bekerja bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu terakhir, tidak termasuk sementara tidak bekerja (0 jam).	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
64	02.08.035	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
65	06.02.0050	SDGs;	Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu	Jumlah penduduk berusia 12–14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

66	02.01.025	RPJMN 2025-2029;	Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	Agregat tenaga kerja seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14)	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
67	09.01.017	SDGs;	Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Kondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun dikalikan 100?%	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
68	06.02.023	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut- turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu. Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan.Konsep pekerja anak pada indikator ini dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya keterbatasan data yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), konsep pekerja anak ini tidak mempertimbangkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk itu, dilakukan penyesuaian kriteria konsep pekerja anak mencakup:i.Semua anak-anak umur 5-12 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu;ii.Penduduk umur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu;iii.dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu terhadap jumlah penduduk umur 5-17 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

69	06.02.024	SDGs;	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu. Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan. Untuk keterbandingan secara internasional, konsep pekerja anak pada indikator ini dihitung sesuai metadata SDGs global berdasarkan International Conference of Labour Statisticians dengan penyesuaian ketersediaan data nasional. Pekerja anak indikator ini mencakup i. Semua anak-anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu; ii. Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu; iii. dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
70	02.01.031	SDGs;	Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit	Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.Kredit yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
71	04.01.110	SDGs;	Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

72	09.02.040	SDGs;	Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Produk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman ir yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
73	06.03.0015	Perpres 78/2021;	Persentase nilai impor terhadap PDRB harga berlaku	Persentase nilai impor terhadap PDRB harga berlaku	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
74	02.01.034	SDGs;	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri pengolahan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah pengolahan di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

75	06.02.029	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja di bidang pekerjaan yang tergolong dalam kategori keahlian menengah (semi-skilled) atau keahlian tinggi (skilled), terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada minggu referensi. Indikator ini mencerminkan kecocokan antara tingkat pendidikan dan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dilakukan, serta menjadi ukuran kualitas penempatan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi pendidikan. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat kompleksitas sedang, untuk menyelesaikan tugas-tugas bersifat rutin, operasional, dan teknis, tanpa tuntutan kapasitas konseptual atau mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan komprehensif serta kemampuan kognitif dan mental tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, analitis, dan bersifat manajerial atau profesional. Pengelompokan bidang keahlian menengah dan tinggi mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014, yang merupakan adopsi dari International Standard Classification of Occupations (ISCO-08).	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
76	06.05.037	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
77	06.02.031	SDGs;	Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan.Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

78	06.02.032	RPJMN 2025-2029;	Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
79	04.02.051	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
80	03.03.038	SDGs;	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro.Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya, kota metropolitan dan kota besar perlu sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota.Persentase penduduk terlayani transportasi umum adalah perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
81	04.02.053	SDGs;	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

82	09.03.063	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet	Perbandingan antara orang yang menggunakan internet dengan jumlah masyarakat Indonesia	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
83	09.03.064	SDGs;	Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam	Telepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
84	03.03.039	SDGs;	Persentase Penduduk yang Mudah Mengakses Transportasi Publik	Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro. Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya, kota metropolitan dan kota besar perlu memiliki sistem transportasi berbasis rel; kota sedang perlu sistem transportasi berbasis bus; dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.Persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
85	09.03.065	SDGs;	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Konsep dan Definisi:Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

86	04.01.141	SDGs;	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	1.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. 2.Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
87	03.04.016	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ? 7,2 m2 Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

88	07.05.077	SDGs;	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18 Tahun 2008). Dalam konteks SDG-11, sampah yang dimaksud dalam bagian ini adalah sampah rumah tangga. Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan penuh pengumpulan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rumah Tangga dengan Layanan Dasar/basic Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerimalayananpengumpulansampahdari pintu kepintu dengan frekuensi tetap dan rutin minimal 2 kali dalam seminggu); atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin. Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Improved adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) serta dilakukan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering); atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
89	03.01.070	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka	Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
90	03.01.071	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala	Persentase rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala (sekali dalam 3-5 tahun)	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
91	07.02.025	SDGs;	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas	Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas alam/biogas/ LPG untuk keperluan memasak pada tahun tertentu.Total rumah tangga adalah jumlah total rumah tangga di Indonesia pada tahun tertentu.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
92	09.05.011	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

93	09.02.047	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	Perkembangan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
94	02.02.0030	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Perubahan IHK dari Waktu ke Waktu	Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Inflasi Bulan ke Bulan (month to month) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi Tahun Kalender (year to date) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi Tahun ke Tahun (year on year) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Persentase perubahan IHK yang bernilai negatif disebut juga dengan deflasi.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
95	09.02.052	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Kontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap PDB Nasional.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
96	09.02.0042	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota anggota Wilayah Metropolitan	Jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota yang termasuk dalam suatu wilayah metropolitan, dihitung berdasarkan harga pasar.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia			
97	02.03.0045	RPJMN 2025-2029;	Produktivitas Jagung	Rata-rata hasil panen per hektar untuk Jagung	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
98	02.03.0046	RPJMN 2025-2029;	Produktivitas Padi	Rata-rata hasil panen per hektar untuk Padi	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

99	06.02.054	RPJMN 2025-2029;	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut: 1. Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3): a. Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan) 2. Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6): a. Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau b. Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau c. Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
100	06.01.060	RPJMN 2025-2029;	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, tanpa membedakan status partisipasi sekolah (belum pernah sekolah, masih bersekolah, atau tidak bersekolah lagi) pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat kualifikasi pendidikan tinggi dalam populasi dewasa dan digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi. Penghitungan indikator dilakukan secara berkala (time series) untuk memantau tren capaian, dengan mempertimbangkan: (a) Intervensi kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan tinggi; (b) Proyeksi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (c) Perkembangan jumlah mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

101	04.01.189	SDGs;	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Proporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar (>10 persen atau >25 persen) untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Dua ambang batas digunakan untuk mendefinisikan “pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan”: lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara total pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan (numerator) dan total pengeluaran rumah tangga atau total pendapatan rumah tangga (denominator). Pengeluaranrumahtanggauntukkesehatan didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia dan untuk semua anggota rumah tangga. Pengeluaran kesehatan ini secara langsung dibayar menggunakan pendapatan rumah tangga (termasuk pengiriman uang), tabungan atau pinjaman tetapi tidak termasuk penggantian pembayaran oleh pihak ketiga. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas pada	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
102	07.02.028	SDGs;	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar listrik untuk keperluan memasak pada tahun tertentu dengan jumlah rumah tangga, di kali 100 persen.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
103	02.01.055	SDGs;	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
104	06.01.070	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki	Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk perempuan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk laki-laki.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

105	06.01.071	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas	Perbandingan antara APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita tertinggi (kuintil 5).	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
106	06.01.073	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
107	06.01.074	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki	Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk perempuan dan APK SMA/sederajat penduduk laki-laki.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
108	06.01.077	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
109	06.01.078	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki	Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk perempuan dan APK SMP/sederajat penduduk laki-laki.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
110	06.01.069	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

111	06.01.080	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas	Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APM SD/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
112	06.01.081	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APM SD/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
113	06.01.082	SDGs;	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki	Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk perempuan dan APM SD/sederajat penduduk laki-laki.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
114	04.02.065	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Rasio Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

115	06.01.084	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; Profesi = 18 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
116	06.02.058	RPJMN 2025-2029;	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan adalah rata-rata jumlah waktu (dalam bulan) yang dibutuhkan oleh lulusan pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan atau memulai usaha setelah lulus, dihitung berdasarkan lulusan yang memperoleh pekerjaan atau mulai berwirausaha dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan. Indikator ini mengukur kecepatan transisi lulusan pendidikan tinggi dari dunia pendidikan ke dunia kerja maupun berwirausaha, sebagai salah satu indikator efektivitas sistem pendidikan tinggi dalam mempersiapkan lulusan untuk pasar tenaga kerja. Indikator ini relevan untuk mengindikasikan keterhubungan (link and match) antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja; serta mengevaluasi efektivitas program studi, kurikulum, dan kebijakan pengembangan karier mahasiswa.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
117	06.02.0056	SDGs;	Rata-rata Upah/gaji bersih bulanan	Total imbalan yang diterima pekerja dalam sebulan, baik berupa uang maupun barang, setelah dikurangi potongan-potongan seperti pajak dan iuran wajib	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

118	09.02.076	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Tingkat Inflasi	Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Inflasi Bulan ke Bulan (month to month) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi Tahun Kalender (year to date) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi Tahun ke Tahun (year on year) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Persentase perubahan IHK yang bernilai negatif disebut juga dengan deflasi.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
119	06.02.060	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
120	06.02.061	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

121	06.01.099	SDGs;	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
122	06.01.100	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajar masuk SMA/sederajat adalah 16 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SMA/ sederajat pada usia sekitar 18 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SMA/sederajat adalah anak atau remaja usia 19 tahun (18 + 1 tahun) sampai dengan 21 tahun (18 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

123	06.01.101	SDGs;	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajar masuk SMP/sederajat adalah 13 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SMP/ sederajat pada usia sekitar 15 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SMP/sederajat adalah anak atau remaja usia 16 tahun (15 + 1 tahun) sampai dengan 18 tahun (15 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
124	06.02.064	SDGs;	Tingkat Setengah Penganggur	Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
125	06.02.0057	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Total Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta pengangguran.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
126	02.02.0036	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Total Ekspor Barang dan Jasa	Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri dalam periode tertentu	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
127	02.03.0050	RPJMN 2025-2029;	Total Luas Area Panen Jagung	Total area panen untuk Jagung	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
128	02.03.0051	RPJMN 2025-2029;	Total Luas Area Panen Padi	Total area panen untuk Padi	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
129	04.01.199	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	STATISTIK	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

130	05.01.0014	SDGs;	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (JMBHL)	Jumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses peradilan (litigasi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
131	05.01.0015	SDGs;	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi (JMBHNL)	Jumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi), seperti konsultasi hukum, mediasi, atau penyuluhan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
132	05.01.0023	DP 2024;	Jumlah Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Bantuan Hukum	Merupakan Data Jenis Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang telah diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
133	05.01.0038	SDGs;	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi (JBHL)	Jumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur peradilan (litigasi) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
134	05.01.0039	SDGs;	Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi (JBHNL)	Jumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur di luar peradilan (nonlitigasi) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
135	05.03.004	RPJMN 2025-2029;	Persentase Capaian Aksi RANHAM	RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM sendiri adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. RANHAM merupakan kebijakan periodik yang dilaksanakan. Persentase Capaian Aksi RanHAM diambil dari partisipasi K/L/D.	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

136	05.01.015	SDGs;	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Konsep dan Definisi:Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pemohon bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.	STATISTIK	Biro Hukum Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
137	09.03.0004	RKP 2025;	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima.	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
138	09.06.0005	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Pelayanan Publik Provinsi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

139	09.06.008	RPJMN 2025-2029;	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai, di antaranya:Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tatakelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan culture set.Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah:a.Tidak ada korupsi;b.Tidak ada pelanggaran/sanksi;c.APBN dan APBD baik;d.Semua program selesai dengan baik;e.Semua perizinan selesai dengan cepat dan	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
140	09.06.0016	SDGs;	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks RB ≥ B (JIPRB):	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi Indeks RB, yang mencerminkan tingkat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
141	09.06.0017	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B (JIPS):	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi SAKIP, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
142	09.06.016	RPJMN 2025-2029;	Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik	Jumlah layanan publik prioritas yang telah diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik nasional. Integrasi ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara terpusat melalui satu portal. Sumber: Perpres No. 82 Tahun 2023	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

143	09.06.028	SDGs;	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B	Persentasi instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi Indeks RB, yang mencerminkan tingkat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
144	09.06.029	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B	Persentasi instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi SAKIP, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.	STATISTIK	Biro Organisasi Setda	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
145	01.02.014	SDGs;	Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional	Jumlah keanggotaan dalam organisasi internasional Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan: a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; c) kepercayaan masyarakat internasional.	STATISTIK	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda	Tahunan	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
146	09.05.006	SDGs;	Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	Konsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan- Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.Bentuk KSSTPelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas antara lain kerja sama teknik dan nonteknik yang diarahkan untuk dapat memberikan perluasan pada pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan. Lingkup prioritas kegiatan KSSTBidang Pembangunan, antara laina.Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pem-berdayaan masyarakatb.Infrastruktur dan sarana prasaranac.Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklimd.Pengembangan sumber daya manusiae.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologif.Pengembangan sosial dan budayag.Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global2.Bidang Good Governance dan Peace Building, antara lain peace building, peace keeping, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (interfaith).3.Bidang Ekonomi,	STATISTIK	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda	Tahunan	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

147	09.06.009	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
148	09.06.0006	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
149	09.06.0007	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit Aspek Pengadaan	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
150	09.06.0008	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
151	09.06.0009	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
152	09.06.0010	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

153	09.06.0011	RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Merit Aspek Sistem Informasi	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
154	10.01.0003	SDGs;	Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JPLE)	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
155	09.06.0022	SDGs;	Jumlah Seluruh Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JSPLE)	Jumlah total pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
156	04.03.024	SDGs;	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif	Konsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
157	09.06.0038	SDGs;	Total Jumlah SDM di bidang IPTEK	Jumlah sumber daya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup: Peneliti: PNS dengan jabatan fungsional peneliti yang bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi di instansi pemerintah. Perekayasa: PNS dengan jabatan fungsional perekayasa yang melaksanakan kegiatan perekayasaan dalam bidang penelitian terapan, pengembangan, dan pengoperasian teknologi. Dosen: Pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi yang melaksanakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).	STATISTIK	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

158	09.07.001	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.; IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:; IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi); IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan; IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). ; IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:; Aspek Kebebasan (7 indikator);; Aspek Kesetaraan (7 indikator);; Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).; Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran untuk mengukur kualitas demokrasi Indonesia setiap tahun. Ada 3 angka IDI, yaitu IDI tingkat nasional, IDI tingkat pusat, dan IDI tingkat provinsi.;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara pemilu, (4) putusan	STATISTIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
159	08.01.004	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.	STATISTIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
160	04.02.0015	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Nilai Dimensi Kerja sama Kerukunan Umat Beragama	Nilai untuk Mengukur tingkat kolaborasi dan interaksi positif antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan.	STATISTIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
161	04.02.0016	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Nilai Dimensi Kesetaraan Kerukunan Umat Beragama	Nilai untuk Menilai sejauh mana masyarakat memandang kesetaraan hak dan kewajiban antar pemeluk agama berbeda.	STATISTIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
162	04.02.0017	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Nilai Dimensi Toleransi Kerukunan Umat Beragama	Nilai untuk Mengukur sejauh mana masyarakat menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.	STATISTIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

163	05.02.013	RPJMN 2025-2029;	Indeks Risiko Bencana	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
164	03.07.0009	SDGs;	Jumlah Korban Hilang	Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
165	03.07.0010	SDGs;	Jumlah Korban Hilang akibat Bencana Hidrometeorologi	Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana hidrometeorologi.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
166	03.07.0011	SDGs;	Jumlah Korban Mengungsi	Jumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
167	03.07.0012	SDGs;	Jumlah Korban Mengungsi akibat Bencana Hidrometeorologi	Jumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana hidrometeorologi.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
168	03.07.0013	SDGs;	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana..	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
169	03.07.0014	SDGs;	Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi	Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
170	03.07.0015	SDGs;	Jumlah Korban Terluka	Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
171	03.07.0016	SDGs;	Jumlah Korban Terluka akibat Bencana Hidrometeorologi	Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

172	10.01.0002	SDGs;	Jumlah Pemerintah Daerah yang Menerapkan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional (JPDBN)	Jumlah pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki dokumen strategi PRB tingkat daerah (seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah/RPBD, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana/RAD PRB, atau Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim/RAD API) yang telah disahkan dan selaras dengan strategi nasional.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
173	04.02.043	SDGs;	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:a.RPBD:5 tahun dan laporan pencapaianb. RAD PB: 3 tahun dan laporan pencapaianc.RAD API5 tahun dan laporan pencapaian.	STATISTIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
174	09.02.0005	SDGs;	Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP (JIPWTP	Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan mereka telah disajikan secara wajar tanpa adanya pengecualian.	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
175	09.02.0009	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Penerimaan Hibah	Penerimaan negara yang berasal dari pemberi hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
176	09.02.0018	RKP 2025;	Opini Laporan Keungan	Dokume Laporan Keuangan	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
177	09.02.0025	SDGs;	Pengeluaran untuk Kesehatan	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan, termasuk biaya operasional rumah sakit dan puskesmas, serta program kesehatan masyarakat	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
178	09.02.0026	SDGs;	Pengeluaran untuk Pendidikan	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan, termasuk gaji tenaga pendidik dan belanja operasional pendidikan	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
179	09.02.0027	SDGs;	Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

180	09.06.040	SDGs;	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Konsep dan Definisi:Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
181	09.02.046	SDGs;	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (in-cash transfer) atau pelayanan (in-kind transfer). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
182	09.02.0043	RPJMN 2025-2029;	Realisasi Belanja Negara	Jumlah aktual pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam periode tertentu	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
183	09.02.0046	SDGs;	Total Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk program dan kegiatan yang termasuk dalam fungsi perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial	STATISTIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

184	09.05.002	RPJMN 2025-2029;	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi sektor kelautan, termasuk perikanan dan budidaya perairan, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata, terhadap perekonomian Indonesia. Kedua, Pilar Lingkungan Hidup membahas kualitas ekosistem laut yang akan menjadi proksi keberlanjutan untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan. Dan yang ketiga, Pilar Sosial mewakili inklusivitas. IBEI merupakan indikator yang menggabungkan beberapa indikator untuk memberikan gambaran kondisi yang kompleks. IBEI menunjukkan penguasaan dan perkembangan sektor ekonomi biru di Indonesia dengan tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan dari 3 (tiga) pilar, 11 (sebelas) sub pilar, dan 44 (empat puluh empat) indikator. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional maupun provinsi. IBEI dibangun berdasarkan 3 (tiga) aspek utama yang merupakan komponen dari pembangunan ekonomi biru berkelanjutan, yaitu keberlanjutan (pilar lingkungan), pertumbuhan (pilar ekonomi), dan inklusivitas (pialr sosial).	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
185	09.05.0006	RPJMN 2025-2029;	Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Ekonomi	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi sektor kelautan, termasuk perikanan dan budidaya perairan, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata, terhadap perekonomian Indonesia	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
186	09.05.0007	RPJMN 2025-2029;	Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Lingkungan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan.. Kedua, Pilar Lingkungan Hidup membahas kualitas ekosistem laut yang akan menjadi proksi keberlanjutan untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan.	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
187	09.05.0008	RPJMN 2025-2029;	Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Sosial	Dan yang ketiga, Pilar Sosial mewakili inklusivitas	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
188	07.05.0053	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Penurunan emisi GRK total sektoral tahun t (PEt)	Selisih antara emisi GRK yang dihasilkan pada skenario Business as Usual (BAU) dan emisi aktual yang dihasilkan pada tingkat masing-masing sektor pada tahun t. Data dikumpulkan pada aplikasi AKSARA.	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

189	07.05.057	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
190	07.05.087	SDGs;	Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang sama.	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
191	06.03.002	RPJMN 2025-2029;	Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimal	BRIDA/BAPPERIDA adalah lembaga perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah (definisi sesuai Perpres No.78/2021 pasal 66-68, Permendagri 07/2023 pasal 13, dan PerBRIN No.5/2023 pasal I). Jumlah BRIDA/Ekosistem Daerah yang beroperasi optimal adalah jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang berhasil menjalankan peran manajemen dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di daerah, yang ditunjukkan melalui indikator utama: i. termanfaatkannya rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di daerah melalui peran BRIDA sebagai hub dalam optimalisasi potensi dan solusi masalah di daerah; ii. mendorong keberhasilan ekosistem IPTEK di daerah yang diukur dengan nilai Pilar 12 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	STATISTIK	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
192	06.03.015	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	Indikator ini menyatakan Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	STATISTIK	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

193	09.06.004	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi	STATISTIK	Inspektorat	Tahunan	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia
194	09.01.0017	SDGs;	Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi	Jumlah perempuan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dalam satu periode legislatif.	STATISTIK	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
195	09.01.0020	SDGs;	Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi	Total keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang terpilih dan menjabat dalam satu periode legislatif	STATISTIK	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
196	04.03.022	SDGs;	Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di tingkat daerah adalah presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.	STATISTIK	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
197	08.02.003	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.	STATISTIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
198	08.02.025	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.	STATISTIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
199	08.02.0004	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Ketercukupan Koleksi perpustakaan	Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah penduduk	STATISTIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

200	02.11.006	SDGs;	Jumlah Desa Wisata/ Destinasi dengan Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Banyaknya Desa Wisata/ Destinasi yang menerapkan standar pariwisata berkelanjutan	STATISTIK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
201	02.11.007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.	STATISTIK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
202	07.04.004	SDGs;	Jumlah nelayan yang terlindungi	Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
203	07.04.0011	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Garam Tambak Garam	Jumlah total garam yang dihasilkan oleh petani garam rakyat dalam periode tertentu.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
204	02.06.002	SDGs;	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi / kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses perikanan skala kecil	Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), serta melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun- temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local.Menurut FAO-UN (2018) berdasarkan dokumen Rio+20 para 175, maka didalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil, maka terdapat 3 (tiga) syarat utama, yaitu: 1.Kerangka hukum, peraturan dan kebijakan yang tepat; 2.Inisiatif khusus untuk mendukung perikanan skala kecil; dan 3.Mekanisme kelembagaan terkait yang memungkinkan partisipasi organisasi perikanan skala kecil didalam proses- proses yang relevan.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

205	07.04.007	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.Taman nasional laut adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.Jumlah kawasan konservasi perairan laut adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan territorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar.Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
206	07.04.008	RPJMN 2025-2029;	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola	Indikator untuk mengukur total luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tujuan pengelolaan kawasan konservasi	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
207	07.04.0013	RPJMN 2025-2029;	luas kawasan konservasi perairan	Total luas area perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan resmi pemerintah. Total luas area yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
208	07.04.012	RPJMN 2025-2029;	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (EVIKA) dihitung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output dan outcome.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

209	07.04.017	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaku usaha dalam kategori tertentu (misalnya, KP atau Kelompok Pengusaha) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Pelaku Usaha Sektor Perikanan adalah unit usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur. Pelaku Usaha Sektor Kelautan adalah unit usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang kelautan mencakup subsektor pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan produk kelautan, dan pemanfaatan jasa kelautan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur dan pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kepatuhan adalah: 1. Pelaku usaha yang telah memenuhi syarat, 2. Pelaku Usaha yang telah melakukan perbaikan&	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
210	02.06.009	SDGs;	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.Pengelolaan WPPNRI berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
211	07.04.022	SDGs;	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang Berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
212	02.06.0025	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Total hasil tangkapan jenis ikan	Jumlah total tangkapan dari jenis ikan tertentu selama periode waktu yang ditentukan	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

213	07.04.005	RPJMN 2025-2029;	Volume Produksi Garam	Banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
214	02.06.010	RPJMN 2025-2029;	Volume Produksi Ikan	Jumlah produksi perikanan tangkap dan ikan budi daya.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
215	02.06.012	RPJMN 2025-2029;	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan di wilayah Kabupaten/Kota. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil budidaya.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
216	02.06.015	RPJMN 2025-2029;	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Laut dan Perairan Umum Daratan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
217	02.06.020	RPJMN 2025-2029;	Volume Produksi Rumput Laut	Data produksi rumput merupakan penjumlahan data produksi rumput laut yang dibudidayakan maupun yang dipanen secara langsung dari alam	STATISTIK	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
218	06.04.003	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Pemuda	Suatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 16 indikator penyusunnya. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan dan pelatihan, (ii) domain kesehatan, (iii) domain ketenagakerjaan layak, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) inklusivitas dan kesetaraan gender.	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
219	06.05.002	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang Terbentuk	Jumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang Terbentuk adalah jumlah kabupaten atau kota yang telah membentuk PPLP sebagai upaya pembinaan dan pengembangan bakat olahraga di kalangan pelajar. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) adalah sentra pembinaan olahraga prestasi di kabupaten/kota yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat olahragawan pelajar. Indikator ini menunjukkan jumlah kabupaten atau kota yang telah mendirikan PPLP untuk mendukung pengembangan bakat olahraga di tingkat pelajar.	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

220	06.05.0001	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	Jumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade, yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi daerah, seperti Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), atau sentra pembinaan lainnya yang diakui oleh pemerintah daerah.	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
221	06.05.0002	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Pusat	Jumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi pusat, seperti Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
222	06.05.017	RPJMN 2025-2029;	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	Hasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Games	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
223	06.05.018	RPJMN 2025-2029;	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	Jumlah seluruh perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Para Games Asian Youth Para Games adalah ajang multi-olahraga yang diselenggarakan untuk atlet muda disabilitas. Acara ini diadakan setiap empat tahun sekali, di bawah naungan Komite Paralimpiade Asia (Asian Paralympic Committee), dan bertujuan untuk memberikan platform kompetitif bagi atlet muda dengan berbagai disabilitas.	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
224	06.05.020	RPJMN 2025-2029;	Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games	Hasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Games	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

225	06.05.021	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	STATISTIK	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
226	04.01.001	RPJMN 2025-2029;	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
227	04.01.006	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)	Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: • 70 sangat tinggi, • 40-70 tinggi, • 20-39 sedang, • dan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
228	04.01.007	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
229	04.01.012	RPJMN 2025-2029;	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis campak rubella (MR) di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
230	04.01.015	RPJMN 2025-2029;	Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar	Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas minimal 4x secara lengkap sesuai standar dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam setelah melahirkan, 1x pada hari 3-7, 1x pada hari ke 8 -28, dan 1x pada hari ke 29-42 setelah melahirkan di suatu wilayah pada kurun waktu yang tertentu Pelayanan yang harus diberikan adalah sebagai berikut: 1. identifikasi tanda bahaya (perdarahan, tekanan darah tinggi, pandangan mata kabur, nyeri kepala yang sangat mengganggu, kejang, keluarnya cairan berbau dan berwarna dari jalan lahir), 2. edukasi menyusui, 3. edukasi dan/atau pelayanan KB, 4. edukasi tentang pemenuhan gizi ibu selama masa nifas dan menyusui	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

231	04.01.020	RPJMN 2025-2029;	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini melibatkan beberapa langkah penting: Deteksi Gejala: Identifikasi individu yang menunjukkan gejala TBC, seperti batuk kronis, nyeri dada, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Pemeriksaan Klinis: Evaluasi klinis oleh tenaga medis untuk menilai kemungkinan adanya infeksi TBC berdasarkan gejala, riwayat kesehatan, dan faktor risiko. Tes Diagnostik: Tes Tuberkulin (Mantoux): Uji kulit untuk mendeteksi reaksi imun terhadap bakteri TBC. Sputum Examination: Pemeriksaan dahak untuk menemukan bakteri TBC melalui mikroskopi atau kultur. Tes Molekuler: Tes berbasis DNA untuk mendeteksi keberadaan genetik bakteri TBC. Konfirmasi Diagnosis: Berdasarkan hasil tes, dokter menentukan apakah seseorang terdiagnosis TBC atau tidak.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
232	04.01.0012	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus	Anak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -3,0 SD berdasarkan standar WHO 2005	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
233	04.01.0017	RPJMN 2025-2029;	Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI	Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
234	04.01.0018	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASI	Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
235	04.01.0019	RPJMN 2025-2029;	Jumlah balita 12-59 bulan	Jumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun).	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
236	04.01.0020	RPJMN 2025-2029;	Jumlah balita 12-59 bulan yang dipantau	Jumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin, seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, minimal 8 kali dalam setahun. Perpustakaan Pusat Poltekkes Malang	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
237	04.01.0022	RPJMN 2025-2029;	Jumlah bayi lahir hidup	Jumlah total bayi yang lahir hidup dalam periode dan wilayah yang sama.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

238	04.01.0023	RPJMN 2025-2029;	Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standar	Bayi yang mendapatkan minimal tiga kunjungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
239	04.01.0025	RPJMN 2025-2029;	Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir	Bayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain dalam 24 jam terakhir	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
240	04.01.0026	RPJMN 2025-2029;	Jumlah bayi usia 6 bulan	Total jumlah bayi yang berusia tepat 6 bulan dalam suatu wilayah atau periode tertentu.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
241	04.01.0027	RPJMN 2025-2029;	Jumlah bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang menerima Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat dan vitamin, sejak lahir hingga usia 6 bulan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
242	04.01.0028	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant)	Jumlah bayi yang lahir hidup dan masih hidup hingga usia satu tahun dalam periode yang sama	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
243	04.01.0029	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah bayi usia 0–11 bulan yang telah menerima semua vaksin dasar sesuai jadwal, yaitu: 1 dosis Hepatitis B 1 dosis BCG 4 dosis Polio tetes (bOPV) 1 dosis Polio suntik (IPV) 3 dosis DPT-HB-Hib 1 dosis Campak Rubella (MR)	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
244	04.01.0030	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Calon Pengantin yang Disaring	Jumlah individu yang menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai standar, termasuk pemeriksaan status gizi, hemoglobin, tekanan darah, dan riwayat penyakit.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
245	04.01.0031	RPJMN 2025-2029;	Jumlah dokter spesialis teregistrasi	Jumlah dokter spesialis yang telah teregistrasi secara resmi dan memiliki izin praktik di Indonesia	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
246	04.01.0032	RPJMN 2025-2029;	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun	Estimasi jumlah individu usia 15 tahun ke atas yang menderita hipertensi di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
247	04.01.0039	RPJMN 2025-2029;	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar dalam satu tahun	Jumlah ibu hamil yang telah melakukan kunjungan antenatal minimal enam kali dengan distribusi kunjungan sesuai standar selama periode satu tahun.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

248	04.01.0041	RPJMN 2025-2029;	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Ibu hamil yang menerima semua 12 tindakan standar selama masa kehamilan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
249	04.01.0043	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Ibu Nifas Sasaran	Jumlah total ibu nifas yang menjadi target pelayanan dalam periode tertentu.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
250	04.01.0044	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Lengkap Sesuai Standar	Jumlah ibu nifas yang menerima semua kunjungan nifas sesuai jadwal dan standar pelayanan.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
251	04.01.0050	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kabupaten/Kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada cakupan >80% target	Jumlah kabupaten atau kota yang berhasil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lebih dari 80% populasi target di wilayahnya.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
252	04.01.029	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada Rumah Sakit sesuai standar	Total kabupaten/kota dengan seluruh RS milik Pemerintah pada wilayah tersebut memenuhi jenis dokter spesialis sesuai standar berdasarkan kategori pelayanan (non lokus, dan lokus pelayanan unggulan KJSU KIA). Standar Spesialis pada RS non-lokus : 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, SP.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu pelayanan KJSU-KIA.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

253	07.05.028	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM)	STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hidup sehat di masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. STBM diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat. salah satu dari STBM, yaitu Pilar 4: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Pengelolaan ini meliputi pemisahan sampah, daur ulang, dan pengolahan sampah agar tidak mencemari lingkungan, baik tanah maupun air. Ini penting untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Jumlah kab/kota dimaksud adalah kota/kabupaten dengan 75% Kepala Keluarga mengelola sampah yang memenuhi syarat.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
254	04.01.030	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan air minum baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara rutin. Kabupaten/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (E-Coli dan 4 parameter kimia tertentu) di 70% Sarana Air Minum dan 30% air minum rumah tangga	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
255	04.01.0053	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):	Jumlah kabupaten atau kota yang memiliki setidaknya 75% Posyandu siklus hidup berstatus aktif di wilayahnya.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

256	04.01.034	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	Total kabupaten/kota dengan minimal 90% Puskesmas memenuhi jenis dan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar kriteria. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar : 1. Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing- masing 1 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisionis, tenaga kesehatan masyarakat/sanitasi lingkungan, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ ketatausahaan. 2. Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 3. Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku/kesehatan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
257	04.01.044	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta	Kab/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus baru kusta anak selama 5 tahun dan tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
258	04.01.045	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
259	04.01.0057	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kasus Kusta Baru Tanpa Disabilitas (Disabilitas Tingkat 0)	Jumlah individu yang didiagnosis kusta dalam periode tertentu dan tidak mengalami disabilitas akibat penyakit tersebut (disabilitas tingkat 0).	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
260	04.01.0058	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kasus TBC yang Ditemukan dan Dilaporkan	Jumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan diantara Perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) di wilayah tertentu	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

261	03.07.0007	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah kematian anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan)	Jumlah anak yang meninggal pada rentang usia 0 hingga 59 bulan dalam periode tertentu.?	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
262	03.07.0008	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah kematian bayi usia	Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dalam periode waktu tertentu	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
263	04.01.0059	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari (JK	Jumlah bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan pada periode tertentu.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
264	04.03.0016	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah kematian ibu terkait kehamilan, persalinan, dan masa nifas	Jumlah perempuan yang meninggal akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tidak termasuk kematian akibat kecelakaan atau insiden yang tidak terkait.?	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
265	04.01.0060	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkan	Jumlah individu yang tinggal serumah dengan penderita TBC yang telah menerima dan dilaporkan mendapatkan TPT dalam periode tertentu	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
266	04.01.0065	RPJMN 2025-2029;	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yaitu Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan kelola stress) 3) Pengelolaan farmakologis Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
267	04.01.0066	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penderita Kusta Baru yang Menyelesaikan Pengobatan Tepat Waktu	Jumlah penderita kusta baru (baik tipe Pausibasiler [PB] maupun Multibasiler [MB]) yang berhasil menyelesaikan jumlah dosis yang ditentukan dalam rentang waktu yang sesuai	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
268	04.01.0067	RPJMN 2025-2029;	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah	Definisi: Jumlah anak berusia di bawah 6 tahun yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk skrining pertumbuhan, perkembangan, mata, telinga, gigi, tuberkulosis, serta skrining hepatitis B, C, dan sirosis untuk kelompok risiko.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

269	04.01.0068	RPJMN 2025-2029;	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk per kelompok bayi baru lahir	Definisi: Jumlah bayi usia 0–28 hari yang mendapatkan setidaknya dua jenis pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengukuran berat badan, pemeriksaan fisik bayi baru lahir (PJBK), dan pengambilan sampel untuk deteksi dini kondisi medis tertentu.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
270	04.01.0069	RPJMN 2025-2029;	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun	Definisi: Jumlah individu berusia 15 hingga 59 tahun yang mendapatkan layanan skrining gratis untuk diabetes melitus dan hipertensi.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
271	04.01.0070	RPJMN 2025-2029;	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis per kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai	Definisi: Jumlah anak dan remaja berusia 7 hingga kurang dari 18 tahun yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis di institusi pendidikan, mencakup skrining telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa, status gizi, tekanan darah, tuberkulosis, kebugaran jasmani, perilaku merokok, anemia pada remaja putri, thalasemia, diabetes melitus (untuk usia ≥15 tahun), serta hepatitis B, C, dan sirosis (untuk kelompok risiko).	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
272	04.01.0071	RPJMN 2025-2029;	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun	Definisi: Jumlah individu berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan layanan skrining kesehatan gratis sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah disebutkan.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
273	04.01.0083	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

274	04.01.0086	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih Berlaku	Jumlah Puskesmas yang telah memperoleh status akreditasi paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat akreditasinya masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
275	04.01.0090	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layanan	Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar: 1. Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisionis, sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 2. Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 3. Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
276	04.01.0091	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INM	Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi semua target yang ditetapkan dalam Indikator Nasional Mutu sesuai regulasi	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
277	04.01.0096	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar SPA	Jumlah rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah memenuhi setidaknya 80% dari standar ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
278	04.01.0097	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Sertifikat Akreditasi Paripurna yang Masih Berlaku (2025-2029)	Jumlah rumah sakit milik pemerintah yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan status paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat tersebut masih berlaku dalam rentang waktu 2025 hingga 2029	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

279	04.01.0098	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Standar Dokter Spesialis	Jumlah rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah memenuhi standar minimal ketersediaan tujuh jenis dokter spesialis dasar berikut: Spesialis Anak (Sp.A) Spesialis Bedah (Sp.B) Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) Spesialis Anestesiologi (Sp.An) Spesialis Radiologi (Sp.Rad) Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) Selain itu, rumah sakit tersebut juga harus memiliki minimal satu dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada Rumah Sakit Pengampu Pelayanan KJSU-KIA.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
280	04.01.0099	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu	Rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lain, atau Pemerintah Daerah	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
281	04.01.0110	RPJMN 2025-2029;	Jumlah sasaran ibu hamil	Total ibu hamil yang menjadi target pelayanan antenatal dalam periode tersebut	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
282	04.01.0113	RPJMN 2025-2029;	Jumlah SDMK yang Telah Menyelesaikan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam Sistem Informasi SDMK dan telah mengikuti serta menyelesaikan pelatihan, workshop, atau praktik langsung (hands-on) di bidang kesehatan.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
283	04.01.0114	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah seluruh anak balita	Total populasi anak usia 0-59 bulan yang diukur pada periode waktu tertentu	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
284	04.01.0115	RPJMN 2025-2029;	Jumlah seluruh bayi usia 0–28 hari	Total bayi baru lahir dalam wilayah dan periode yang ditentukan.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
285	04.01.0121	RPJMN 2025-2029;	Jumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatan	Jumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatan diantara jumlah kasus TBC SO ditemukan yang dilaporkan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
286	04.01.0128	SDGs;	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis	Jumlah individu yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga psikologi klinis, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

287	04.01.0130	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah total anak balita (JAB(5))	Total keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensus	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
288	04.01.0132	RPJMN 2025-2029;	Jumlah total ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama	Jumlah keseluruhan ibu yang melahirkan dalam periode satu tahun.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
289	04.01.0133	RPJMN 2025-2029;	Jumlah total ibu hamil yang diperiksa	Jumlah total ibu hamil yang diperiksa adalah jumlah keseluruhan ibu hamil yang telah menerima pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, termasuk pemeriksaan antenatal sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
290	04.01.0138	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Total Penderita Kusta Baru pada Periode Kohort Tersebut	Jumlah semua penderita kusta baru yang terdiagnosis dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun)	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
291	04.01.0141	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi dan Operasional hingga Tahun 2028	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang telah teregistrasi dan beroperasi hingga tahun 2028	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
292	04.01.0142	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi yang Beroperasi hingga Tahun 2026	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang telah teregistrasi dan mulai beroperasi paling lambat pada tahun 2026	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
293	04.01.062	SDGs;	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

294	04.01.067	RPJMN 2025-2029;	Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
295	04.01.068	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mengkonsumsi makanan dan minuman setidaknya 5 dari 8 jenis kelompok makanan pada hari kemarin sebelum wawancara. Yang dimaksud 8 jenis kelompok makanan adalah ASI, makanan pokok, kacang-kacangan, produk susu hewani, dagingdagingan, telur, buah dan sayuran kaya vitamin A, serta buah dan sayuran lainnya	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
296	04.01.071	RPJMN 2025-2029;	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, 3 kali pada trimester ke-3	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
297	04.01.073	RPJMN 2025-2029;	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
298	04.01.074	RPJMN 2025-2029;	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah dilahirkan pada wilayah dan kurun waktu yang tertentu. Standar kunjungan neonatal meliputi: • Pemeriksaan neonatus menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) • Perawatan metode Kangguru (PMK) untuk bayi BBLR	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
299	04.01.082	RPJMN 2025-2029;	Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan	Persentase Calon Pengantin yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
300	04.01.089	RPJMN 2025-2029;	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit populasi: total seluruh faskes (tanpa apotik)	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

301	04.01.095	RPJMN 2025-2029;	Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	Persentase ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) prahamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m2 dan/atau lingkar lengan atas < 23,5 cm	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
302	04.01.096	RPJMN 2025-2029;	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (12T) meliputi: 1.Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2.Ukur tekanan darah 3.Tentukan status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA) 4.Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri) 5.Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 6.Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan 7.Pemberian tablet tambah darah minimal 180 tablet selama masa kehamilan 8.Tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B), Malaria, gluko-protein urin, gula darah sewaktu, BTA 9.Diagnosis dan Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan 10.Temu wicara (konseling) 11. Temui dokter untuk USG 12. Temui Nakes untuk Skrining keswa	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
303	04.01.0154	RPJMN 2025-2029;	Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
304	04.01.103	RPJMN 2025-2029;	Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	Persentase kab/kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas mampu PONED dari total Puskesmas di wilayahnya. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas yang mampu menjalankan sinyal fungsi, sebagai berikut: 1. Pemberian injeksi parenteral antibiotik 2. Pemberian obat untuk tatalaksana perdarahan pasca salin 3. Pemberian injeksi parenteral Antikonvulsan 4. Melakukan tindakan Manual Placenta 5. Melakukan tindakan persalinan pervaginam berbantu vakum ekstraksi letak rendah** 6. Melakukan tindakan pengeluaran sisa konsepsi** 7. Pemberian cairan IV terapetik 8. Melakukan tindakan resusitasi 9. Pemberian injeksi parenteral antibiotika 10. Pemberian terapi Oksigen tekanan positif 11. Memfasilitasi pemberian ASI 12. Memfasilitasi perawatan metode kangguru 13. Melakukan Perawatan Berkelanjutan Obsteteri dan Neonatal selama rujukan antar faskes **sinyal fungsi yang tidak wajib, dan butuh kompetensi tambahan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

305	04.01.106	RPJMN 2025-2029;	Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	Sarana air minum diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (aman) : Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada sarana air minum yang diperiksa kualitasnya dan memenuhi syarat di antara seluruh jumlah sarana air minum yang ada.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
306	04.01.109	RPJMN 2025-2029;	Persentase kabupaten/kotad engan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	Persentase Kab/Kota yang minimal 75% Posyandu siklus hidup di wilayahnya telah memiliki status aktif berdasarkan 2 kriteria yaitu - posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam setahun dalam bulan berbeda; - memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
307	04.02.037	RPJMN 2025-2029;	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persentase lansia >= 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (skor ADL 12-19/ketergantungan ringan).	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
308	04.01.122	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)	Jumlah semua kasus TBC yang memulai pengobatan diantara Jumlah kasus TBC ditemukan yang dilaporkan	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
309	04.01.127	RPJMN 2025-2029;	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan kelola stress) 3) Pengelolaan farmakologis Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

310	04.01.128	RPJMN 2025-2029;	Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Jumlah penderita baru kusta kering (PB:Pausi Basiler/kuman sedikit) atau kusta basah (MB: MultiBasiler/kuman banyak) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (PB menyelesaikan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan/MB menyelesaikan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) Penyelesaian Pengobatan Kusta Tepat Waktu disebut juga Release From Treatment (RFT). RFT dapat dinyatakan setelah dosis dipenuhi tanpa diperlukan pemeriksaan laboratorium.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
311	04.01.130	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis utk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun terhadap total populasi kelompok lanjut usia >=60 tahun pada tahun berjalan. Skrining pada kelompok lanjut usia adalah Skrining Telinga, Mata, Gigi, Jiwa, Gizi, Tekanan Darah, Diabetes Melitus Tuberkulosis, Kebugaran, Merokok, Stroke, Jantung dan Ginjal (untuk penderita HT dan DM), Kanker Leher Rahin dan Payudara (untuk wanita), Kanker Paru, Kanker Usus Besar, PPOK, Osteoporosis, dan Geriatri serta Skrining Hepatitis B,C dan Sirosis untuk kelompok risiko	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
312	04.01.131	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal skrining pertumbuhan tes daya dengar dan test daya lihat untuk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah terhadap total penduduk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah Skrining pada kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah adalah Skrining Pertumbuhan, Perkembangan, Mata, Telinga, Gigi, dan Tuberkulosis, serta Skrining Hepatitis B,C dan Sirosis untuk kelompok risiko	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia				
313	04.01.132	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk kelompok usia bayi baru lahir terhadap total penduduk kelompok bayi baru lahir Skrining pada kelompok usia bayi baru lahir adalah pengukuran berat badan, pjbk, dan pengambilan sam	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
314	04.01.133	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun terhadap total kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

315	04.01.134	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
316	04.01.0156	RPJMN 2025-2029;	Persentase prevalensi stunting balita (Tinggi Badan menurut Umur)	Definisi : Persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan WHO Rumus : Jumlah balita (0-59 bulan) dengan tinggi badan menurut umur di bawah -2 SD dari standar WHO dibagi dengan jumlah balita (0-59 bulan) yang diukur tinggi badannya, dikalikan 100 persen.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
317	04.01.149	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Proporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmas	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
318	04.01.148	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar: 1. Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisionis, sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 2. Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 3. Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

319	04.01.151	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar	Persentase puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
320	04.01.153	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas teregistrasi yang paling lambat operasional di tahun 2026	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
321	04.01.154	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
322	04.01.156	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	Persentase Puskesmas yang telah mencapai seluruh target di INM Puskesmas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
323	04.01.0157	RPJMN 2025-2029;	Persentase RS Pemerintah D aerah yang memenuhi Ketersediaan Sar ana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai stan dar	Persentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAK	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
324	04.01.0158	RPJMN 2025-2029;	Persentase RS Pemerintah yang mencapai target INM (Indikator Nasion al Mutu)	Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah Sakit	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

325	04.01.159	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Persentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAK	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
326	04.01.160	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Proporsi RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu Pealayanan KJSU-KIA	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
327	04.01.162	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
328	04.01.167	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	Persentase Rumah Sakit yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah Sakit	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
329	04.01.177	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
330	04.01.0165	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Prevalensi Stunting	Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronis	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
331	04.01.181	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Prevalensi Wasting pada Balita	Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:■Sangat Kurus : Zscore -3,0■Kurus : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore -2,0	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

332	04.01.184	RPJMN 2025-2029;	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	Proporsi kasus kusta baru anak (	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
333	04.01.185	RPJMN 2025-2029;	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	Persentase Penderita Kusta baru tanpa disabilitas (disabilitas tingkat 0) di antara total Penderita Kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu yang sama	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
334	04.01.190	SDGs;	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	1. Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke - 3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu.2. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu.3.Cakupan vaksi konjugat pneumokus/PCV (dosis terakhir dalam jadwal): Persentase bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
335	04.01.193	RPJMN 2025-2029;	Rasio dokter spesialis	Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
336	04.01.0171	RPJMN 2025-2029;	Total Populasi Rumah Sakit Pemerintah yang Memiliki Izin Operasional hingga Tahun 2027	Jumlah seluruh rumah sakit milik pemerintah yang telah memiliki izin operasional paling lambat pada tahun 2027, mencakup rumah sakit yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
337	04.01.0173	RPJMN 2025-2029;	Total Puskesmas	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang teregistrasi dan operasional hingga tahun 2028.	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
338	04.01.0175	RPJMN 2025-2029;	Total Rumah Sakit Pemerintah Daerah	Jumlah keseluruhan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
339	04.01.0176	RPJMN 2025-2029;	Total Rumah Sakit Pemerintah yang Teregistrasi dan Laik Operasional	Jumlah keseluruhan rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah teregistrasi dan memenuhi syarat laik operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
340	04.01.0177	RPJMN 2025-2029;	Total Rumah Sakit Pemerintah yang teregistrasi hingga tahun 2027	Serangkaian indikator yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, identifikasi pasien, dan lainnya	STATISTIK	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

341	02.03.004	RPJMN 2025-2029;	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
342	02.03.0008	Draf Renstra Bapanas 2025-2029;	Jumlah Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri (PD)	Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri (PD) yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT PD dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi.	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
343	02.03.0011	RPJMN 2025-2029;	Jumlah pangan yang disalurkan ke penerima manfaa t	Jumlah pangan yang telah melalui proses pengendalian mutu dan dinyatakan layak konsumsi, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pangan/penggiat selamatkan pangan.	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
344	02.03.0016	Draf Renstra Bapanas 2025-2029;	Jumlah Penerbitan Registrasi Rumah Pengemasan (Packing House)	Banyaknya rumah pengemasan yang menghasilkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman dan/atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
345	02.03.0017	Draf Renstra Bapanas 2025-2029;	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Prima	Banyaknya unit usaha budidaya yang memenuhi persyaratan aman, bermutu dan atau ramah lingkungan yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi atau Pusat.	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
346	02.03.0018	Draf Renstra Bapanas 2025-2029;	Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (Health Certificate)	Banyaknya Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan nomor izin dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi (bagi PSAT yang akan diekspor ke negara tujuan tertentu yang mengharuskan adanya izin keamanan PSAT dari pemerintah Indonesia).	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
347	02.03.0029	RPJMN 2025-2029;	Jumlah total pangan yang terselamatkan	Jumlah total donasi pangan yang diterima dari donatur kepada bank pangan/penggiat selamatkan pangan sebelum proses seleksi dan pengendalian mutu.	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
348	02.03.041	RPJMN 2025-2029;	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	Persentase dari tonase bantuan beras terfortifikasi terhadap tonase bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang diberikan dalam bentuk beras	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

349	02.03.043	RPJMN 2025-2029;	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persentase jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), 3 (agak rentan), 4 (agak tahan), 5 (tahan), 6 (sangat tahan) dalam periode waktu tertentu, pada FSVA	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
350	02.03.0036	RPJPN 2025-2045;	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Bagian dari pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan yang diperoleh melalui pengujian cemaran mikro biologi dan kimia	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
351	02.03.050	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pangan yang Terselamatkan	Persentase pangan yang diselamatkan di tingkat perniagaan yang dilakukan bersama bank pangan/penggiat selamatkan pangan	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
352	10.03.0039	SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025;	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)	Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan Pangan.	GEOSPASIAL	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
353	02.03.0048	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH ketersediaan merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, Ketersediaan Pangan, Ekonomi, budaya dan agama	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
354	02.03.0049	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor yang menunjukan kualitas keragaman konsumsi pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, aneka bumbu dan bahan minuman) untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Semakin baik kualitas konsumsi pangan masyarakat maka skor PPH semakin mendekati ideal (100).	STATISTIK	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

355	09.04.002	RPJMN 2025-2029;	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktisi Kehumasan pemerintah. Selain itu, keberadaan Indeks ini dapat dijadikan sebagai bagian dari early warning ststem, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi Dinas Kominfo atau K/L yang memiliki anggaran PIKP yang sama besarnya, tetapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda, dan sebagai acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Kominfo terkait pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Interpretasi.	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
356	09.03.007	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
357	09.06.010	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

358	09.03.016	SDGs;	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
359	09.03.023	SDGs;	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi	Konsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

360	09.04.005	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers	Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kalasitas SDM dalam bisang jurnalistik dan pers, serta untuk menjaga pengetahuan keilmuan jurnalistik dan pers pada para jurnalis, sehingga tidak hanya mendapat pelatihan ketika akan mengikuti uji kompetensi wartawan saja.	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
361	09.03.029	RPJMN 2025-2029;	Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku	Pengukuran indikator Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku mencakup aspek kualitas siaran sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan lembaga penyiaran untuk memperbaiki mutu dan kualitas siaran televisi. Populasi dari penelitian ini adalah semua program siaran dari 8 kategori program yang ditayangkan di 15 stasiun televisi berjaringan pada rentang waktu 24 jam selama waktu penghitungan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
362	09.03.075	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Rasio persentase antara cakupan sinyal jaringan mobile broadband (minimal 4G) yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang teridentifikasi ada populasi penduduknya.	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
363	02.09.0001	RPJMN 2025-2029;	Data Koperasi aktif di Indonesia menurut Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi aktif di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten Kota	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
364	02.09.0003	RPJMN 2025-2029;	Data Koperasi Merah Putih aktif di Indonesia menurut Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi merah putih di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten Kota	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
365	02.09.0005	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Total nilai seluruh usaha koperasi dari semua sektor (konsumsi, jasa, simpan pinjam, dan produksi), mencakup nilai penjualan, penerimaan jasa, serta pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam satu tahun buku.	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
366	02.09.0006	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Nilai kegiatan usaha koperasi produksi yang mencakup total pendapatan dari penjualan barang/jasa produksi, penyaluran hasil produksi, atau layanan usaha produksi lainnya dalam satu tahun buku.	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

367	02.10.003	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan pada peraturan PP No. 7 tahun 2021	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
368	02.10.0005	RPJMN 2025-2029;	Proporsi Kedit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit Perbankan	Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan mengukur sejauh mana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dari perbankan dalam suatu wilayah atau negara	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
369	02.09.003	RPJMN 2025-2029;	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi	Perbandingan volume usaha koperasi yang bergerak di sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi secara keseluruhan yang dinyatakan dalam presentase. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
370	02.09.004	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDB Nasional. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
371	02.09.0007	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Volume Usaha Koperasi	Total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi dalam satu periode atau tahun buku tertentu	STATISTIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

372	07.05.0001	SDGs;	Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi	Jumlah limbah B3 yang ditangani menggunakan metode pengolahan tertentu, seperti termal, stabilisasi dan solidifikasi, atau metode lain sesuai perkembangan teknologi	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
373	07.05.001	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
374	07.05.0004	RPJMN 2025-2029;	Capaian Pengelolaan Sampah	Hasil yang dicapai dalam pengelolaan sampah, seperti volume sampah yang berhasil dikurangi, didaur ulang, atau ditangani dengan baik	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
375	07.05.0008	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) baseline tahun t (EBt)	Proyeksi nilai emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
376	07.05.0009	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalan	Proyeksi emisi GRK yang diperkirakan akan terjadi pada tahun t tanpa adanya intervensi atau upaya penurunan emisi	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
377	07.05.005	RPJMN 2025-2029;	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

378	07.05.006	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
379	07.05.009	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi muka air tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

380	07.05.010	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
381	07.05.0011	RPJMN 2025-2029;	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemda	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemda	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
382	07.05.012	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Indeks Kualitas Udara	Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM2,5	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
383	07.05.0012	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Komponen Pengurangan Ancaman	Indeks Pengurangan ancaman kehilangan kehati adalah salah satu dari dua komponen penyusun Indeks Pengelolaan Kehati. Indeks ini merupakan penilaian dari upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
384	07.05.014	SDGs;	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri	Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual gas rumah kaca dari sektor industri pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi (dalam hal ini produk domestik bruto) pada tahun yang sama	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

385	07.05.0014	RPJMN 2025-2029;	Izin AMDAL yang diterbitkan	Izin AMDAL adalah izin lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sendiri merupakan kajian mengenai dampak-dampak tersebut, yang bertujuan untuk mengambil keputusan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha atau proyek Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH: Mengawasi dan memberikan izin terkait dampak lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
386	07.05.021	SDGs;	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon).	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
387	07.05.027	RPJMN 2025-2029;	Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

388	07.05.029	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air	Jumlah kabupaten atau kota yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air. IRLH sektor air menilai respons dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas air melalui implementasi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan terkait. Program Kali Bersih merupakan program pengendalian pencemaran air yang dilakukan melalui beberapa kegiatan utama seperti penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran air, pemantauan mutu air, penurunan beban pencemar dari kegiatan dan/atau usaha, pengawasan sumber pencemar, publikasi data dan informasi mutu air, serta inovasi dalam pengendalian pencemaran air. Terdapat program sejenis untuk setiap aspek penyusun indeks IKLH, yakni air, udara, tanah, dan air laut. Berdasarkan hasil penginputan masing-masing kriteria pada setiap program, apabila seluruh data dukung dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sub-kriteria yang dimaksud, maka data dapat diverifikasi untuk selanjutnya dilakukan perhitungan nilai IRLH di setiap media. Perhitungan IRLH dilakukan terhadap program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mencakup (1) peraturan perundang-undangan; (2) struktur dan pengembangan kompetensi; (3) perencanaan kegiatan; (4) implementasi; (5) pelibatan pemangku kepentingan; (5) publikasi; dan (6) inovasi.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
389	07.05.0025	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah	Keberadaan dan implementasi kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sampah, seperti rencana strategis daerah (Jakstrada) dan kebijakan pengurangan sampah plastik	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
390	07.05.0026	SDGs;	Jumlah Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
391	07.03.0004	RPJMN 2025-2029;	Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan Kelompok Masyarakat Sektor kehutanan (KTH dan KUPS)	Nilai Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (NEKON KUPS) merupakan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah perhutanan sosial,seperti penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan dan hasil hutan lainnya	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

392	07.03.006	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)	Total volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mencakup komoditas seperti buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong yang diperoleh dari kawasan hutan dalam periode tertentu. HHBK didefinisikan sebagai semua hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani termasuk produk budidaya kecuali kayu yang asalnya dari hutan.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
393	07.05.0036	RPJMN 2025-2029;	Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampah	Upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, termasuk program 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
394	07.05.043	RPJMN 2025-2029;	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan, khususnya di bidang pengelolaan keamanan hayati (biosafety & biosecurity). Dengan kata lain, ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan (policy brief/usulan regulasi) yang disusun – biasanya berbasis hasil kajian atau penelitian – untuk memperkuat sistem keamanan hayati dan biosekuriti nasional	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
395	07.05.0040	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Sampah Total (JSJS)	Jumlah total sampah yang dihasilkan dari semua jenis kegiatan, baik yang berasal dari sektor pangan maupun sektor non-pangan. Ini mencakup sampah organik (seperti sisa makanan) dan non-organik (seperti plastik, kertas, dll).	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
396	07.05.0044	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah	Ketersediaan dan kondisi fasilitas pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan alat transportasi sampah	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

397	07.05.044	SDGs;	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
398	07.05.0045	SDGs;	Jumlah satuan Pendidikan formal peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
399	07.05.0046	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengelolaan sampah	Ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan dan sertifikasi petugas	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
400	07.05.045	RPJMN 2025-2029;	Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu	Indikator ini merujuk pada jumlah sungai dan danau yang mengalami perbaikan kualitas air, ditunjukkan dengan peningkatan status mutu berdasarkan parameter kualitas air tertentu. Peningkatan status mutu berarti perubahan dari kondisi tercemar berat menjadi tercemar sedang, atau dari tercemar sedang menjadi tercemar ringan, dan seterusnya	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
401	07.05.0047	SDGs;	Jumlah timbulan limbah B3	Total limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas industri dan domestik dalam periode tertentu	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

402	07.05.052	RPJMN 2025-2029;	Ketersediaan status mutu DAS dan danau	Indikator ini mengukur ketersediaan data dan informasi terkait status mutu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau, termasuk kualitas air, kesehatan ekosistem akuatik, dan parameter terkait lainnya. Informasi ini penting untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan terkait konservasi dan pemanfaatan DAS dan danau.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
403	07.03.0007	SDGs;	Luas Rekalkulasi Penutupan Lahan di Indonesia	Luas lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan, baik di dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun di luar kawasan tersebut	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
404	07.03.017	RPJMN 2025-2029;	Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan	Mengetahui tersedianya kuantitas air berdasarkan dengan bertambahnya luas tutupan hutan di wilayah DAS.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
405	07.03.022	RPJMN 2025-2029;	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Masyarakat Hutan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan perhutanan sosial dan kelompok tani hutan, termasuk penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan serta hasil hutan lainnya. NTE digunakan sebagai tolak ukur kinerja penyuluh kehutanan dalam mendampingi kelompok tani hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha perhutanan sosial yang berkelanjutan	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
406	07.05.0052	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Penurunan Emisi GRK pada Tahun berjalan	Selisih antara emisi GRK pada tahun dasar (baseline) dengan emisi GRK aktual pada tahun t	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
407	07.03.028	SDGs;	Persentase Kawasan Hutan	Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.Tutupan hutan adalah kawasan hutan dan non kawasan hutan yang tertutup vegetasi tidak termasuk perairan umum, seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah. Data tutupan hutan merupakan data geospasial yang menggambarkan kondisi penutup lahan pada skala 1:250.000 hasil penafsiran citra penginderaan jauh.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

408	07.05.067	SDGs;	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
409	07.05.0054	RPJMN 2025-2029;	Persentase Penanganan Sampah	Proporsi sampah yang ditangani melalui proses pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
410	07.05.0055	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pengurangan Sampah	Proporsi sampah yang berhasil dikurangi melalui kegiatan seperti pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
411	07.05.080	RPJMN 2025-2029;	Persentase Sampah yang Terkelola	sampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui pengurangan sampah (Upaya untuk mencegah atau mengurangi timbulan sampah, baik dari sumber rumah tangga, komersial, maupun industri) maupun penanganan sampah (pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah). dalam hal ini Sampah di TPA open dumping tidak dihitung sebagai sampah terkelola	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
412	07.05.0168	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Proporsi Limbah B3 yang Terkelola	Mengukur persentase limbah B3 yang telah melalui proses pengolahan atau pengelolaan yang sesuai, dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
413	07.05.0169	RPJMN 2025-2029;	Prosentae Implementasi pengelolaan sampah	Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan perencanaan, termasuk pengurangan dan penanganan sampah	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

414	07.05.096	SDGs;	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Dokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
415	07.05.0174	SDGs;	Tingkat Emisi CO_2 / Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah gas rumah kaca (termasuk CO_2, CH_4, N_2O, dll) yang dilepaskan ke atmosfer dalam satu periode waktu tertentu dari sektor industri, khususnya sektor IPPU (Industrial Processes and Product Use).	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
416	07.05.0175	SDGs;	Tingkat Emisi Sektor Industri (TE SI CO_2)	Jumlah total emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO_2), yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahun	STATISTIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
417	03.01.0001	SDGs;	Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik (JABPD)	Volume total air yang diambil dari sumber air permukaan (seperti sungai, danau, dan waduk) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, termasuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
418	03.01.0002	SDGs;	Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia (JABP)	Total volume air yang tersedia di sumber air permukaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk domestik, pertanian, industri, dan lainnya	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

419	03.01.012	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja di Pesisir Utara Jawa	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
420	03.01.017	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
421	03.01.021	RPJMN 2025-2029;	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Area daerah irigasi yang telah diupayakan pengembalian kapasitasnya dan peningkatan termasuk upaya modernisasi	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
422	03.01.0009	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	Rumah tangga yang fasilitas sanitasinya terhubung langsung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
423	03.01.039	RPJMN 2025-2029;	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun	Jumlah SR yang dapat dilayani oleh seluruh IPAL Skala Perkotaan, Permukiman, dan Kawasan Tertentu secara nasional. Dapat diestimasikan dari kapasitas volumen pengolahan yang dikonversi menggunakan rata-rata timbulan air limbah domestik per rumah tangga	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
424	03.01.040	RPJMN 2025-2029;	Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	Tambahan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
425	03.01.043	RPJMN 2025-2029;	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun	Kapasitas SPAM yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dari SPAM Regional, SPAM Kabupaten, SPAM Kota dan SPAM berbasis Masyarakat serta SPAM bukan jaringan perpipaan	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
426	03.01.044	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Kapasitas Tampungan Air	Volume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

427	03.01.048	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Kondisi Mantap Jalan	Kondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
428	03.01.063	RPJMN 2025-2029;	Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM	Non Revenue Water (NRW) merupakan angka kebocoran air yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan administrasi dan sistem billing pelanggan dan/atau karena rusaknya jaringan perpipaan secara teknis sehingga perlu dilakukan penurunan NRW pada PDAM karena dapat memengaruhi kinerja dan layanan PDAM/BUMD Air Minum tersebut	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
429	03.01.068	RPJMN 2025-2029;	Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Rumah Tangga yang menggunakan Air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh BUMN, BUMD Air Minum, PAM, PDAM, UPT/UPTD, BUMDES, Kelompok Masyarakat/KPSPAM, atau BUKS. Kriteria ini biasanya mencakup: 1. Sumber Air: Air yang disuplai melalui sistem perpipaan harus berasal dari sumber yang terkelola dengan baik dan memenuhi standar kualitas air minum. 2. Jaringan Perpipaan: Rumah tangga harus terhubung secara langsung dengan sistem jaringan perpipaan, yang mencakup pipa distribusi air dari penyedia layanan air. 3. Ketersediaan: Air harus tersedia secara konsisten dari sistem perpipaan dan dapat diakses oleh rumah tangga dengan cara yang wajar. 4. Aksesibilitas: Rumah tangga harus memiliki sambungan perpipaan yang memadai dan dapat mengakses air dengan mudah tanpa kendala yang signifikan.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

430	03.01.0031	Kepka BIG 130/2025;	Peta Jalan Nasional Tol, Jalan Nasional Non-tol, Peta Jalan Provinsi dan Peta Jalan Kabupaten/Kota	- Peta jaringan jalan darah merupakan penggambaran jaringan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan daerah.- Peta Jalan Nasional Tol merupakan Informasi Geospasial yang menggambarkan satu tema sebaran jalan nasional tol yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR	GEOSPASIAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
431	10.03.0043	Kepka BIG 115/2025; Kepka BIG 130/2025;	Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Minimal pada Skala 1:50.000	Informasi kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	GEOSPASIAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
432	10.03.0057	Permenko Ekon 3/2024; SK KaBIG 16/2023;	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi skala 1:250.000	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.	GEOSPASIAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
433	03.01.076	SDGs;	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air baku untuk keperluan domestik terhadap ketersediaannya dari air permukaan adalah rasio besarnya pengambilan air baku dari permukaan, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air baku untuk berbagai keperluan lainnya. Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya dihitung dengan menghitung perbandingan antara kualitas air baku yang dimanfaatkan dibandingkan dengan ketersediaannya yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
434	03.01.0047	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Total Panjang Jalan Nasional	Jumlah keseluruhan panjang ruas jalan nasional yang terdaftar.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
435	03.01.0049	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan	Jumlah total air yang dapat disimpan dalam waduk, embung, atau fasilitas penampungan air lainnya yang tersedia untuk keperluan domestik, pertanian, industri, atau konservasi.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

436	03.01.013	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.	STATISTIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
437	03.07.0005	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
438	03.05.003	SDGs;	Jumlah daerah tertinggal	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1.Perekonomian masyarakat 2.Sumber daya manusia 3.Sarana dan prasarana 4.Kemampuan keuangan daerah 5.Aksesibilitas 6.Karakteristik daerah.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
439	03.07.0006	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Jumlah Data Registrasi Kematian	Jumlah Catatan resmi mengenai kejadian kematian yang mencakup informasi seperti usia, penyebab, dan lokasi kematian.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
440	03.05.0004	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Jumlah desa dengan status Mandiri	Jumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
441	03.05.010	RPJMN 2025-2029;	Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi: kerjasama peningkatan daya saing perekonomian desa, kerjasama layanan dasar sanitasi desa, kerjasama di wilayah perbatasan negara, dan kerjasama bidang lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan desa	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
442	09.02.0012	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Total Anak Usia 0-4 Tahun	Total jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

443	09.01.019	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah indikator yang menggambarkan proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah terpenuhi haknya untuk memiliki akta kelahiran sesuai pencatatan dalam database Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
444	03.05.019	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Mandiri	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
445	09.01.029	RPJMN 2025-2029;	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Proporsi Penduduk yang mengaktifkan dan menggunakan KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD)	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
446	03.07.001	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
447	03.07.002	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun).	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

448	05.02.002	SDGs;	Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk	Konsep dan Definisi:Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.Selanjutnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 ini. Undang-Undang juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Kementerian	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
449	03.07.003	RPJMN 2025-2029;	Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi	Prevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

450	04.03.001	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
451	04.03.002	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Gender	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
452	03.07.009	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
453	04.03.004	RPJMN 2025-2029;	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian perlindungan khusus anak sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

454	04.03.0001	RPJMN 2025-2029;	IPM Laki-laki	merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
455	04.03.0002	RPJMN 2025-2029;	IPM Perempuan	merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
456	04.03.0003	RPJMN 2025-2029;	Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas	Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani oleh Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
457	04.03.0004	RPJMN 2025-2029;	Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA	Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan telah mendapatkan layanan komprehensif pada tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

458	04.03.0005	SDGs;	Jumlah anak laki-laki umur 13–17 tahun yang mengalami kekerasan (JALK)	Anak laki-laki usia 13–17 tahun yang dalam sepanjang hidupnya pernah mengalami paling tidak satu bentuk kekerasan (seksual, fisik, atau emosional), baik secara terpisah maupun bersamaan.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
459	04.03.0008	SDGs;	Jumlah anak perempuan umur 13–17 tahun yang mengalami kekerasan (JAPK)	Anak perempuan usia 13–17 tahun yang dalam sepanjang hidupnya pernah mengalami paling tidak satu bentuk kekerasan (seksual, fisik, atau emosional), baik secara terpisah maupun bersamaan.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
460	04.03.0018	SDGs;	Jumlah Korban Perdagangan Orang (JKPM)	Jumlah korban TPPO dalam 12 bulan terakhir, yang melaporkan ke Simfoni PPA	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
461	04.03.0022	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama	Jumlah total perempuan yang berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun pada titik tengah periode waktu yang ditentukan	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
462	04.03.011	SDGs;	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh UN. Sumber data dari peraturan dan rencana aksi dari kebijakan yang ada. Survei standard ini berisi pertanyaan terkait 4 bidang yaitu:1.Kebijakan yang menyangkut kehidupan pada umumnya2.Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan3.Lapangan kerja dan ekonomi4.Perkawinan dan keluarga.Pada masing-masing bidang terdiri dari (i) kebijakan yang mendorong atau memajukan kesetaraan gender; dan (ii) penegakan hukum dan pemantauan hasil pelaksanaannya. Nilai dari masing-masing bidang menjadi ukuran pada indikator ini.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

463	04.03.016	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan SImfoni PPA yang dibandingkan anak usia 0-17 tahun korban kekerasan. Layanan Komprehensif pada layanan SAPA Anak adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat melalui assesmen oleh tenaga profesional, dimana layanan yang diperoleh lebih dari 2 layanan dan sudah diterminasi di pusat dan korban yang mendapatkan layanan merupakan kewenangan pusat/korban yang ditangani oleh pusat. Sehingga, persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kewenangan pusat. Sementara, berdasarkan data SIMFONI PPA, korban yang mendapatkan layanan komprehesif adalah korban kekerasan yang mendapatkan layanan >=2 layanan. Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kekerasan.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
464	04.03.019	RPJMN 2025-2029;	Persentase Anggaran Responsif Gender	Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
465	03.07.019	RPJMN 2025-2029;	Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) adalah persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
466	03.07.021	RPJMN 2025-2029;	Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	Persentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjalan.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

467	04.03.023	SDGs;	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
468	04.03.028	RPJMN 2025-2029;	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhannya.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

469	04.03.037	SDGs;	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut. Tumpang tindih dengan jenis kekeraan yang lainnya terjadi:a.Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik.b.Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014). Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:1.Kekerasan seksual diukur dengan:a.Perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;b.Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
470	04.01.0166	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Prosentase Kesehatan Reproduksi	Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF): Mengukur persentase perempuan yang melahirkan tanpa bantuan fasilitas kesehatan. Proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20): Mengukur persentase perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
471	03.07.0033	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Prosentase Pemberdayaan Penduduk	Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA/sederajat: Mengukur tingkat pendidikan penduduk dewasa. Persentase perempuan yang menduduki kursi legislatif: Mengukur keterwakilan perempuan dalam legislatif.	STATISTIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
472	02.08.006	RPJMN 2025-2029;	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Nilai investasi baik PMA dan PMDN yang mencakup nilai realisasi investasi Perusahaan Kawasan Industri (170) dan Tenant	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
473	02.08.0005	RPJMN 2025-2029;	Nilai Investasi PMA sektor pariwisata	Nilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
474	02.08.0006	RPJMN 2025-2029;	Nilai Investasi PMDN sektor pariwisata	Nilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMDN	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

475	02.08.009	RPJMN 2025-2029;	Nilai investasi sektor pariwisata	Nilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA dan PMDN	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
476	02.08.012	RPJMN 2025-2029;	Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus	Nilai PMA dan PMDN adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai PMA dan PMDN di KEK mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh pengelola KEK dan tenant yang ada di dalam KEK	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
477	02.08.0007	RPJMN 2025-2029;	Nilai PMA Kawasan Ekonomi Khusus	Nilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenant) yang berada di dalam KEK	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
478	02.08.0008	RPJMN 2025-2029;	Nilai PMDN Kawasan Ekonomi Khusus	Nilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KEK	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
479	02.08.019	RPJMN 2025-2029;	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam	Nilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Garam.	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
480	02.08.022	RPJMN 2025-2029;	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja	Nilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Besi dan Baja.	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
481	02.08.023	RPJMN 2025-2029;	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa	Nilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa.	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
482	02.08.026	RPJMN 2025-2029;	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel	Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Nikel.	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
483	02.08.028	RPJMN 2025-2029;	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut	Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Rumput Laut.	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
484	02.08.0013	RPJMN 2025-2029;	Total Realisasi Investasi PMA Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Nilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KI	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

485	02.08.0014	RPJMN 2025-2029;	Total Realisasi Investasi PMDN Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Nilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KI	STATISTIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
486	06.01.001	SDGs;	Angka Anak Tidak Sekolah	Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah yaitu 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
487	06.01.0048	SDGs;	Jumlah guru per jenjang pendidikan	Jumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
488	06.01.0049	SDGs;	Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
489	06.01.0050	SDGs;	Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
490	08.01.0010	RPJMN 2025-2029;	Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sapras	Jumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi kriteria SNP Sarpras, termasuk fasilitas untuk pendidikan inklusif	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
491	06.01.0108	RPJMN 2025-2029;	Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras	Jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan terkait sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

492	06.01.0109	RPJMN 2025-2029;	Jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi	Jumlah satuan pendidikan di suatu provinsi yang memiliki paling sedikit 70% peserta didik dengan level hasil belajar minimal "cakap" dalam literasi membaca atau numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
493	06.01.0115	SDGs;	Jumlah Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki akses internet yang digunakan secara aktif untuk kegiatan pembelajaran	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
494	06.01.0116	SDGs;	Jumlah Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran	Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki fasilitas komputer yang digunakan untuk tujuan pembelajaran	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
495	06.01.0117	SDGs;	Jumlah Sekolah dengan Akses Listrik	Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki akses ke fasilitas listrik	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
496	06.01.0118	SDGs;	Jumlah Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak	Jumlah sekolah yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi kriteria kelayakan. Air minum layak mencakup sumber-sumber seperti air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH), mata air terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran atau penampungan limbah	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
497	06.01.0119	SDGs;	Jumlah Sekolah dengan Fasilitas Cuci Tangan	Jumlah satuan pendidikan pada tingkat tertentu (misalnya SD, SMP, SMA) yang memiliki fasilitas cuci tangan yang memenuhi standar WASH, yaitu tersedia air mengalir, sabun, dan kondisi higienis	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
498	04.01.0122	RPJMN 2025-2029;	Jumlah siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sekolah sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

499	04.01.0123	RPJMN 2025-2029;	Jumlah siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
500	04.01.0124	RPJMN 2025-2029;	Jumlah siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	Jumlah siswa pada jenjang SMA, MA, SMK, atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
501	04.01.0125	RPJMN 2025-2029;	Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
502	06.01.0123	RPJMN 2025-2029;	Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB)	Total jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
503	06.01.026	SDGs;	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional	Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2.Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

504	06.01.035	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	Persentase anak-anak dan remaja pada: (a) kelas 5 SD, (b) kelas 8 SMP, (c) kelas 11 SMA yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika. Standar kemampuan minimum diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) literasi dan numerasi terhadap murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Pengukuran kompetensi minimal literasi dan numerasi didasarkan pada tingkat keterampilan pada murid di kelas dan tingkatan pendidikan yang ditentukan dalam hal (a) berpikir logis-sistematis; (b) bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari; (c) memilah dan mengolah informasi melalui Asesmen Nasional (AN). Kompetensi minimum adalah batas bawah nilai/skor hasil tes literasi dan numerasi yang ditetapkan dalam AN yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil AN dilaporkan dalam empat klasifikasi yang menggambarkan tingkat kompetensi berbeda, dengan penjelasan pada Tabel 1.1 untuk klasifikasi kompetensi literasi dan Tabel 1.2 untuk klasifikasi kompetensi numerasi berikut.Tabel 1.1. Klasifikasi Tingkat Kompetensi Literasi MembacaKlasifikasi: Perlu Intervensi KhususDeskripsi: Siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat nterpretasi sederhana.Klasifikasi: DasarDeskripsi: Siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.Klasifikasi:	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
505	06.01.039	RPJMN 2025-2029;	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

506	06.01.049	RPJMN 2025-2029;	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
507	06.01.050	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
508	06.01.051	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
509	06.01.052	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

510	06.01.053	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
511	06.01.054	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
512	10.04.023	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
513	10.04.024	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
514	10.04.025	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
515	10.04.026	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

516	10.04.027	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
517	06.01.0135	SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025;	Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Skala 1:50.000	Peta sebaran lokasi satuan pendidikan pada SD, SMP, SMA, dan SMK skala 1:50.000	GEOSPASIAL	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
518	06.01.066	SDGs;	Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
519	06.01.0136	RPJMN 2025-2029;	Rasio Kecukupan Guru	Guru PNS tersedia / kebutuhan guru	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
520	06.01.085	RPJMN 2025-2029;	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi	Nilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat	STATISTIK	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
521	03.03.010	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang,bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Permenhub No. PM39 Tahun 2019).	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
522	03.03.0005	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Bandar Udara yang Dibangun	Jumlah bandara yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan dalam periode tertentu	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
523	03.03.0006	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Bandar Udara yang Dioperasikan	Jumlah bandara yang aktif beroperasi dan melayani penerbangan komersial maupun non-komersial dalam periode tertentu	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

524	03.03.020	SDGs;	Jumlah Barang yang Diangkut Moda Transportasi Umum	Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
525	03.03.032	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Panjang Jalur Kereta Api	Jumlah panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
526	03.03.0019	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Panjang Jalur Kereta Api Beroperasi	Jumlah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
527	03.03.0020	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Panjang Jalur Kereta Api yang Dibangun	Total panjang jalur rel kereta api yang telah dibangun.	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
528	03.03.014	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
529	03.03.0024	SDGs;	Jumlah Penumpang Transportasi Umum	Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.	STATISTIK	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
530	02.01.0007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kapasitas Potensial Produksi Produk Olahan Rumput Laut	Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan rumput laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

531	02.01.0008	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Industri Pengolahan Hasil Laut	Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan hasil laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
532	02.01.0009	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Kelapa dan Turunannya	Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan kelapa jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
533	02.01.0011	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Output Aktual Produksi Industri Pengolahan Hasil Laut	Jumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil laut dalam periode tertentu.	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
534	02.01.0014	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Output Aktual Produksi Produk Olahan Rumput Laut	Jumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan rumput laut dalam periode tertentu.	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
535	02.01.0016	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Garam dari Perusahaan Garam	Jumlah garam industri yang dihasilkan oleh perusahaan garam industri, baik milik pemerintah maupun swasta, yang mengelola produksi garam dalam skala industri	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
536	02.01.061	RPJMN 2025-2029;	Utilisasi Industri Logam Dasar	Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri Logam Dasar (KBLI 24) terhadap kapasitas produksinya	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
537	02.01.063	RPJMN 2025-2029;	Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut	Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) terhadap kapasitas produksinya	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
538	02.01.064	RPJMN 2025-2029;	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa	Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan kelapa (KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905) terhadap kapasitas produksinya	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
539	02.01.065	RPJMN 2025-2029;	Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut	Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan rumput laut (KBLI: 10298) terhadap kapasitas produksinya	STATISTIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
540	02.03.0002	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bantuan Hand Sprayer	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen hand sprayer	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
541	02.03.0003	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bantuan Pompa Air	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen pompa air	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
542	02.03.0004	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bantuan Rice Transplanter	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen rice transplanter	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

543	02.03.0005	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bantuan Traktor Roda 2	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 2	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
544	02.03.0006	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bantuan Traktor Roda 4	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 4	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
545	02.03.0007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Bantuan Traktor Roda Crawler	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda crawler	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
546	02.03.0019	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi	Jumlah Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
547	02.03.0020	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi	Jumlah Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
548	02.03.0021	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penyaluran Pupuk SP36 Bersubsidi	Jumlah Penyaluran Pupuk SP36 Bersubsidi	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
549	02.03.0022	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi	Jumlah Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
550	02.03.0023	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Penyaluran Pupuk ZA Bersubsidi	Jumlah Penyaluran Pupuk ZA Bersubsidi	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
551	02.03.0025	Perpres 66/2021; UU 18/2012; PP 17/2015;	Jumlah Produksi Bawang Putih	Jumlah hasil tanaman bawang putih yang diambil hasilnya dalam setahun	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
552	02.03.014	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Buah dan Sayur	Jumlah hasil tanaman buah dan sayur yang diambil hasilnya dalam setahun	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
553	02.04.001	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Cengkeh	Banyaknya hasil dari setiap tanaman cengkeh menurut wujud produksi (hasil) yaitu bunga kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
554	02.05.002	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Daging	Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
555	02.04.002	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Kakao	Banyaknya hasil dari setiap tanaman kakao menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kakao kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
556	02.04.003	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Karet	Banyaknya hasil dari setiap tanaman Karet menurut wujud produksi (hasil) yaitu karet kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

557	02.03.018	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Kedelai	Banyaknya hasil tanaman kedelai menurut wujud biji kering yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
558	02.04.004	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Kelapa	Banyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa menurut wujud produksi (hasil) yaitu kopra yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
559	02.04.006	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Kopi	Banyaknya hasil dari setiap tanaman kopi menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kopi kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
560	02.04.007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Lada	Banyaknya hasil dari setiap tanaman lada menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji lada kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
561	02.04.008	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Pala	Banyaknya hasil dari setiap tanaman pala menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji pala kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
562	02.05.003	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Susu	Banyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk yang diberikan kepada anak ternak, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
563	02.05.004	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Telur Unggas	Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
564	02.03.024	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Produksi Ubi Kayu	Banyaknya hasil tanaman ubi kayu menurut wujud umbi basah yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
565	02.03.0032	RPJMN 2025-2029;	Luas Layanan Irigasi di Wilayah	Luas tambahan area pertanian (baik padi maupun non-padi) yang mendapatkan layanan irigasi setelah pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah tersebut	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
566	06.03.0017	RPJMN 2025-2029;	Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut Provinsi	Sebaran berat produksi buah-buahan menurut jenis tanaman per Provinsi	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
567	02.04.016	RPJMN 2025-2029;	Produktivitas Kelapa	Produktivitas kelapa dihitung berdasarkan jumlah produksi per luas tanaman menghasilkan	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

568	02.03.067	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak dan penghasil produk pangan bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. (UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Presiden untuk tingkat nasional (lintas provinsi), Gubernur untuk tingkat provinsi (lintas kabulapen/ kota), dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/ kota, sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian	STATISTIK	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
569	03.04.007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun	Kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.	STATISTIK	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
570	03.04.010	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya	Kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, antara lain peningkatan kualitas rumah secara swadaya.	STATISTIK	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
571	06.02.005	SDGs;	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi	Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupas. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupasi adalah jumlah total upaya dan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memfasilitasi penempatan PMI yang dikategorikan berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi (okupasi) tertentu. Ini mencakup semua aspek dari proses penempatan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan dan pengawasan di negara tujuan.	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

572	06.02.007	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil merupakan jumlah kerja sama yang dihasilkan setiap tahunnya yang terdiri dari Jumlah Kesepakatan Mutual Recognition Agreement (MRA) dan Jumlah Kesepakatan kerja sama yang lebih komprehensif dengan negara penempatan untuk kemudahan administrasi migrasi dan perlindungan PMI Indikator ini diharapkan dapat mendorong ekspansi ekonomi dan peluang penempatan tenaga kerja dalam merebut pasar kerja di luar negeri	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
573	06.02.0019	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit per Tahun Anggaran	Jumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKB)	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
574	06.02.0020	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per Tahun Anggaran	Jumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK) per tahun anggaran	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
575	06.02.0021	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Struktur Skala Upah per Tahun Anggaran	Jumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SSU)	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
576	06.02.0022	SDGs;	Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Non-Pemerintah	Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari KP2MI melalui Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

577	06.02.0023	SDGs;	Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah	Pekerja migran yang ditempatkan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan yang berbadan hukum.	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
578	06.02.0024	SDGs;	Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Mandiri	Pekerja migran Indonesia perseorangan yang bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
579	06.02.0025	SDGs;	Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)	Pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri.	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
580	06.02.038	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase Peserta Program JKK dan JKM	Perbandingan jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) dengan total peserta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.	STATISTIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3/163 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DAFTAR DATA DAERAH JAWA
TENGAH JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 - 2029

B. Rencana Daftar DSSD E Walidata Tahun 2026 - 2029

* List data berdasarkan hasil unduh DSSD 2025 yang digunakan untuk tahap perencanaan, pemenuhan DSSD selanjutnya akan disesuaikan dengan sub kegiatan yang diambil

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Disabled (Hasil Desk Tahun 2024)	Disabled (Pengisian Mandiri Oleh Produsen Data Tahun 2026)	Produsen Data	Info Sub Kegiatan	TAG URUSAN
1	1.01.000038	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.05.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	1.01.000039	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah keseluruhan Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.05.1.01.0002] [1.01.05.3.03.0002] [1.01.05.4.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
3	1.01.000044	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	1.01.000045	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.05.1.01.0001] [1.01.05.3.03.0001] [1.01.05.4.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
5	1.01.000046	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.08.7.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	1.01.000076	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan khusus	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.03.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
7	1.01.000077	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	jumlah Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Menengah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.03.1.01.0007] [1.01.03.3.03.0001] [1.01.03.4.03.0001] [1.01.03.4.04.0001] [1.01.03.3.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	1.01.000085	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dokumen	Jumlah Modul Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.03.1.01.0006] [1.01.06.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
9	1.01.000088	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.03.1.01.0004] [1.01.03.3.03.0004] [1.01.03.4.03.0004] [1.01.03.3.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10	1.01.000091	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0050] [1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.03.0049] [1.01.02.4.05.0050] [1.01.02.4.05.0052] [1.01.02.4.07.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
11	1.01.000099	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang meningkat kompetensinya	Orang	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dengan alat ukur Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan satuan orang	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.08.7.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
13	1.01.000102	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.04.3.03.0001] [1.01.04.4.03.0001] [1.01.04.3.03.0001] [1.01.04.4.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.04.3.01.0003] [1.01.04.3.01.0004] [1.01.02.2.01.0023] [1.01.02.2.01.0024] [1.01.02.2.04.0013] [1.01.02.2.04.0022] [1.01.04.2.01.0002] [1.01.02.4.07.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
15	1.01.000104	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.04.1.01.0002] [1.01.04.3.02.0001] [1.01.04.3.02.0002] [1.01.04.3.02.0003] [1.01.04.3.02.0004] [1.01.04.3.02.0005] [1.01.04.3.02.0006] [1.01.04.4.02.0001] [1.01.04.4.02.0002] [1.01.04.4.02.0003] [1.01.04.4.02.0004] [1.01.04.4.02.0005] [1.01.04.4.02.0006] [1.01.02.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16	1.01.000118	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0050] [1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.03.0049]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
17	1.01.000121	Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0052]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18	1.01.000131	Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.08.7.05.0001] [1.01.02.4.05.0048] [1.01.02.4.06.0040] [1.01.02.4.06.0039]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
19	1.01.000134	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0045] [1.01.02.1.02.0037] [1.01.02.1.03.0044]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20	1.01.000135	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0037] [1.01.02.1.03.0044] [1.01.02.3.06.0037] [1.01.02.4.05.0045] [1.01.02.4.06.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
21	1.01.000160	Rasio Pendidik pada pendidikan khusus	%	Jumlah Rasio Pendidik pada pendidikan khusus	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.3.03.0061] [1.01.02.4.03.0061] [1.01.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22	1.01.000161	Rasio Pendidik pada pendidikan menengah	%	Jumlah Rasio Pendidik pada pendidikan menengah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
23	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0019] [1.01.02.1.02.0069] [1.01.02.2.01.0008] [1.01.02.2.01.0051] [1.01.02.2.02.0014] [1.01.02.2.04.0061] [1.01.02.3.05.0019] [1.01.02.3.06.0015] [1.01.02.4.06.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24	1.01.000214	Ruang keterampilan	Ruang	jumlah ruang keerampilan yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
25	1.01.000217	Ruang konseling	Ruang	jumlah ruang konseling yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

26	1.01.000219	Ruang laboratorium bahasa yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.3.05.0071] [1.01.06.1.01.0004] [1.01.06.1.01.0006] [1.01.06.2.01.0004] [1.01.06.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
27	1.01.000220	Ruang laboratorium bahasa yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.4.05.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

28	1.01.000221	Ruang laboratorium IPA yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium IPA yang layak	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
29	1.01.000222	Ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.4.05.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

30	1.01.000223	Ruang laboratorium komputer yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium komputer yang layak	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
31	1.01.000224	Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.2.04.0020] [1.01.02.4.05.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.1.01.0071] [1.01.02.1.03.0028] [1.01.02.1.02.0018] [1.01.02.2.02.0006] [1.01.02.2.01.0032] [1.01.02.2.04.0043] [1.01.02.3.06.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
33	1.01.000227	Ruang laboratorium bahasa	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.3.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

34	1.01.000228	Ruang laboratorium bahasa yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
35	1.01.000229	Ruang laboratorium bahasa yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

36	1.01.000230	Ruang laboratorium biologi	Ruang	jumlah ruang laboratorium biologi yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0070] [1.01.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
37	1.01.000231	Ruang laboratorium biologi yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium biologi yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0070]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

38	1.01.000232	Ruang laboratorium biologi yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang pwelu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0071]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
39	1.01.000233	Ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0070] [1.01.02.4.05.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

40	1.01.000234	Ruang laboratorium biologi yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0071]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
41	1.01.000235	Ruang laboratorium fisika	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.3.05.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

42	1.01.000236	Ruang laboratorium fisika yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
43	1.01.000237	Ruang laboratorium fisika yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

44	1.01.000239	Ruang laboratorium fisika yang layak	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang layak	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
45	1.01.000240	Ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.4.05.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

46	1.01.000242	Ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
47	1.01.000243	Ruang laboratorium IPA yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

48	1.01.000244	Ruang laboratorium kimia	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.3.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
49	1.01.000245	Ruang laboratorium kimia yang layak	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang layak	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

50	1.01.000246	Ruang laboratorium kimia yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
51	1.01.000247	Ruang laboratorium kimia yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.4.05.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

52	1.01.000248	Ruang laboratorium kimia yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
53	1.01.000249	Ruang laboratorium komputer	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.3.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

54	1.01.000250	Ruang laboratorium komputer yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0024] [1.01.02.2.01.0032] [1.01.02.2.02.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
55	1.01.000251	Ruang laboratorium komputer yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

56	1.01.000253	Ruang Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
57	1.01.000254	Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

58	1.01.000256	Ruang organisasi kesiswaan	Ruang	Jumlah ruang organisasi kesiswaan yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
59	1.01.000274	Ruang Praktik yang layak	Ruang	Jumlah ruang praktik yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0004] [1.01.02.3.06.0004] [1.01.02.4.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

60	1.01.000275	Ruang Praktik yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang praktik yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0004] [1.01.02.1.02.0063] [1.01.02.3.06.0017] [1.01.02.4.06.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
61	1.01.000276	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang pusat sumber anak berkebutuhan khusus yang perlu direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0079] [1.01.02.1.02.0076] [1.01.02.1.01.0080] [1.01.02.1.03.0084] [1.01.02.1.02.0077] [1.01.02.1.03.0029] [1.01.02.2.02.0065] [1.01.02.2.03.0044] [1.01.02.2.04.0053] [1.01.02.2.01.0052] [1.01.02.2.02.0066] [1.01.02.2.03.0043] [1.01.02.2.04.0054] [1.01.02.2.01.0053]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

62	1.01.000277	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang pusat sumber anak berkebutuhan khusus yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0079] [1.01.02.1.02.0076] [1.01.02.1.01.0080] [1.01.02.1.02.0077] [1.01.02.1.03.0084] [1.01.02.1.03.0029] [1.01.02.2.02.0065] [1.01.02.2.03.0044] [1.01.02.2.04.0053] [1.01.02.2.01.0052] [1.01.02.2.02.0066] [1.01.02.2.03.0043] [1.01.02.2.04.0054] [1.01.02.2.01.0053]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
63	1.01.000287	Ruang tata usaha	Ruang	Jumlah ruang tata usaha yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

64	1.01.000290	Ruang TU yang layak	Ruang	Jumlah ruang TU yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
65	1.01.000377	Satuan pendidikan yang belum memliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang belum memliki Sarana Mobilitas Sekolah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0040] [1.01.02.1.02.0032] [1.01.02.1.03.0039] [1.01.02.4.05.0040]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

66	1.01.000381	Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0040] [1.01.02.1.02.0032] [1.01.02.1.03.0039] [1.01.02.3.06.0032] [1.01.02.4.06.0032]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
67	1.01.000382	Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0041] [1.01.02.1.02.0033] [1.01.02.1.03.0040] [1.01.02.2.02.0067] [1.01.02.2.03.0046] [1.01.02.3.05.0046] [1.01.02.3.06.0033] [1.01.02.4.05.0041] [1.01.02.4.06.0033]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

68	1.01.000385	Satuan pendidikan yang memliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang memilki sarana mobilitas sekolah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0040] [1.01.02.1.02.0032] [1.01.02.1.03.0039]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
69	1.01.000397	Satuan pendidikan yang sudah memiliki Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang sudah memiliki alat praktik dan peraga peserta didik	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0041] [1.01.02.1.02.0033] [1.01.02.1.03.0040]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

70	1.01.000406	Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah atas yang mengelola dana bos	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0053] [1.01.02.4.05.0053]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
71	1.01.000407	Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah kejuruan yang mengelola dana bos	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0046] [1.01.02.3.06.0046] [1.01.02.4.06.0046] [1.01.02.4.06.0047]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

72	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0076] [1.01.02.1.02.0068] [1.01.02.1.02.0014] [1.01.02.1.02.0027] [1.01.02.1.03.0064] [1.01.02.1.01.0035] [1.01.02.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
73	1.01.000419	Silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus	Dokumen	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.03.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

74	1.01.000420	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.03.1.01.0002] [1.01.03.3.03.0002] [1.01.03.4.03.0002] [1.01.03.4.04.0002] [1.01.03.3.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
75	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

76	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
77	1.01.000437	Tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi	Unit	jumlah tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.07.7.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

78	1.01.000442	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0050] [1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.03.0049] [1.01.04.3.02.0002] [1.01.04.4.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
79	1.01.000454	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0050] [1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.01.0051] [1.01.04.3.02.0001] [1.01.04.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

80	1.01.000455	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0050] [1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.03.0049]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
81	1.01.000471	Unit pendidikan khusus	Unit	Jumlah Unit Pendidikan Khusus yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.1.03.0062] [1.01.02.4.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

82	1.01.000472	Unit pendidikan khusus yang layak	Kasus	jumlah unit pendidikan khusus yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
83	1.01.000473	Unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

84	1.01.000477	Unit SMK	Unit	jumlah unit SMK yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
85	1.01.000478	Unit SMK yang layak	Unit	jumlah unit smk yang layak	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

86	1.01.000479	Unit SMK yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah unit smk yang rusak sedang/berat	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
87	1.01.000482	Usulan pendirian sekolah pendidikan khusus baru	Dokumen	jumlah Usulan pendirian sekolah pendidikan khusus baru	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

88	1.01.000589	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
89	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

90	1.01.000690	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
91	1.01.000691	jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0054]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

92	1.01.000692	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0066]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
93	1.01.000693	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

94	1.01.000694	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0050]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
95	1.01.000695	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

96	1.01.000696	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
97	1.01.000697	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

98	1.01.000698	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin permpuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
99	1.01.000699	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

100	1.01.000700	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
101	1.01.000701	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

102	1.01.000702	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
103	1.01.000703	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 atau kelas 10	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

104	1.01.000704	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
105	1.01.000705	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

106	1.01.000706	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 atau kelas 11	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
107	1.01.000707	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

108	1.01.000708	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
109	1.01.000709	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 atau kelas 12	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

110	1.01.000710	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
111	1.01.000711	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

112	1.01.000712	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
113	1.01.000713	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

114	1.01.000714	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
115	1.01.000716	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

116	1.01.000717	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
117	1.01.000725	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

118	1.01.000726	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
119	1.01.000727	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

120	1.01.000728	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
121	1.01.000729	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

122	1.01.000730	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
123	1.01.000731	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

124	1.01.000732	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
125	1.01.000733	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

126	1.01.000734	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
127	1.01.000735	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

128	1.01.000736	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
129	1.01.000737	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

130	1.01.000738	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
131	1.01.000739	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

132	1.01.000740	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
133	1.01.000741	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

134	1.01.000742	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
135	1.01.000743	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

136	1.01.000744	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
137	1.01.000745	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

138	1.01.000746	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
139	1.01.000747	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

140	1.01.000748	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
141	1.01.000749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

142	1.01.000750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
143	1.01.000751	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.01.0050]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

144	1.01.000752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
145	1.01.000753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

146	1.01.000754	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.01.0050]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
147	1.01.000755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

148	1.01.000756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
149	1.01.000757	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

150	1.01.000758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah diatas SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
151	1.01.000759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah diatas SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

152	1.01.000760	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta yang berijazah diatas SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
153	1.01.000761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

154	1.01.000762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
155	1.01.000763	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

156	1.01.000764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
157	1.01.000765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

158	1.01.000766	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	Keseluruhan jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
159	1.01.000767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

160	1.01.000768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
161	1.01.000769	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

162	1.01.000770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
163	1.01.000771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

164	1.01.000772	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
165	1.01.000773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

166	1.01.000774	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
167	1.01.000775	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

168	1.01.000776	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
169	1.01.000777	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

170	1.01.000778	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
171	1.01.000779	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

172	1.01.000780	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
173	1.01.000781	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

174	1.01.000782	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah S1	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
175	1.01.000783	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah S1	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

176	1.01.000784	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG MEMILIKI IJAZAH STRATA SATU	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
177	1.01.000785	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

178	1.01.000786	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
179	1.01.000787	jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	JUMLAH TERSEDIA NYA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

180	1.01.000788	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
181	1.01.000790	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0045]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

182	1.01.000791	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
183	1.01.000792	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

184	1.01.000793	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	JUMLAH SISWA BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
185	1.01.000794	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

186	1.01.000795	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	JUMLAH SISWA BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
187	1.01.000796	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	keseluruhan jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

188	1.01.000797	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
189	1.01.000798	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	JUMLAH SISWA YANG BERADA PADA TINGKAT 10 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

190	1.01.000800	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
191	1.01.000801	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

192	1.01.000803	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
193	1.01.000804	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

194	1.01.000806	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 13 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
195	1.01.000807	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	JUMLAH SISWA YANG BERADA PADA TINGKAT 13 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

196	1.01.000809	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	JUMLAH PESERTA DIDIK ATAU SISWA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
197	1.01.000810	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Jumlah siswa seluruh tingkatan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

198	1.01.000812	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
199	1.01.000813	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

200	1.01.000814	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
201	1.01.000821	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri	Orang	JUMLAH SISWA YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

202	1.01.000822	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
203	1.01.000823	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA ATAU PESERTA DIDIK YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

204	1.01.000824	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
205	1.01.000825	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

206	1.01.000826	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
207	1.01.000827	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	Jumlah Siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

208	1.01.000828	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
209	1.01.000829	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	jumlah siswa putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

210	1.01.000830	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	JUMLAH TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
211	1.01.000831	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

212	1.01.000832	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0056]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
213	1.01.000833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU ATAU TENAGA PENDIDIK YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

214	1.01.000834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
215	1.01.000835	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

216	1.01.000836	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
217	1.01.000837	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

218	1.01.000838	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
219	1.01.000839	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI YANG MEMILIKI IJAZAH TINGKAT STRATA SATU ATAU S1	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

220	1.01.000840	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah dibawah S1	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
221	1.01.000841	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	JUMLAH KESELURUHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG MEMILIKI IJAZAH DIBAWAH STRATA SATU ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

222	1.01.000842	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah S1 keatas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
223	1.01.000843	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah S1 keatas	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

224	1.01.000844	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	JUMLAH KESELURUHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BERIJAZAH STRATA SATU ATAU S1 KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
225	1.01.000845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

226	1.01.000846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swastai	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
227	1.01.000847	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.3.06.0042] [1.01.02.3.06.0043]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

228	1.01.000848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.3.06.0042] [1.01.02.3.06.0043]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
229	1.01.000849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

230	1.01.000850	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
231	1.01.000851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

232	1.01.000852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH ATAU SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
233	1.01.000853	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

234	1.01.000854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri	Orang	JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMILIKI IJAZAH DIATAS SMA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
235	1.01.000855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

236	1.01.000856	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA	Orang	JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIIDIKAN YANG BERIJAZAH DIATAS SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
237	1.01.000857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

238	1.01.000858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
239	1.01.000859	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

240	1.01.000860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
241	1.01.000861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

242	1.01.000862	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.3.06.0002] [1.01.02.4.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
243	1.01.000863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

244	1.01.000864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
245	1.01.000865	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS DALAM KONDISI BAIK PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

246	1.01.000866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK RINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
247	1.01.000867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK RINGAN PADA SKEOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

248	1.01.000868	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK RINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
249	1.01.000869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK SEDANG PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

250	1.01.000870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK SEDANG PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
251	1.01.000871	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK SEDANG PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

252	1.01.000872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK BERAT PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
253	1.01.000873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK BERAT PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

254	1.01.000874	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK BERAT PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
255	1.01.000875	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

256	1.01.000876	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
257	1.01.000877	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL	T	T	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

258	1.01.000878	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH STRATA 1 ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
259	1.01.000879	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH STRATA 1 ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

260	1.01.000880	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1	Orang	JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.4.06.0042]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
261	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.1.01.0057] [1.01.02.1.01.0059] [1.01.02.1.01.0064] [1.01.02.1.02.0050] [1.01.02.1.02.0052] [1.01.02.1.02.0058] [1.01.02.1.03.0056] [1.01.02.1.03.0058] [1.01.02.1.03.0063] [1.01.02.3.04.0037] [1.01.02.3.04.0039] [1.01.02.4.04.0037] [1.01.02.4.04.0039] [1.01.02.4.07.0002] [1.01.02.4.05.0059] [1.01.02.4.06.0052] [1.01.02.2.02.0068] [1.01.02.2.01.0035] [1.01.02.2.01.0037] [1.01.02.2.01.0042] [1.01.02.2.02.0048] [1.01.02.2.02.0050]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

262	1.01.000889	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	T	T	Dinas Pendidikan	[1.01.02.4.05.0065] [1.01.02.3.05.0065] [1.01.02.4.06.0065] [1.01.02.3.06.0059] [1.01.02.1.01.0065] [1.01.02.1.02.0059] [1.01.02.1.03.0066] [1.01.02.1.01.0060] [1.01.02.1.02.0053] [1.01.02.1.03.0059] [1.01.02.3.04.0040] [1.01.02.4.04.0040] [1.01.02.2.01.0043] [1.01.02.2.02.0055] [1.01.02.2.03.0037] [1.01.02.2.04.0031] [1.01.02.2.01.0038] [1.01.02.2.02.0051] [1.01.02.2.03.0025] [1.01.02.2.04.0027] [1.01.02.3.05.0060] [1.01.02.3.06.0053]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
263	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan Jumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0013] [1.02.02.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

264	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	T	T	Dinas Kesehatan & 8 RS Pemprov	[1.02.02.1.01.0010] [1.02.02.2.01.0014] [1.02.02.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
265	1.02.000007	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.01.0017] [1.02.02.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

266	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Unit	Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS	T	T	RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
267	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana	Jumlah Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Memiliki Izin	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

268	1.02.000020	Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kuantitas	Jumlah Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.05.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
269	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

270	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
271	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

272	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
273	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

274	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
275	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

276	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
277	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

278	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
279	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

280	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
281	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

282	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
283	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.07.0002] [1.02.03.4.07.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

284	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	Dokumen	&Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Vaksin adalah suatu bentuk perlindungan atau imunisasi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi tubuhnya dari penyakit tertentu. Jumlah Dokumen distribusi alkes, obat, Vaksin, makanan, dan minuman ke faskes lainnya&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
285	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

286	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
287	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0016] [1.02.02.2.02.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

288	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0006] [1.02.02.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
289	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

290	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0007] [1.02.02.2.02.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
291	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0008] [1.02.02.2.02.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

292	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 3. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 4. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
293	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

294	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
295	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	T	T	RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.02.0009] [1.02.02.2.02.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

296	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0017] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.02.0020] [1.02.02.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
297	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

298	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	T	T	RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.02.0031] [1.02.02.2.02.0034]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
299	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	T	T	1. RSUD Prof. Dr. margono 2. RSUD dr. REHATA 3. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.02.0022] [1.02.02.2.02.0032]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

300	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 3. RSUD Dr. Moewardi 4. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0001] [1.02.07.4.01.0001] [1.02.02.2.04.0001] [1.02.02.2.04.0002] [1.02.02.2.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
301	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

302	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 3. RSUD Dr. Moewardi 4. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
303	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

304	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
305	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD dr. REHATA 3. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.1.01.0008] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

306	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	T	T	1. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 2. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
307	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

308	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
309	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

310	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
311	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

312	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.05.1.01.0001] [1.02.03.3.08.0001] [1.02.03.4.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
313	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

314	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0027]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
315	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	T	T	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	[1.02.02.1.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

316	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
317	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 3. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 4. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

318	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Jumlah alat di laundry	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
319	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Jumlah Peralatan di ruang CSSD	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

320	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
321	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang farmasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

322	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
323	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Jumlah Peralatan di ruang intensif	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

324	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
325	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

326	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang operasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
327	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	&Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi&	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

328	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
329	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

330	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
331	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

332	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
333	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0023] [1.02.02.2.02.0038]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

334	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.3.01.0041] [1.02.02.3.02.0032] [1.02.02.4.01.0041] [1.02.02.4.02.0032] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0009] [1.02.02.3.02.0044] [1.02.02.4.02.0044]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
335	1.02.000165	RICU	Unit	Jumlah RICU	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

336	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
337	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit	T	T	1. RSJD Dr. Amino Gondohutomo 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

338	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah Ruang Farmasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
339	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah Ruang Gawat Darurat	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

340	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah Ruang Gizi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
341	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah Ruang Jenazah	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

342	1.02.000183	Ruang Laboraturium	Unit	Jumlah Ruang Laboraturium	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
343	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	Jumlah Ruang Loundry	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

344	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah Ruang Operasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
345	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah Ruang Parkir	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

346	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
347	1.02.000190	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	Jumlah Ruang Penaggulangan Kebakaran	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

348	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
349	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

350	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah Ruang Radiologi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
351	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah Ruang Rawat Inap	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

352	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	Jumlah Ruang Rawat Intentif	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
353	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah Ruang Rawat Jalan	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

354	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
355	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah Ruang Rekam Medis	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

356	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah Ruang Sterilisasi	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
357	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	T	T	RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.01.0009] [1.02.02.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

358	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
359	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

360	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
361	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

362	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
363	1.02.000227	Telemedicine	Unit	Jumlah Telemedicine	T	T	1. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 2. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.01.0020] [1.02.02.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

364	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
365	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

366	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.02.0005] [1.02.03.4.02.0005] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] [1.02.03.3.03.0002] [1.02.03.4.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
367	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

368	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
369	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

370	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut &&Perawat Spesialis&&. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya&	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
371	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&	T	T		[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

372	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
373	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&	T	T		[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

374	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
375	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

376	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis&	T	T		[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
377	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	Orang	&Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterapian fisik&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

378	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
379	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.04.1.01.0001] [1.03.02.1.02.0004] [1.03.02.1.02.0010] [1.03.02.1.02.0016] [1.03.02.1.02.0023] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006] [1.03.02.2.02.0004] [1.03.02.2.02.0010] [1.03.02.2.02.0016] [1.03.02.2.02.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

380	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0002] [1.02.02.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
381	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

382	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
383	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Dr. Adiyatma, MPH 3. RSUD dr. REHATA 4. RSJD dr. ARIF ZAINUDIN 5. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 6. RS Mata Soepardjo Rustam, 7. RSUD Dr. Moewardi, 8. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 9. RSJD Dr. Amino Gondohutomo	[1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

384	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	Alat kesehatan	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.02.1.01.0025] [1.02.02.2.01.0020] [1.02.02.2.01.0021] [1.02.02.2.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
385	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	T	T	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 3. RS Mata Soepardjo Rustam	[1.02.02.1.03.0002] [1.02.03.3.02.0011] [1.02.03.4.02.0011] [1.02.02.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

386	1.02.000318	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	Keluarga	3167	T	T	Dinas Kesehatan	[1.02.05.1.02.0002] [1.02.05.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
387	1.03.000034	Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan antar provinsi berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan dari setiap pemerintah daerah.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

388	1.03.000039	Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
389	1.03.000045	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

390	1.03.000046	Berita Acara rapat koordinasi/surat kesepkatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil rapat koordinasi antar provinsi yang berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan dari setiap pemerintah daerah.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
391	1.03.000056	Dokumen dan Validasi KLHS Provinsi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dokumen	Surat Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Provinsi.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013] [1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

392	1.03.000066	Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0087]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
393	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0043] [1.03.10.2.01.0043]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

394	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0043] [1.03.10.2.01.0043]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
395	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.2.01.0001] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

396	1.03.000074	Dokumen kebijakan PERDA/PERGUB selain RTRW Provinsi	Dokumen	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Provinsi.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
397	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0041] [1.03.10.2.01.0029]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

398	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0044] [1.03.10.2.01.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
399	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0121] [1.03.02.2.01.0128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

400	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0122] [1.03.02.2.01.0120]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
401	1.03.000106	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Provinsi adalah penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur (PP	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0007] [1.03.12.1.01.0006] [1.03.12.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

402	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.05.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0041]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
403	1.03.000129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0103]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

404	1.03.000131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0103]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
405	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

406	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
407	1.03.000142	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	- Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air - Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungaiyang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0117]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

408	1.03.000144	Dokumen Ranperda (Raperda, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
409	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.2.01.0008] [1.03.12.2.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

410	1.03.000148	Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0087]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
411	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0041] [1.03.10.2.01.0029]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

412	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
413	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.06.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0045]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

414	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.02.1.02.0032] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
415	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0041] [1.03.10.2.01.0029]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

416	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0119] [1.03.02.2.01.0127]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
417	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0121] [1.03.02.2.01.0128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

418	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0032] [1.03.02.2.02.0035]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
419	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0122] [1.03.02.2.01.0120]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

420	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0019] [1.03.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
421	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0032] [1.03.10.1.01.0036] [1.03.10.1.01.0029] [1.03.10.1.01.0025] [1.03.10.1.01.0026] [1.03.10.1.01.0027] [1.03.10.2.01.0040] [1.03.10.2.01.0031] [1.03.10.2.01.0048] [1.03.10.2.01.0039] [1.03.10.2.01.0038] [1.03.10.2.01.0042] [1.03.10.2.01.0057] [1.03.10.2.01.0069]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

422	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0017] [1.03.03.1.01.0018] [1.03.03.2.01.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
423	1.03.000224	Keterangan Kesesuaian Substansi	Dokumen	Surat keterangan kesesuaian substansi berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi substansi terhadap Raperda/Raperkada tentang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota/RDTR Kabupaten/Kota dari Kementerian ATR/BPN yang telah memenuhi kelengkapan dokumen untuk dapat dilanjutkan ke proses Persub. Surat dimaksud ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat pada Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I/II.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

424	1.03.000229	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
425	1.03.000230	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Dokumen	Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

426	1.03.000232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0039]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
427	1.03.000233	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0039]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

428	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0118] [1.03.02.2.01.0109]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
429	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0043] [1.03.10.1.01.0042] [1.03.10.1.01.0040] [1.03.10.1.01.0035] [1.03.10.1.01.0031] [1.03.10.1.01.0030] [1.03.10.1.01.0038] [1.03.10.1.01.0033] [1.03.10.1.01.0028] [1.03.10.1.01.0024] [1.03.10.2.01.0043] [1.03.10.2.01.0032] [1.03.10.2.01.0037] [1.03.10.2.01.0041] [1.03.10.2.01.0033] [1.03.10.2.01.0044] [1.03.10.2.01.0034] [1.03.10.2.01.0046] [1.03.10.2.01.0036] [1.03.10.2.01.0030]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

430	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0002] [1.03.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
431	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0101] [1.03.02.2.01.0073]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

432	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0107] [1.03.02.2.01.0080]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
433	1.03.000261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

434	1.03.000273	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Orang	Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
435	1.03.000277	Penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi hasil penyempurnaan oleh Pemda Provinsi dengan DPRD Provinsi yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

436	1.03.000282	Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya (Pasca Linsek)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Provinsi.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
437	1.03.000283	Persetujuan teknis Pengaturan Perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan	Dokumen	Surat persetujuan teknis Pengaturan Perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

438	1.03.000284	Peta (SHP) untuk diunggah dalam bentuk link google drive	Dokumen	Peta digital dalam bentuk format shapefile (shp) yang diunggah dalam bentuk link google drive.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
439	1.03.000295	Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	Dokumen	Notulensi Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0008] [1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

440	1.03.000297	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
441	1.03.000302	Rapat Persiapan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

442	1.03.000305	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
443	1.03.000343	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan dari Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan di tanda tangani oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0008] [1.03.12.1.01.0006] [1.03.12.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

444	1.03.000344	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur, dan surat permohonan fasilitasi Ranperkada RDTR yang ditujukan kepada Gubenur.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.2.01.0008] [1.03.12.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
445	1.03.000346	Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Provinsi ditandatangani oleh Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

446	1.03.000348	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	Dokumen	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0003] [1.03.12.1.01.0007] [1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
447	1.03.000349	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan substansi di tanda tangani Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0001] [1.03.12.1.01.0007] [1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

448	1.03.000353	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur	Dokumen	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di tandatangani oleh Gubernur	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0007] [1.03.12.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
449	1.03.000416	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau produk konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

450	1.03.000420	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
451	1.03.000432	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

452	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008] [1.03.11.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
453	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008] [1.03.11.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

454	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008] [1.03.11.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
455	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008] [1.03.11.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

456	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0008] [1.03.11.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
457	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.05.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0045]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

458	1.03.000445	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
459	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.05.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0001] [1.03.05.2.01.0045]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

460	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
461	1.03.000453	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pembokaran Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya diantaranya adalah dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dan dokumen pelaksanaan pembongkaran	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

462	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
463	1.03.000456	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pegawasan Pembangunan Gedung adalah terkait Laporan pengawasan dari konsultan MK/ supervisi yang dilaporkan setiap bulan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

464	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.05.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0045] [1.03.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
465	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.05.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0001] [1.03.05.2.01.0045]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

466	1.03.000461	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
467	1.03.000471	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

468	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan Gubernur	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
469	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.05.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0045] [1.03.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

470	1.03.000478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
471	1.03.000479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen yang berisi tentang kapasitas air baku yang dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

472	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.06.1.01.0001] [1.03.05.2.01.0041] [1.03.05.2.01.0045] [1.03.06.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
473	1.03.000485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	Dokumen	Dokumen roadmap sanitasi Provinsi adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

474	1.03.000487	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
475	1.03.000491	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

476	1.03.000493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Ahli paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
477	1.03.000496	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

478	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0014] [1.03.03.1.01.0021] [1.03.04.1.01.0012] [1.03.05.1.01.0010] [1.03.05.1.01.0016] [1.03.08.1.01.0018] [1.03.11.1.02.0009] [1.03.11.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
479	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/Kota	1. Bimbingan Teknis Dan Pengawasan & Evaluasi PP 16/2021 2. Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara 3. Pendampingan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

480	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
481	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0006] [1.03.11.1.02.0007] [1.03.11.2.02.0012] [1.03.11.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

482	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.01.0012] [1.03.11.1.01.0016] [1.03.11.1.03.0006] [1.03.11.2.01.0011] [1.03.11.2.01.0013] [1.03.11.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
483	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0075] [1.03.02.1.01.0090] [1.03.02.1.02.0030] [1.03.02.2.01.0075] [1.03.02.2.02.0030] [1.03.02.2.01.0078]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

484	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0013] [1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
485	1.03.000518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

486	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0009] [1.03.11.2.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
487	1.03.000529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

488	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.02.0007] [1.03.11.2.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
489	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.1.01.0025] [1.03.03.1.01.0001] [1.03.03.2.01.0025] [1.03.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

490	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
491	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.07.1.01.0030] [1.03.03.2.01.0031] [1.03.07.2.01.0030]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

492	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0021] [1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023] [1.03.03.2.01.0030] [1.03.07.2.01.0036]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
493	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.07.1.01.0024] [1.03.07.1.01.0026] [1.03.07.1.01.0029] [1.03.07.2.01.0021] [1.03.07.2.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

494	1.03.000569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli yang mencakup jenjang 7, 8, dan 9 di wilayah kewenangannya	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.11.1.01.0009] [1.03.11.1.01.0010] [1.03.11.1.01.0011] [1.03.11.1.01.0013] [1.03.11.1.01.0014] [1.03.11.1.01.0015] [1.03.11.3.01.0009] [1.03.11.4.01.0009] [1.03.11.1.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
495	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.2.01.0009] [1.03.04.2.01.0012] [1.03.04.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

496	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0012] [1.03.05.1.01.0019] [1.03.07.1.01.0011] [1.03.05.2.01.0018] [1.03.05.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0028] [1.03.05.2.01.0029] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.05.2.01.0032] [1.03.07.2.01.0026] [1.03.05.2.01.0042] [1.03.05.2.01.0038]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
497	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun, selain breakwater dan seawall. Dapat berupa jetty, groin/krib, atau revetment dari susunan batu	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.2.01.0117]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

498	1.03.000604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Provinsi yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.10.1.01.0024] [1.03.10.1.01.0028] [1.03.10.1.01.0056] [1.03.10.1.01.0045]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
499	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0015] [1.03.05.2.01.0041]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

500	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
501	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0120] [1.03.02.2.01.0121]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

502	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	Jumlah bangunan penampung air yang dibangun (buatan) selain embung	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0120] [1.03.02.2.01.0121]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
503	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0078] [1.03.02.2.01.0114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

504	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	Jumlah bangunan penampung air (buatan) yang direhabilitasi selain embung dan tampungan alami (danau/situ)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0078] [1.03.02.2.01.0114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
505	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0009] [1.03.02.2.01.0115]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

506	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0073] [1.03.02.2.01.0126]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
507	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0108] [1.03.02.2.01.0110]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

508	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0026] [1.03.02.2.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
509	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	Jumlah check dam yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0031] [1.03.02.2.01.0031]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

510	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	Jumlah check dam yang dibangun	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0102] [1.03.02.2.01.0104]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
511	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.2.01.0105]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

512	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0094] [1.03.02.2.01.0103]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
513	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0106] [1.03.02.2.01.0101]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

514	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0085] [1.03.02.2.01.0100]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
515	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang ditingkatkan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0114] [1.03.02.2.01.0094]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

516	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	Jumlah unit FFWS yang ditingkatkan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0104] [1.03.02.2.01.0090]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
517	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0079] [1.03.02.2.01.0093]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

518	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0105] [1.03.02.2.01.0089]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
519	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0069] [1.03.02.2.01.0068]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

520	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0107] [1.03.02.2.01.0080]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
521	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0107] [1.03.02.2.01.0080]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

522	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0008] [1.03.02.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
523	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0009] [1.03.02.2.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

524	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0014] [1.03.02.2.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
525	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0015] [1.03.02.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

526	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0021] [1.03.02.2.02.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
527	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0022] [1.03.02.2.02.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

528	1.03.000728	Jumlah Alokasi Air di Daerah Irigasi	Liter/Detik	Jumlah alokasi air di Daerah irigasi yang diberikan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
529	1.03.000729	Fasilitasi Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0030]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

530	1.03.000730	Fasilitasi Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.02.0030]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
531	1.03.000745	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

532	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
533	1.03.000747	.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

534	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0015] [1.03.03.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
535	1.03.000749	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0017] [1.03.03.2.01.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

536	1.03.000750	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit SPAM	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0020] [1.03.03.1.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
537	1.03.910118	Jumlah perjanjian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perjajian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota yang penyusunannya difasilitasi Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

538	1.03.910119	Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM	kabupaten/kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM dari pemerintah provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.03.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
539	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.05.1.01.0014] [1.03.05.2.01.0040]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

540	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.07.1.01.0011] [1.03.07.1.01.0014] [1.03.07.1.01.0019] [1.03.07.1.01.0023] [1.03.07.1.01.0033] [1.03.07.1.01.0037] [1.03.07.1.01.0041] [1.03.07.1.01.0038] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.07.2.01.0011] [1.03.07.2.01.0018] [1.03.07.2.01.0026] [1.03.07.2.01.0032]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
541	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	Laporan yang disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan b. meminta c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang d. memasuki tempat atau lokasi e. f. membuat rekaman audio g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana h. menghentikan pelanggaran dan i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.04.0010] [1.03.12.3.06.0004] [1.03.12.4.06.0004] [1.03.12.2.04.0005] [1.03.12.3.06.0004] [1.03.12.4.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

542	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.04.0007] [1.03.12.3.06.0003] [1.03.12.4.06.0003] [1.03.12.2.04.0010] [1.03.12.3.06.0003] [1.03.12.4.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
543	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.3.05.0001] [1.03.12.4.05.0001] [1.03.12.3.05.0001] [1.03.12.4.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

544	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.04.0005] [1.03.12.3.04.0008] [1.03.12.4.04.0008] [1.03.12.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
545	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.04.0011] [1.03.12.3.04.0006] [1.03.12.4.04.0006] [1.03.12.2.04.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

546	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.04.0014] [1.03.12.3.04.0005] [1.03.12.4.04.0005] [1.03.12.2.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
547	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.03.0005] [1.03.12.3.03.0005] [1.03.12.4.03.0005] [1.03.12.3.03.0004] [1.03.12.4.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

548	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.03.0003] [1.03.12.3.03.0004] [1.03.12.4.03.0004] [1.03.12.3.03.0003] [1.03.12.4.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
549	1.03.910142	Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.3.02.0008] [1.03.12.4.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

550	1.03.910143	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0006] [1.03.12.3.02.0007] [1.03.12.4.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
551	1.03.910144	Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0011] [1.03.12.3.02.0006] [1.03.12.4.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

552	1.03.910145	Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.3.02.0005] [1.03.12.4.02.0005] [1.03.12.1.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
553	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.04.0009] [1.03.12.2.04.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

554	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.03.0006] [1.03.13.5.01.0006] [1.03.12.2.03.0006] [1.03.13.5.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
555	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.03.0004] [1.03.12.2.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

556	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0004] [1.03.12.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
557	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.02.0010] [1.03.12.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

558	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.12.1.01.0005] [1.03.12.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
559	1.03.910175	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0062] [1.03.02.1.01.0087]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

560	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0052] [1.03.02.2.01.0052] [1.03.02.1.01.0125]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
561	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.02.1.01.0110] [1.03.02.2.01.0095] [1.03.02.1.01.0131]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

562	1.03.910182	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Orang	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
563	1.03.910183	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

564	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0016] [1.03.04.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
565	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0016] [1.03.04.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

566	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
567	1.03.910187	Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan	Unit	Sarana pengolahan persampahan adalah peralatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

568	1.03.910188	Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah	Unit	Sarana Pemrosesan Akhir persampahan adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang terdiri dari kegiatan penutupan sampah dengan tanah urug (lahan urug saniter/terkontrol) dan pemadatan tanah, pemagaran dan akses kontrol 24 jam, dan pengolahan lindi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
569	1.03.910189	Jumlah Masyarakat	Orang	Masyarakat adalah orang/individu/kelompok yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi dalam hal sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah di tiap rumah, pemilahan di TPS), pembuatan produk olahan sampah (kompos, budidaya maggot, dll), dan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0014] [1.03.04.1.01.0008] [1.03.04.2.01.0011] [1.03.04.2.01.0014] [1.03.04.2.01.0021] [1.03.04.2.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

570	1.03.910191	Jumlah dokumen legal yang disahkan	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen RTBL yang disahkan sebagai Pergub/Perbub/Perwal menjadi dokumen rujukan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dan aturan pemanfaatan tata ruang. Kawasan Sistem Perkotaan berdasarkan kewenanagan Pemerintah Provinsi (Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Kegiatan Lokal) atau Pusat Kegiatan Wilayah yang diusulkan Provinsi serta kawasan strategis lainnya yang memegang peranan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
571	1.03.910200	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/hari	Kapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

572	1.03.910201	Kapasitas SPA terpakai	Ton/hari	Kapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
573	1.03.910205	Jumlah TPA	Unit	TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

574	1.03.910207	Jumlah KK terlayani	KK	Jumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA/TPSTSPA//TPS3R dalam satuan kepala keluarga	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
575	1.03.910208	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	Unit	Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi infrastruktur pengelolaan sampah yaitu TPA, TPST, SPA, TPS-3R dan/atau TPS	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.04.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

576	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0012] [1.03.08.1.01.0016] [1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0017] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0019] [1.03.08.2.01.0021] [1.03.08.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
577	1.03.910210	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

578	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
579	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

580	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
581	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

582	1.03.910215	ketersediaan Pengelola Teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan BGN	Orang		T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
583	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

584	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
585	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

586	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
587	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

588	1.03.910231	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.â€‹	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
589	1.03.910232	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Dokumen	Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.09.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

590	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Dokumen Penetapan Kawasa Strategis Provinsi	T	T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.03.07.1.01.0024] [1.03.07.2.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
591	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

592	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
593	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang berkomitmen menerima bantuan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

594	1.04.000011	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
595	1.04.000012	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

596	1.04.000013	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
597	1.04.000015	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana provinsi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

598	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana provinsi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
599	1.04.000021	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana provinsi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

600	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
601	1.04.000025	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

602	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0008] [1.04.03.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
603	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0014] [1.04.03.2.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

604	1.04.000048	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
605	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

606	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
607	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air minum dan identifikasi melalui citra satelit	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

608	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang jaringan listrik dan identifikasi melalui citra satelit	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
609	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang persampahan dan identifikasi melalui citra satelit	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

610	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
611	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

612	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
613	1.04.000068	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	I. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah II. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kabupaten yang mengurusu perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun. III. Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

614	1.04.000073	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan meliputi: a. hak keperdataan masyarakat terdampak, b. kondisi ekologis lokasi, dan c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
615	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0005] [1.04.03.2.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

616	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
617	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

618	1.04.000077	Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
619	1.04.000079	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

620	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0004] [1.04.03.1.02.0012] [1.04.03.2.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
621	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

622	1.04.000086	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan mengacu kepada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.04.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
623	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

624	1.04.000093	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	Laporan	(musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang memuat: 1. Jumlah unit rumah dan rumah tangga yang terdampak 2. Identifikasi tingkat kerusakan rumah 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
625	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.03.0004] [1.04.02.2.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

626	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0008] [1.04.03.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
627	1.04.000104	Laporan pelaksanaan proses peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Laporan	Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal. Penanganan kumuh dilakukan pada kawasan kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha baik yang berada di lintas kabupaten/kota ataupun dalam satu kabupaten/kota dan ditetapkan dalam SK Kumuh Provinsi. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (2) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), serta (3) Revitalisasi rumah susun, dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

628	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0014] [1.04.03.2.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
629	1.04.000109	Laporan proses penyediaan PSU permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

630	1.04.000112	Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman, dengan penjelasan daftar lokasi permukiman tsb.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
631	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai hasil penilaian appraisal	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

632	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
633	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0018] [1.04.04.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

634	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
635	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

636	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Permukiman	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
637	1.04.000155	Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

638	1.04.000169	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa total jumlah unit rumah yang akan ditangani	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
639	1.04.000170	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang belum tertangani	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

640	1.04.000171	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang sudah ditangani	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
641	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

642	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
643	1.04.000186	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

644	1.04.000195	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
645	1.04.000199	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

646	1.04.000213	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
647	1.04.000214	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

648	1.04.000215	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
649	1.04.000220	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

650	1.04.000230	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen	I. Gubernur menetapkan/membentuk Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah II. Kepala Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan III. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dari Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman IV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang meliputi antara lain: A. Dokumen Permohonan Sertifikasi: 1. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 2. Data Identitas Pengembang Perumahan: a. Nama Lengkap Pengembang Perumahan b. Tahun Pendirian c. Faksimile d	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
651	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh sesuai kewenangan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0013] [1.04.03.2.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

652	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0016] [1.04.03.2.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
653	1.04.000266	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis prasarana antara lain: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), sistem penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

654	1.04.000270	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
655	1.04.000283	Jumlah Rumah yang terdampak Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangannya yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Pola penanganan ini dilakukan pada kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Pengadaan lahan termasuk pematangan lahan, (2) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (3) Penyediaan kompensasi bagi non-peserta relokasi/pemukiman kembali, (4) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

656	1.04.000284	Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Peremajaan dilakukan melalui perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Pola penanganan ini dilakukan pada kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Penyediaan kompensasi bagi non-peserta peremajaan, (2) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, dan (3) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) dalam rangka Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
657	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.05.1.01.0006] [1.04.05.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

658	1.04.000294	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
659	1.04.000295	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	Laporan kegiatan sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat terdiri dari: 1. KAK/TOR kegiatan 2. RAB kegiatan 3. Hasil pelaksanaan kegiatan 4. Dokumentasi kegiatan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

660	1.04.000300	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni Kepada Masyarakat Terdampak Program Pengentasan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
661	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pembagian Rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0016] [1.04.03.2.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

662	1.04.000304	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi yang memuat: 1. Penjelasan program provinsi yang berdampak pada relokasi rumah 2. Jumlah unit rumah dan rumah tangga yang terdampak 3. Identifikasi masyarakat terdampak yang memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang tidak memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan 4. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
663	1.04.000306	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru 3. Siteplan, DED, dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.03.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

664	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.02.0009] [1.04.02.2.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
665	1.04.000319	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	Jumlah rumah yang dibangun bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.02.1.03.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

666	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen		T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
667	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen		T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

668	1.04.000890	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki â€œLack of Accessâ€•terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga		T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[1.04.03.1.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
669	1.05.000002	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

670	1.05.000003	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
671	1.05.000004	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

672	1.05.000005	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen,.yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
673	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana untuk dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelatihan pencegahan bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.02.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

674	1.05.000012	Data Kebencanaan	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara Bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana berpotensi menjadi urusan provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.04.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
675	1.05.000019	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

676	1.05.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
677	1.05.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

678	1.05.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolah data	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
679	1.05.000043	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

680	1.05.000044	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Data yang memuat pelaksanaan kerjasama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Data ini dapat disajikan dengan memuat jumlah pelaksanaan rapat pembahasan kerjasama, atau jumlah daerah/lembaga/mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan kerjasama, atau jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
681	1.05.000045	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

682	1.05.000046	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
683	1.05.000047	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

684	1.05.000048	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
685	1.05.000061	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran adalah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

686	1.05.000068	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Perkara yang dapat disidangkan di tempat	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, yang disidangkan melalui Sidang di Tempat	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
687	1.05.000069	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, baik Acara Pemeriksaan Cepat maupun Acara Pemeriksaan Singkat	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

688	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	Dokumen	Merupakan dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi melalui penyusunan dokumen JITU PASNA dan dokumen R3P yang menjadi kewenangan provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.04.0007] [1.05.03.2.04.0013] [1.05.03.2.04.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
689	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Provinsi merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas provinsi dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.02.0017] [1.05.03.2.02.0009] [1.05.03.2.02.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

690	1.05.000130	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
691	1.05.000131	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

692	1.05.000132	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
693	1.05.000168	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

694	1.05.000169	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
695	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

696	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Gubernur	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
697	1.05.000180	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

698	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	sosialisasi perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
699	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	sosialisasi Peraturan Gubernur kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

700	1.05.000192	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
701	1.05.000195	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

702	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menajdi kewenangan provinsi meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di tingkat provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.04.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
703	1.05.000206	Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana skala provinsi sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

704	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi aparatur provinsi dan kabupaten/kota untuk jenis bencana prioritas provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
705	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Berisikan laoran hasil pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

706	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah orang/aparatur/personil yang tersedia untuk melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) untuk mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan kabupaten/kota dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana lintas kabupaten/kota	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
707	1.05.000257	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.04.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

708	1.05.000263	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
709	1.05.000269	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	Kegiatan Diklat atau Bimtek dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

710	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0011] [1.05.02.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
711	1.05.000271	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan dokumen hasil kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang menjadikan Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

712	1.05.000272	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan dan dalam pelaksanaannya PPNS dapat meminta bantuan POL PP maupun Kepolisian	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
713	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0011] [1.05.02.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

714	1.05.000281	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras yang pemanfaatannya untuk Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti Penegakkan Perda	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0004] [1.05.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
715	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0021] [1.05.04.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

716	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
717	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

718	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0018] [1.05.04.1.01.0002] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0013] [1.05.04.2.01.0011] [1.05.04.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
719	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0023] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

720	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0015] [1.05.04.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
721	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

722	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.03.0004] [1.05.02.2.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
723	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.03.0006] [1.05.02.2.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

724	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0006] [1.05.02.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
725	1.05.000294	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Laporan	Laporan pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah yang memuat : 1. Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan BPBD Provinsi untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas 2. Capaian pemenuhan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[1.05.03.1.04.0009] [1.05.03.1.04.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

726	1.05.000295	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
727	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

728	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
729	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0035]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

730	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0035]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
731	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0032]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

732	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0033]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
733	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0031]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

734	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0030]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
735	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0036]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

736	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
737	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/Kota dama rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0034]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

738	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0029]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
739	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.1.01.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

740	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.2.02.0013] [1.05.02.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
741	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0026] [1.05.02.2.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

742	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.2.01.0023] [1.05.02.1.01.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
743	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0025] [1.05.02.1.01.0027] [1.05.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

744	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
745	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

746	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
747	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

748	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
749	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

750	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
751	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.01.0020] [1.05.04.2.01.0027]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

752	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
753	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

754	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
755	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

756	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
757	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

758	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.04.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
759	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.04.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

760	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
761	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

762	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
763	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.05.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

764	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.05.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
765	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	T	T	SATPOL PP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

766	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	T	T	SATPOL PP	[X.XX.01.1.07.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
767	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

768	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
769	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

770	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	T	T	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
771	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	T	T	SATPOL PP	[1.05.04.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

772	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	T	T	SATPOL PP	[1.05.02.1.02.0002] [1.05.02.2.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
773	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti	Orang	Alat bantu yang diterima oleh lanjut usia terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

774	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	Alat bantu yang diterima oleh penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
775	1.06.000004	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Kartu Identitas.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

776	1.06.000005	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Akta Kelahiran	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
777	1.06.000006	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

778	1.06.000010	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
779	1.06.000011	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

780	1.06.000012	Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan layanan pengasuhan berupa upaya pemenuhan kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
781	1.06.000013	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

782	1.06.000014	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
783	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0005] [1.06.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

784	1.06.000016	Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti berupa wali yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
785	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

786	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
787	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	Orang	Anak yang mendapatkan fasilitasi pengangkatan anak berupa perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.01.0001] [1.06.04.3.07.0001] [1.06.04.4.07.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

788	1.06.000027	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal	Orang	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
789	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan kendaraan panti sosial gelandangan dan pengemis.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

790	1.06.000032	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
791	1.06.000033	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

792	1.06.000035	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Kartu Identitas Anak	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
793	1.06.000036	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Akta Kelahiran	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

794	1.06.000037	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
795	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

796	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0004] [1.06.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
797	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

798	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
799	1.06.000049	Gelandangan dan pengemis yang tmendapat Fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Surat Nikah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

800	1.06.000050	Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
801	1.06.000051	Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar	Orang	Jumlah instruktur yang memberikan bimbingan keterampilan dasar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0007] [1.06.04.1.04.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

802	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
803	1.06.000057	Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	Jumlah keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

804	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Keluarga	Fasilitasi pengentasan fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.02.0002] [1.06.02.3.05.0001] [1.06.02.4.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
805	1.06.000060	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0013] [1.06.04.3.09.0001] [1.06.04.3.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

806	1.06.000061	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0012] [1.06.04.3.09.0001] [1.06.04.3.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
807	1.06.000062	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0013] [1.06.04.3.08.0001] [1.06.04.3.09.0001] [1.06.02.3.02.0008] [1.06.02.4.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

808	1.06.000063	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0011] [1.06.04.3.09.0001] [1.06.04.3.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
809	1.06.000064	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0011] [1.06.04.3.09.0001] [1.06.04.3.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

810	1.06.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.01.0001] [1.06.02.3.01.0002] [1.06.02.4.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
811	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

812	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0002] [1.06.06.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
813	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0005] [1.06.06.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

814	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0004] [1.06.06.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
815	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0001] [1.06.06.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

816	1.06.000073	lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
817	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Lanjut usia telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

818	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
819	1.06.000078	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

820	1.06.000079	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
821	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0005] [1.06.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

822	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
823	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0004] [1.06.02.3.02.0007] [1.06.02.4.02.0007] [1.06.02.2.03.0004] [1.06.02.3.05.0001] [1.06.02.4.05.0001] [1.06.02.2.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

824	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.02.0003] [1.06.02.3.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
825	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0007] [1.06.04.1.02.0007] [1.06.04.1.03.0007] [1.06.04.1.04.0006] [1.06.04.1.05.0006] [1.06.02.3.02.0006] [1.06.02.4.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

826	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.2.01.0005] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.02.3.04.0001] [1.06.02.4.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
827	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0001] [1.06.02.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

828	1.06.000100	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	&Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0007] [1.06.04.1.02.0007] [1.06.04.1.03.0007] [1.06.04.1.04.0006] [1.06.04.1.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
829	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.04.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

830	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
831	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan di panti sosial gelandangan dan pengemis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

832	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial lanjut usia terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
833	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial penyandang disabilitas terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

834	1.06.000108	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
835	1.06.000109	Pemulasaraan	Kegiatan	Pelaksanaan pemulasaraan sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar di dalam panti	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0012] [1.06.04.1.05.0018] [1.06.04.1.01.0019] [1.06.04.1.04.0017] [1.06.04.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

836	1.06.000114	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
837	1.06.000120	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

838	1.06.000121	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
839	1.06.000123	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0010] [1.06.04.1.04.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

840	1.06.000124	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
841	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0005] [1.06.04.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

842	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
843	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

844	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
845	1.06.000141	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

846	1.06.000142	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Akta Kelahiran	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
847	1.06.000143	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Kartu Identitas Anak	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

848	1.06.000144	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
849	1.06.000145	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

850	1.06.000146	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	&Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
851	1.06.000147	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDSyang mendapat fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Surat Nikah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

852	1.06.000148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDSyang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS di dalam panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
853	1.06.000149	PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

854	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.07.1.01.0001] [1.06.07.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
855	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial anak terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

856	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
857	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial lanjut usia terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

858	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
859	1.06.000155	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

860	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
861	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

862	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan di panti sosial lanjut usia terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
863	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

864	1.06.000160	Standar sarana prasarana Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
865	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

866	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.3.02.0008] [1.06.02.2.03.0002] [1.06.02.3.03.0008] [1.06.02.4.03.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
867	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial anak terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0003] [1.06.04.1.02.0005] [1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.02.0007] [1.06.04.1.02.0008] [1.06.04.1.02.0009] [1.06.04.1.02.0010] [1.06.04.1.02.0011] [1.06.04.1.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

868	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0002] [1.06.04.1.04.0004] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.04.0006] [1.06.04.1.04.0008] [1.06.04.1.04.0009] [1.06.04.1.04.0007] [1.06.04.1.04.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
869	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial lanjut usia terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0002] [1.06.04.1.03.0005] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.03.0007] [1.06.04.1.03.0008] [1.06.04.1.03.0009] [1.06.04.1.03.0010] [1.06.04.1.03.0011] [1.06.04.1.03.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

870	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial penyandang disabilitas terlantar	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0002] [1.06.04.1.01.0005] [1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.1.01.0007] [1.06.04.1.01.0008] [1.06.04.1.01.0009] [1.06.04.1.01.0010] [1.06.04.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
871	1.06.000168	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0002] [1.06.04.1.05.0004] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.1.05.0006] [1.06.04.1.05.0007] [1.06.04.1.05.0008] [1.06.04.1.05.0009] [1.06.04.1.05.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

872	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	T	T	Dinas Sosial	[1.06.03.1.01.0001] [1.06.03.4.06.0001] [1.06.03.3.06.0001] [1.06.03.2.01.0001] [1.06.03.3.02.0001] [1.06.03.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
873	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.3.03.0001] [1.06.06.4.03.0001] [1.06.06.3.02.0002] [1.06.06.4.02.0002] [1.06.06.3.02.0001] [1.06.06.4.02.0001] [1.06.06.3.02.0003] [1.06.06.4.02.0003] [1.06.06.2.02.0001] [1.06.06.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

874	1.06.000178	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0003] [1.06.02.2.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
875	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

876	1.06.000182	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0014] [1.06.02.2.03.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
877	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0018] [1.06.02.2.03.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

878	1.06.000189	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0020] [1.06.04.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
879	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.2.01.0016] [1.06.04.1.02.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

880	1.06.000200	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkat	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.02.0011] [1.06.05.2.02.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
881	1.06.000201	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.02.0012] [1.06.05.2.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

882	1.06.000203	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	Pemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen kajian rawan konflik sosial.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0020] [1.06.06.2.02.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
883	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan OPD Urusan	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.2.02.0011] [1.06.06.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

884	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0018] [1.06.06.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
885	1.06.000206	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0022] [1.06.06.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

886	1.06.000207	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0015] [1.06.06.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
887	1.06.000208	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.1.01.0016] [1.06.06.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

888	1.06.000209	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantisipasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini meliputi kegiatan: 1) sosialisasi, 2) pembinaan/pelatihan, 3) simulasi, dan 4) pengadaan logistik kebencanaan untuk lumbung sosial	T	T	Dinas Sosial	[1.06.06.2.02.0005] [1.06.06.1.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
889	1.06.000211	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	Fasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamkan (perpustakaan, karya ilmiah, buku), ruang diorama, balai pelestarian, ruang temu ilmiah, dst.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.07.2.01.0005] [1.06.07.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

890	1.06.000212	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.07.1.01.0005] [1.06.07.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
891	1.06.000213	Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi berupa FGD/Rapat untuk mendapatkan informasi terkait dengan badan usaha-badan usaha yang ada di daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. serta untuk mewujudkan pemahaman yang sama dan sinergis antara pemerintah daerah dengan badan usaha serta untuk mengetahui partisipasi badan usaha-badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

892	1.06.000214	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi pengusulan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial daerah provinsi yang diusulkan mengikuti sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
893	1.06.000215	Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan mendapat Akreditasi	Lembaga	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi terkait pengusulan Lembaga Kesejahteraan Sosial daerah provinsi yang akan dilakukan akreditasi yaitu penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

894	1.06.000216	Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
895	1.06.000217	Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	Kegiatan ini untuk mendorong dan memfasilitasi penumbuhan dan penguatan Puskesos Kabupaten/Kota sebagai layanan sosial satu pintu dan hub Program Graduasi di daerah. Program Graduasi adalah serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif untuk mengatasi kondisi kemiskinan dan kerentanan sesuai karakteristik setempat dan difasilitasi melalui pendampingan langsung	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.2.03.0013] [1.06.02.1.02.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

896	1.06.000218	Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	Pemberian gelar adalah pemberian penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, damabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dan yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangda dan Negara Republik Indonesia.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
897	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.02.1.02.0011] [1.06.02.2.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

898	1.06.000220	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
899	1.06.000221	Anak Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.02.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

900	1.06.000222	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.03.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
901	1.06.000223	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.04.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

902	1.06.000224	Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten/Kota	Kegiatan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial bersumberdaya masyarakat (Lembaga Kesejahteraan Sosial) bagi Penyandang Disabilitas serta pembinaan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
903	1.06.000225	Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga kepada gelandangan dan pengemis di dalam panti berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	T	T	Dinas Sosial		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

904	1.06.000226	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran	Orang	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga kepadaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	T	T	Dinas Sosial		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
905	1.06.000227	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga kepadaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

906	1.06.000228	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
907	1.06.000229	Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	Kampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan, dan penanganan termasuk memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari nasional (Hari Anak, Hari Lanjut Usia Nasional, Disabilitas Internasional, dan lainnya). Perayaan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan tanggal 3 Desember sebagai hari Disabilitas Internasional, melalui kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Pemberian sembako, alat bantu dan sandang 3. Gerakan kampanye peduli lanjut usia dan disabilitas 4. Senam sehat 5. Pameran kerajinan 6. Kunjungan ke rumah lansia dan disabilitas 7. Lomba kreativitas 8. Apel hari Lansia dan Disabilitas	T	T	Dinas Sosial		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

908	1.06.000230	Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Orang	Ditujukan kepada unsur pemerintah daerah maupun masyarakat	T	T	Dinas Sosial	[1.06.04.1.05.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
909	1.06.000232	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	Merupakan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program keluarga harapan (PKH)	T	T	Dinas Sosial	[1.06.05.1.02.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

910	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
911	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.02.0003] [2.07.05.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

912	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang	Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.04.0001] [2.07.04.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
913	2.07.000008	Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh PPNS Ketenagakerjaan	Kasus	Perusahaan yang disidik merupakan perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.06.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

914	2.07.000009	Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3	Perusahaan	Objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diuji berasal dari rekomendasi pengawas ketenagakerjaan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.06.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
915	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, jaminan sosial, perempuan, anak, penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pesawat uap, bejana bertekanan, pesawat angkat angkut, lingkungan kerja, kesehatan kerja, konstruksi bangunan, penyalur petir, listrik, hygiene perusahaan, instalasi pemadam kebakaran, kebebasan berserikat, kesejahteraan, hubungan kerja.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.06.1.01.0001] [2.07.04.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

916	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
917	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

918	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
919	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus	Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.06.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

920	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.01.0003] [2.07.05.2.01.0003] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
921	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.02.0001] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

922	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.02.0001] [2.07.03.2.02.0001] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
923	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.02.0004] [2.07.05.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

924	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
925	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

926	2.07.000048	Mediator	Orang	PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.05.1.02.0001] [2.07.05.1.02.0002] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.05.2.02.0001] [2.07.05.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
927	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.1.02.0001] [2.07.03.3.03.0004] [2.07.03.4.03.0004] [2.07.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

928	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.01.0003] [2.07.04.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
929	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.04.1.03.0002] [2.07.04.1.03.0003] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.04.2.03.0002] [2.07.04.2.03.0003] [2.07.04.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

930	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
931	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

932	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.03.0003] [2.07.04.2.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
933	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.04.1.01.0002] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.04.2.01.0002] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

934	2.07.000069	Pengawas ketenagakerjaan	Orang	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
935	2.07.000070	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Proviinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.05.0001] [2.07.04.3.05.0002] [2.07.04.4.05.0002] [2.07.04.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

936	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.2.02.0002] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
937	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.01.0001] [2.07.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

938	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.01.0002] [2.07.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
939	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

940	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
941	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.02.0001] [2.07.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

942	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0003] [2.07.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
943	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

944	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.03.0005] [2.07.05.2.02.0005] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
945	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.01.0001] [2.07.05.1.01.0002] [2.07.05.1.01.0003] [2.07.05.1.02.0001] [2.07.05.1.02.0002] [2.07.06.1.01.0001] [2.07.06.1.01.0003] [2.07.05.2.01.0001] [2.07.05.2.01.0002] [2.07.05.2.01.0003] [2.07.05.2.02.0001] [2.07.05.2.02.0002] [2.07.05.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

946	2.07.000089	Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
947	2.07.000090	Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3	Perusahaan	Penerapan Norma K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

948	2.07.000091	Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3	Perusahaan	Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja (Sistem manajemen K3) SMK3	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
949	2.07.000092	Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3	Perusahaan	Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3)	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

950	2.07.000093	Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3*	Perusahaan	Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja wajib memenuhi Sistem Manajemen K3 (SMK3)	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
951	2.07.000094	Perush. yang diaudit SMK3	Perusahaan	Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dan telah di Audit oleh Lembaga Audit	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

952	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.01.0001] [2.07.04.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
953	2.07.000096	PMI Purna	Orang	Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.04.0004] [2.07.04.2.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

954	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	Orang	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.04.0001] [2.07.04.1.04.0003] [2.07.04.2.04.0001] [2.07.04.2.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
955	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.04.0001] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.03.2.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

956	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	Sarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.01.0003] [2.07.03.1.01.0004] [2.07.03.2.01.0003] [2.07.03.2.01.0006] [2.07.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
957	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.3.01.0006] [2.07.04.1.01.0006] [2.07.04.3.01.0005] [2.07.04.2.01.0004] [2.07.04.3.01.0008] [2.07.04.4.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

958	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.03.0005] [2.07.05.2.02.0005] [2.07.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
959	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.01.0005] [2.07.04.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

960	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
961	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.05.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

962	2.07.000122	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.05.0001] [2.07.04.3.05.0002] [2.07.04.4.05.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
963	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.01.0002] [2.07.03.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

964	2.07.000126	Perusahaan Menengah	Perusahaan	Perusahaan yang memperoleh Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas oleh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi, dan bidang pelatihan dan produktivitas pada Dinas Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di perusahaan berdasarkan Kepdirjen Binalattas Nomor 2/268/HK.05/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
965	2.07.000127	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga	Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.02.0002] [2.07.04.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

966	2.07.000128	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang	Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperolehÂ pekerjaanÂ sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, sertaÂ pelayananÂ kepada pengguna tenagaÂ kerjaÂ untuk memperoleh tenagaÂ kerjaÂ yang sesuai dengan kebutuhannya	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.01.0002] [2.07.04.1.01.0004] [2.07.04.1.01.0006] [2.07.04.3.01.0006] [2.07.04.3.01.0008] [2.07.04.3.01.0007] [2.07.04.2.01.0002] [2.07.04.2.01.0004] [2.07.04.3.01.0010] [2.07.04.4.01.0010] [2.07.04.3.01.0009] [2.07.04.4.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
967	2.07.000129	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[2.07.04.1.02.0001] [2.07.04.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

968	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.05.1.01.0001] [2.08.05.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
969	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.06.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

970	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.05.1.01.0002] [2.08.05.1.01.0003] [2.08.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
971	2.08.000016	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

972	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.01.0002] [2.08.07.1.01.0004] [2.08.07.1.01.0006] [2.08.07.1.01.0008] [2.08.07.1.01.0010] [2.08.07.1.01.0009] [2.08.07.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
973	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.04.1.03.0001] [2.08.04.1.01.0005] [2.08.04.1.01.0007] [2.08.04.1.01.0006] [2.08.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

974	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.02.0006] [2.08.07.1.02.0007] [2.08.07.1.02.0012] [2.08.07.1.02.0013] [2.08.07.1.02.0011] [2.08.07.1.02.0015] [2.08.07.1.02.0009] [2.08.07.1.02.0010] [2.08.07.1.02.0008] [2.08.07.1.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
975	2.08.000033	Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.02.1.03.0004] [2.08.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

976	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah provinsi.	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.04.1.02.0001] [2.08.04.1.02.0004] [2.08.04.1.02.0005] [2.08.04.1.02.0008] [2.08.04.1.02.0007] [2.08.04.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
977	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.02.1.02.0004] [2.08.02.1.02.0008] [2.08.02.1.02.0009] [2.08.02.1.02.0006] [2.08.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

978	2.08.000040	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.01.0003] [2.08.07.1.01.0005] [2.08.07.1.01.0001] [2.08.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
979	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di provinsi sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

980	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.02.1.01.0007] [2.08.02.1.03.0005] [2.08.02.1.03.0002] [2.08.02.2.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
981	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.03.1.02.0001] [2.08.03.1.02.0010] [2.08.03.1.02.0009] [2.08.03.1.02.0003] [2.08.03.1.02.0008] [2.08.03.1.02.0005] [2.08.03.1.02.0006] [2.08.03.1.02.0004] [2.08.03.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

982	2.08.000058	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.03.1.03.0002] [2.08.03.1.03.0009] [2.08.03.1.01.0005] [2.08.03.1.03.0005] [2.08.03.1.01.0004] [2.08.03.1.01.0003] [2.08.03.1.03.0007] [2.08.03.1.03.0006] [2.08.03.1.03.0008] [2.08.03.1.01.0007] [2.08.03.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
983	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi.	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.04.1.02.0002] [2.08.04.1.03.0006] [2.08.04.1.03.0002] [2.08.04.1.03.0003] [2.08.04.1.03.0005] [2.08.04.1.03.0004] [2.08.02.1.01.0011] [2.08.02.1.01.0010] [2.08.02.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

984	2.08.000062	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.03.0004] [2.08.02.1.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
985	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.02.1.01.0008] [2.08.02.1.03.0007] [2.08.02.1.01.0009] [2.08.02.1.02.0007] [2.08.02.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

986	2.08.000064	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.03.0005] [2.08.06.1.02.0009] [2.08.06.1.02.0008] [2.08.06.1.02.0011] [2.08.06.1.02.0012] [2.08.06.1.02.0010] [2.08.07.1.03.0012] [2.08.07.1.03.0011] [2.08.07.1.03.0010] [2.08.07.1.03.0009] [2.08.07.1.03.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
987	2.08.000065	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.07.1.03.0007] [2.08.07.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

988	2.08.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.08.06.1.01.0002] [2.08.06.1.01.0004] [2.08.06.1.01.0008] [2.08.06.1.01.0005] [2.08.06.1.01.0007] [2.08.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
989	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0002] [2.09.03.1.01.0007] [2.09.03.2.01.0002] [2.09.03.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

990	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.04.1.02.0004] [2.09.04.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
991	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	Laporan	Direktori Konsumsi pangan berisi data/informasi konsumsi pangan dan skor PPH wilayah disajikan antar tahun/time series	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0003] [2.09.03.1.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

992	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
993	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

994	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
995	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0011] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

996	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.1.01.0012] [2.09.03.2.01.0008] [2.09.03.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
997	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0012] [2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008] [2.09.03.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

998	2.09.000091	Jenis promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
999	2.09.000092	Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan koordinasi yang dihadiri oleh gubernur/wakil gubernur dan atau DPRD/OPD dalam rangka sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1000	2.09.000096	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, antara lain melalui kegiatan rumah pangan B2SA, fasilitasi pelaku usaha pengolah pangan lokal, promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA serta kegiatan sejenisyang mendukung.	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1001	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0011] [2.09.05.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1002	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1003	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1004	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1005	2.09.000104	Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan edukasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat/masyarakat umum	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1006	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.02.1.01.0006] [2.09.02.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1007	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	Dokumen	Jumlah izin edar PSAT PD untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1008	2.09.000111	Jumlah izin rumah pengemasan per tahun	Dokumen	Jumlah izin rumah pengemasan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1009	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0008] [2.09.03.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1010	2.09.000116	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan edukasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat/masyarakat umum	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1011	2.09.000118	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan volume pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1012	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1013	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0007] [2.09.03.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1014	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi berisikan data terkait jumlah pengadaan, jumlah yang dikelola dan jumlah yang disalurkan berdasarkan hasil koordinasi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1015	2.09.000126	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0001] [2.09.03.2.04.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1016	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan)	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.04.1.02.0005] [2.09.04.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1017	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.02.1.01.0003] [2.09.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1018	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.02.1.01.0003] [2.09.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1019	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0002] [2.09.03.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1020	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1021	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1022	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0003] [2.09.03.2.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1023	2.09.000146	Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada masyarakat umum	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1024	2.09.000147	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya kegiatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (gubernur/wakil gubernur/DPRD/OPD) dan atau dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1025	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota di desa/kelurahan rentan rawan pangan atau terdampak bencana	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.04.1.02.0002] [2.09.04.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1026	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.04.1.02.0003] [2.09.04.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1027	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	Sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan segar berupa sertikasi prima, sertifikasi organik, dan sertifikasi produk sesuai SNI yang diterbitkan dalam 1 tahun	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1028	2.09.000156	Jumlah health certificate (HC) per tahun	Dokumen	Jumlah health certificate (HC) untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1029	2.09.000157	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun	Dokumen	Jumlah SPPB-PSAT yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1030	2.09.000158	Rekomendasi Keamanan dan/atau Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1031	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0008] [2.09.05.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1032	2.09.000161	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	data pengembangan sektor pangan daerah provinsi berbasis pada sumber daya pertanian lokal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.3.01.0007] [2.09.03.4.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1033	2.09.000162	Data Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	&Data hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang memuat aspek: a. analisis b. perkiraan ketersediaan c. perkiraan kebutuhan d. dinamika harga dan e. dampak Krisis Pangan.&	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.3.02.0003] [2.09.03.4.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1034	2.09.000163	data cadangan pangan pemerintah provinsi	Dokumen	data cadangan pangan pemerintah provinsi, yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.3.02.0005] [2.09.03.4.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1035	2.09.000164	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	data pengembangan sektor pangan daerah provinsi berbasis pada sumber daya pertanian lokal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.3.02.0006] [2.09.03.4.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1036	2.09.000188	Data pelaku usaha pangan segar	Dokumen	Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.3.02.0001] [2.09.05.4.02.0001] [2.09.05.3.02.0001] [2.09.05.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1037	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1038	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1039	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.02.0004] [2.09.03.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1040	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.02.0005] [2.09.03.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1041	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.02.0006] [2.09.03.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1042	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.03.1.02.0007] [2.09.03.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1043	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.04.1.02.0004] [2.09.04.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1044	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.05.1.01.0010] [2.09.05.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1045	2.09.000254	Data Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	&Data hasil analisis: 1) Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang memuat aspek: a) analisis risiko, b) perkiraan ketersediaan Pangan, c) perkiraan kebutuhan Pangan, d) dinamika harga Pangan, dan e) dampak Krisis serta 2) Kajian Cepat Potensi Krisis Pangan yang memuat aspek: a) goegraphical, b) kondisi wilayah, c) dampak langsung dan d) dampak tidak langsung	T	T	Dinas Ketahanan Pangan	[2.09.04.1.02.0006] [2.09.04.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1046	2.10.000001	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.04.1.01.0002] [2.10.04.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1047	2.10.000005	Berita Acara koordinasi pemanfaatan tanah kosong	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pemanfaatan tanah kosong yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.08.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1048	2.10.000010	Berita acara rapat koordinasi penataan akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penataan akses dalam rangka Reforma Agraria yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1049	2.10.000011	Bidang tanah yang diredistribusi	Dokumen	Redistribusi tanah yang dilaksanakan melalui tahapan: 1. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan output notulensi 2. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah dengan output laporan 3. penetapan sebagai objek redistribusi tanah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1050	2.10.000020	Data inventarisasi penggunaan tanah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.10.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1051	2.10.000025	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Dokumen	Data lokasi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1052	2.10.000039	Dokumen fasilitasi penetapan zona nilai tanah	Dokumen	Laporan hasil failitasi penetapan zona nilai tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.10.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1053	2.10.000048	Dokumen koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	Dokumen	Laporan hasil koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1054	2.10.000079	Penetapan Gubernur	Dokumen	Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 Hari sejak diterimanya DPPT. Pendelegasian dilakukan melalui penetapan gubernur	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1055	2.10.000087	SK Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agaria	Dokumen	Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1056	2.10.000090	Surat persetujuan pemilik bidang tanah	Surat	Catatan resmi (rekomendasi) tentang persetujuan pemilik bidang tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.08.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1057	2.10.000092	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1058	2.10.000093	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	hasil rapat Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi berupa dokumen data sengketa konflik dan perkara dalam 1 daerah provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.04.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1059	2.10.000094	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan	hasil Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi berupa laporan pelaksanaan GTRA Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1060	2.10.000095	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	hasil Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi berupa berita acara pengusulan TORA	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1061	2.10.000096	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara	Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota berupa Berita Acara. Berita Acara merupakan dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.04.1.01.0004] [2.10.17.7.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1062	2.10.000097	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dari Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.04.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1063	2.10.000101	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Berita Acara	Hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara koordinasi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.08.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1064	2.10.000102	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1065	2.10.000104	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1066	2.10.000107	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	hasil Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa laporan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.07.3.02.0001] [2.10.07.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1067	2.10.000108	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa berita acara	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.07.3.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1068	2.10.000109	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan	hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa laporan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.07.3.02.0003] [2.10.07.4.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1069	2.10.000110	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.17.7.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1070	2.10.000113	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.17.7.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1071	2.10.000123	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.06.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1072	2.10.000136	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	Hasil Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.11.5.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1073	2.10.000137	umlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa Laporan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.11.5.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1074	2.10.000138	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.11.5.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1075	2.10.000141	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.11.5.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1076	2.10.000147	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.11.5.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1077	2.10.000178	Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Hasil dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa dokumen pemberitahuan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1078	2.10.000181	Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa dokumen hasil koordinasi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1079	2.10.000182	Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Mengumumkan Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum berupa surat pengumuman	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1080	2.10.000183	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	Hasil dari Kegiatan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa Dokumen Daftar Sementara Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1081	2.10.000185	Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan	Hasil Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa Laporan Konsultasi Publik	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1082	2.10.000188	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.3.01.0002] [2.10.03.3.04.0001] [2.10.03.4.01.0002] [2.10.03.4.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1083	2.10.000190	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	Hasil Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda berupa dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.13.7.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1084	2.10.000191	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.3.01.0002] [2.10.03.3.04.0001] [2.10.03.4.01.0002] [2.10.03.4.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1085	2.10.000192	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	Hasil pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB berupa Dokumen	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.13.7.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1086	2.10.000193	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Rencana Pengadaan Tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.3.01.0002] [2.10.03.3.04.0001] [2.10.03.4.01.0002] [2.10.03.4.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1087	2.10.000194	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	Hasil pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat berupa Dokumen hasil survei dan pengukuran.	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.13.7.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1088	2.10.000196	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.3.01.0002] [2.10.03.3.04.0001] [2.10.03.4.01.0002] [2.10.03.4.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1089	2.10.000197	Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.7.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1090	2.10.000200	Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN berupa Dokumen Kegiatan Koordinasi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.03.7.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1091	2.10.000204	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	Hasil Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa Laporan Penyelesaian	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.05.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1092	2.10.000205	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	Hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa Laporan Koordinasi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1093	2.10.000207	Laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan	Hasil Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	[2.10.05.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1094	2.11.000002	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1095	2.11.000003	Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Kabupaten/Kota	Tersedianya data daerah yang melakukan kerja sama dalam penanganan sampah di TPA/TPST Regional	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0006] [2.11.11.1.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1096	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1097	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1098	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1099	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1100	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi/ lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0001] [2.11.04.3.01.0009] [2.11.04.4.01.0009] [2.11.04.4.01.0008] [2.11.04.3.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1101	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.3.04.0001] [2.11.03.4.04.0001] [2.11.03.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1102	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data terkait pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1103	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1104	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1105	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1106	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1107	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup lintas kabupaten/kota yang mendukung pemenuhan RPPLH	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1108	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1109	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.06.3.02.0002] [2.11.03.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1110	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1111	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.07.1.02.0001] [2.11.07.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1112	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan pelaporan pelaksanaan RPPLH Provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1113	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0005] [2.11.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1114	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0001] [2.11.04.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1115	2.11.000045	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1116	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.10.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1117	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.02.0001] [2.11.03.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1118	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0003] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005] [2.11.06.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1119	2.11.000054	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1120	2.11.000055	Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1121	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1122	2.11.000059	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1123	2.11.000061	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional	Ton	1. Data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. Data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1124	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1125	2.11.000064	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1126	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0006] [2.11.04.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1127	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.07.1.01.0001] [2.11.07.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1128	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1129	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1130	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0010] [2.11.03.2.03.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1131	2.11.000082	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1132	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1133	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.1.01.0005] [2.11.10.2.01.0006] [2.11.10.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1134	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	Dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1135	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.07.1.01.0001] [2.11.07.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1136	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.1.03.0009] [2.11.03.2.03.0009] [2.11.03.2.03.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1137	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1138	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.08.1.01.0002] [2.11.08.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1139	2.11.000101	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.08.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1140	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1141	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.02.3.03.0001] [2.11.02.4.03.0001] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.02.3.02.0001] [2.11.02.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1142	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.08.1.01.0005] [2.11.08.1.01.0007] [2.11.08.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1143	2.11.000115	Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi	Lokasi	Data lokasi proklim di provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1144	2.11.000117	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1145	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1146	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.08.1.01.0003] [2.11.08.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1147	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.09.1.01.0001] [2.11.09.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1148	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.09.1.01.0001] [2.11.09.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1149	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1150	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1151	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1152	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1153	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1154	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.08.1.01.0002] [2.11.08.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1155	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.10.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1156	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1157	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1158	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1159	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	Data PPLHD yang aktif	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1160	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1161	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1162	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1163	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0009] [2.11.03.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1164	2.11.000166	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Unit	1. Tersedianya data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Tersedianya Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. tersedianya data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1165	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006] [2.11.06.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1166	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1167	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0004] [2.11.03.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1168	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1169	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1170	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0004] [2.11.02.1.01.0006] [2.11.02.2.01.0004] [2.11.02.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1171	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. Data jumlah kebijakan yang disusun 3. Data jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1172	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.01.0005] [2.11.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1173	2.11.000196	Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1174	2.11.000199	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1175	2.11.000202	Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1176	2.11.000203	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1177	2.11.000204	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0005] [2.11.02.3.02.0001] [2.11.02.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1178	2.11.000210	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1179	2.11.000212	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1180	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0006] [2.11.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1181	2.11.000219	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1182	2.11.000222	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1183	2.11.000223	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1184	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0010] [2.11.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1185	2.11.000225	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0009] [2.11.03.2.03.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1186	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1. tersedianya data jumlah daerah 2. tersedianya data potensi timbulan sampah daerah 3. tersedianya data jumlah/prosentase sampah tidak terkelola di setiap daerah (kabupaten/kota)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1187	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0008] [2.11.03.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1188	2.11.000233	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1189	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0006] [2.11.03.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1190	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1191	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.08.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1192	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.2.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1193	2.11.000258	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1194	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Tersedianya data: a. pembuatan KLHS meliputi SK Tim, Pengkajian TPB, Perumusan Skenario, Penjaminan Kualitas. b. pelaksanaan KLHS meliputi integrasi ke dalam RAD TPB dan dokumen perencanaan RPJMD	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1195	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0009] [2.11.03.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1196	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0012] [2.11.03.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1197	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0012] [2.11.03.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1198	2.11.000291	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan		Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan RPPLH dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.3.01.0003] [2.11.02.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1199	2.11.000293	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang diawsi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi		Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diawasi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.3.02.0001] [2.11.06.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1200	2.11.000294	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup		data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1201	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0013] [2.11.11.1.01.0015] [2.11.11.2.01.0029]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1202	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0016] [2.11.03.2.03.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1203	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.01.0017] [2.11.03.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1204	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.1.02.0004] [2.11.03.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1205	2.11.000304	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi pengintegrasian)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1206	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1207	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1208	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.03.2.03.0015] [2.11.03.1.03.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1209	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.05.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1210	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1211	2.11.000334	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Data Laporan Induk/Catatan Hasil Asistensi KLHS Kab/Kota yang dilakukan pembinaan serta Berita Acara Verifikasi Integrasi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.02.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1212	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.05.1.01.0004] [2.11.05.2.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1213	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.05.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1214	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.1.01.0010] [2.11.10.2.01.0006] [2.11.10.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1215	2.11.000356	Data jumlah tonase sampah sungai/DAS provinsi yang ditangani	Ton	Data jumlah sampah sungai/DAS provinsi yang diangkut dan ditangani oleh provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1216	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0005] [2.11.11.1.01.0007] [2.11.11.1.01.0011] [2.11.11.1.01.0012] [2.11.11.2.01.0003] [2.11.11.2.01.0004] [2.11.11.2.01.0005] [2.11.11.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1217	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[2.11.11.1.01.0005] [2.11.11.1.01.0007] [2.11.11.1.01.0011] [2.11.11.2.01.0004] [2.11.11.2.01.0007] [2.11.11.2.01.0009] [2.11.11.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1218	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	Desa	Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan adalah dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengawasan desa adalah untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu: a. kepala b. perangkat c. kelompok kerja Pendataan d. tim penyusun RPJM e. tim penyusunan RKP f. panitia pengadaan barang dan jasa di dan g. tim Pelaksana Kegiatan Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.	T	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	[2.13.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1219	2.13.000070	Sanggar PKK di Kampung	Unit		T	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	[2.13.07.4.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1220	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	T	T	DP3AP2KB JATENG	[2.14.02.1.01.0021] [2.14.02.1.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1221	2.14.000006	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.02.0003] [2.14.04.1.02.0007] [2.14.04.1.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1222	2.14.000010	Daerah/Instansi/Stakeholder yang telah menerima Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Laporan	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja yang dilaksanakan oleh Daerah	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.01.0020] [2.14.04.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1223	2.14.000020	Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi	Kegiatan	Lintas sektor yang memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1224	2.14.000023	Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Bangga Kencana yang telah diserasikan	Dokumen	Daerah menyerasikan kebijakan- kebijakan yang ada terhadap Bangga Kencana	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0017] [2.14.02.1.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1225	2.14.000032	Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Program Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1226	2.14.000039	Kampung KB yang telah menerima Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga	Kampung KB	Daerah Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.02.0006] [2.14.04.3.01.0016] [2.14.04.4.01.0016] [2.14.04.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1227	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.4.01.0016] [2.14.04.4.01.0018] [2.14.03.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1228	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.2.01.0026]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1229	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.3.01.0017] [2.14.04.4.01.0017] [2.14.04.2.01.0015] [2.14.04.2.01.0028]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1230	2.14.000055	Materi dan Sarana Promosi, KIE Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang telah memiliki Materi Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang Sesuai Kearifan Budaya Lokal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1231	2.14.000059	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.01.0007] [2.14.04.3.03.0001] [2.14.04.4.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1232	2.14.000060	Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1233	2.14.000062	Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah menerima fasilitasi peningkatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.02.0008] [2.14.04.3.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1234	2.14.000076	Organisasi yang telah mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1235	2.14.000079	Organisasi yang telah Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	Daerah yang mengembangkan dan menguatkan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.02.0004] [2.14.02.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1236	2.14.000082	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0024] [2.14.02.1.01.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1237	2.14.000083	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA), Jalur Nonformal dan Informal (Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat)	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1238	2.14.000085	Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Kegiatan	Daerah (Provinsi) Melaksanakan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA), Nonformal dan Informal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0016] [2.14.02.1.01.0027]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1239	2.14.000096	Penyediaan & Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0005] [2.14.02.1.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1240	2.14.000097	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengmbangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1241	2.14.000101	PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.01.0018] [2.14.04.4.03.0001] [2.14.04.3.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1242	2.14.000102	PIK-R yang telah menerima/mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kelompok di Kampung KB	Organisasi	Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB yang mendapat fasilitasi	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1243	2.14.000103	PIK-R yang telah mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana	Organisasi	Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pelatihan/Orientasi /Workshop	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.04.1.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1244	2.14.000114	Strategi Operasional Advokasi, Promosi yang telah Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah yang telah menetapkan Strategi Advokasi, Promosi dan KIE yang dikembangkan sesuai Kearifan Lokal	T	T	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	[2.14.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1245	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.1.07.0014] [2.15.02.2.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1246	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1247	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1248	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1249	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1250	2.15.000009	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0015] [2.15.02.2.08.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1251	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1252	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) Terminal	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1253	2.15.000021	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki paling sedikit 5 (lima) b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dan c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.14.0004] [2.15.02.1.14.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1254	2.15.000024	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	Unit	Fasilitas pokok antara lain berupa: a. b. gudang lini c. lapangan penumpukan lini d. Terminal e. Terminal peti f. Terminal curah g. Terminal curah h. Terminal ro- i. car j. Terminal k. fasilitas penampungan dan pengelolaan l. fasilitas m. fasilitas pemadam n. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu dan p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi Fasilitas penunjang berupa: a. kawasan b. fasilitas pos dan c. fasilitas pariwisata dan d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase, dan g. areal pengembangan h. tempat tunggu kendaraan i. kawasan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.09.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1255	2.15.000025	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia	Unit	Fasilitas pokok meliputi: a. b. lapangan c. terminal d. fasilitas penampungan dan pengolahan e. fasilitas f. fasilitas pemadam dan g. fasilitas penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3). Selain fasilitas pokok rencana peruntukan wilayah daratan juga disusun berdasarkan kebutuhan: a. penimbangan kendaraan bermuatan untuk angkutan b. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way); c. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa Pelabuhan, termasuk fasilitas untuk kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan di d. instalasi air bersih, listrik, dan e. akses jalan dan/atau jalur kereta dan f. tempat tunggu atau lapangan parkir kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. Fasilitas penunjang meliputi: a. b. fasilitas pos dan c. fasilitas d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0009] [2.15.03.2.13.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1256	2.15.000030	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.12.0001] [2.15.02.1.12.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1257	2.15.000031	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.12.0002] [2.15.02.1.12.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1258	2.15.000032	Data Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.13.0001] [2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.1.15.0001] [2.15.03.1.14.0001] [2.15.03.1.16.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1259	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.08.0003] [2.15.03.2.11.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1260	2.15.000037	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1261	2.15.000039	Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1262	2.15.000041	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.08.0003] [2.15.02.1.08.0002] [2.15.02.1.09.0001] [2.15.02.1.09.0002] [2.15.02.1.11.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1263	2.15.000046	Data Audit Terminal	Dokumen	Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0003] [2.15.02.1.07.0004] [2.15.02.2.08.0003] [2.15.02.2.08.0004] [2.15.02.2.08.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1264	2.15.000048	Data auditor LLAJ Provinsi	Dokumen	(1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan. (2) Pembina jalan terdiri dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, untuk jalan b. gubernur, untuk jalan dan c. bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1265	2.15.000053	Data dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dokumen Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.10.0005] [2.15.02.1.10.0001] [2.15.02.1.11.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1266	2.15.000058	Data dokumen perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Pekerjaan pengerukan harus mendapat izin dari: a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Untuk memperoleh lzin pengerukan, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi: 1. akte pendirian 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili dan 4. keterangan penanggungjawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan 3. peta pengukuran kedalaman awal	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.15.0001] [2.15.03.1.15.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1267	2.15.000062	Data dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.10.0001] [2.15.02.1.10.0005] [2.15.02.1.11.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1268	2.15.000066	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0010] [2.15.02.1.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1269	2.15.000070	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0007] [2.15.02.1.03.0010] [2.15.02.3.16.0001] [2.15.02.4.16.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1270	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0011] [2.15.02.6.04.0004] [2.15.02.2.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1271	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0003] [2.15.02.1.07.0004] [2.15.02.2.08.0003] [2.15.02.2.08.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1272	2.15.000076	Data Inspektor LLAJ provinsi	Dokumen	1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan : a. unsur dan b. unsur teknis 2. Unsur administrasi meliputi: a. SIM umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan b. STNK yang masih berlaku sesuai dengan fisik kendaraan c. Bujti lulus uji berkala yang masih berlaku d. kartu pengawasan yang masih berlaku 3. unsur teknis meliputi: a. unsur teknis utama b. unsur teknis penunjang 4. Unsur teknis inspeksi tercantum dalam lampiran III SK Dirjen 5637 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1273	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan Iintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan: - antarkota - antarkota antarprovinsi - antarkota dalam dan - antarkota dalam kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - menghubungkan beberapa stasiun - tidak menyediakan layanan penumpang - melayani penumpang tidak - memiliki jarak dan atau waktu tempuh e. memiliki frekuensi keretaapi sedang atau dan f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota&	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.1.06.0001] [2.15.05.2.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1274	2.15.000081	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.10.0002] [2.15.02.1.11.0002] [2.15.02.1.13.0001] [2.15.02.1.13.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1275	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0015] [2.15.02.2.05.0003] [2.15.02.2.08.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1276	2.15.000091	Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1277	2.15.000093	Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1278	2.15.000095	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan: a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam dan b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen b. dokumen c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab d. jenis e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan f. tanda identitas Perusahaan Angkutan dan g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor b. fisik Kendaraan Bermotor dan c. Standar Pelayanan Minimal.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.14.0003] [2.15.02.1.15.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1279	2.15.000096	Data Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Pekerjaan pengerukan harus mendapat izin dari: a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Untuk memperoleh lzin pengerukan, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi: 1. akte pendirian 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili dan 4. keterangan penanggungjawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan 3. peta pengukuran kedalaman awal	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.14.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1280	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.05.0004] [2.15.03.2.06.0004] [2.15.03.2.07.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1281	2.15.000101	Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi dilakukan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi. Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.13.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1282	2.15.000104	Data Laporan perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban: a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian c. memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang e. melaporkankegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar dan f. melaksanakan kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.15.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1283	2.15.000107	Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1284	2.15.000111	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan pelayanan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.1.06.0002] [2.15.05.2.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1285	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.05.0003] [2.15.04.3.03.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.06.0014] [2.15.04.3.05.0003] [2.15.04.4.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1286	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.05.0003] [2.15.04.3.03.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.06.0014] [2.15.04.4.05.0003] [2.15.04.3.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1287	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.05.0003] [2.15.04.3.03.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.06.0014] [2.15.04.3.05.0003] [2.15.04.4.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1288	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0001] [2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.1.05.0007] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.02.0001] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.2.02.0004] [2.15.02.2.06.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1289	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.05.0007] [2.15.02.2.06.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1290	2.15.000152	Data Perusahaan angkutan Umum provinsi	Dokumen	Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1291	2.15.000154	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0001] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.09.0001] [2.15.02.1.11.0001] [2.15.05.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1292	2.15.000155	Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1293	2.15.000157	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan d. penyusunan rencana umum jaringan jalan e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang g. pembangunan Simpul dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0006] [2.15.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1294	2.15.000171	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B	Dokumen	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1295	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0010] [2.15.02.6.04.0008] [2.15.02.2.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1296	2.15.000175	Data Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0010] [2.15.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1297	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0003] [2.15.02.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1298	2.15.000182	Dokumen kebijakan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah di tetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.08.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1299	2.15.000185	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.09.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1300	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.05.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1301	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.06.0003] [2.15.02.2.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1302	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.06.0004] [2.15.02.1.06.0003] [2.15.02.2.07.0006] [2.15.02.2.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1303	2.15.000198	Izin Lingkungan sesuai denganketentuan perundang-undangan	Dokumen		T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.1.10.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1304	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.07.0002] [2.15.03.2.09.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1305	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	Kebutuhan angkutan (demand) meliputi: 1. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan pergerakan barang total di Pelabuhan Sungai dan Danau. 2. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan angkutan penumpang, angkutan kendaraan R2 (roda dua) dan R4 (roda empat) di Pelabuhan Sungai dan Danau.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1306	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	Supply Angkutan Sungai dan Danau adalah penyediaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau, memenuhi SPM, serta memiliki Trayek Tetap dan Teratur dan/atau Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sesuai PM 61 Tahun 2021.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1307	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1308	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1309	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1310	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1311	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan penunjang mobilitas penduduk di wilayah tersebut.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1312	2.15.000229	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Region	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.08.0003] [2.15.03.1.08.0002] [2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.1.09.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1313	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan yang ditetapkan dengan KP 432 Tahun 2017	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.1.08.0001] [2.15.03.1.10.0002] [2.15.03.1.12.0001] [2.15.03.3.08.0004] [2.15.03.4.08.0004] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.10.0001] [2.15.03.2.11.0001] [2.15.03.2.12.0001] [2.15.03.2.13.0001] [2.15.03.2.15.0001] [2.15.03.2.13.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1314	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1315	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1316	2.15.000250	Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	RAK LLAJ Provinsi , memuat: a. sasaran Pemerintah b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian / c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah d. Rencana aksi dan target dan e. rencana pendanaan. RAK LLAJ Provinsi , disusun berdasarkan: a. RUNK b. RAK LLAJ Kementerian/ dan c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1317	2.15.000254	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), merupakan wilayah daratan dan / atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), terdiri atas: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas b. kawasan kemungkinan bahaya c. kawasan di bawah permukaan d. kawasan di bawah permukaan horizontal- e. kawasan di bawah permukaan dan f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.01.0004] [2.15.04.4.01.0004] [2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001] [2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.4.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1318	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.05.0004] [2.15.02.2.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1319	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.06.0005] [2.15.02.2.07.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1320	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	Semua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing dengan rincian paling sedikit: 1. Pengemudi ....orang. 2. Pengemudi cadangan .... orang. 3. Kondektur.... orang. 4. Pembantu pengemudi .... orang. 5. Mekanik....orang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0010] [2.15.02.2.06.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1321	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.07.0011] [2.15.02.2.06.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1322	2.15.000270	Halte	Unit	Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0001] [2.15.02.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1323	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.2.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1324	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	Dokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.2.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1325	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1326	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0003] [2.15.02.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1327	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.03.0001] [2.15.04.4.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1328	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0007] [2.15.02.2.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1329	2.15.000290	Data jumlah barang	Unit	Jumlah barang adalah banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan pengguna jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1330	2.15.000291	Data jumlah penumpang	Orang	Jumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api dan memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1331	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat : 1. trayek dan 2. jadwal kedatangan dan 3. 4. dan 5. asal dan tujuan pelayanan trayek.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0008] [2.15.02.6.04.0007] [2.15.02.2.03.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1332	2.15.000295	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	Data kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.01.0003] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1333	2.15.000296	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	Dokumen penetapan lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1334	2.15.000301	persetujuan lingkungan	Dokumen	Persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005] [2.15.04.4.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1335	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.03.0009] [2.15.02.6.04.0009] [2.15.02.2.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1336	2.15.000313	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	Data perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.01.0003] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1337	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.01.0001] [2.15.03.1.02.0001] [2.15.03.2.01.0001] [2.15.03.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1338	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.02.0001] [2.15.03.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1339	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1340	2.15.000331	Data jumlah dan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.16.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1341	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.16.0001] [2.15.03.2.19.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1342	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1343	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1344	2.15.000345	Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Regulasi	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.3.10.0006] [2.15.03.4.10.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1345	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.03.0002] [2.15.03.2.03.0002] [2.15.03.2.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1346	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0002] [2.15.03.2.13.0002] [2.15.03.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1347	2.15.000352	Data badan usaha yang telah memperolah izin dari Gubernur untuk Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan dan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi. Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan. Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan angkutan laut atau penyewaan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang dapat mencakup	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1348	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0009] [2.15.03.2.13.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1349	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0009] [2.15.03.1.10.0001] [2.15.03.2.13.0011] [2.15.03.2.04.0001] [2.15.03.2.11.0002] [2.15.03.2.11.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1350	2.15.000370	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pengumpan regional dan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Pelabuhan, serta Dokumen (P3D) administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.09.0001] [2.15.03.1.09.0003] [2.15.03.1.09.0004] [2.15.03.1.09.0005] [2.15.03.1.12.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1351	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Pengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0003] [2.15.03.2.13.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1352	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Surat keputusan penetapan trayek/lintas merupakan salah satu syarat adminitrasi permohonan pembangunan pelabuhan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0001] [2.15.03.2.13.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1353	2.15.000377	Data jumlah izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan	Unit	Fasilitas Pelabuhan terdiri Jenis, Jumlah dan Kondisi dari Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.10.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1354	2.15.000378	Unit Penyelengggara Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.09.0004] [2.15.03.1.09.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1355	2.15.000379	Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	Pengawasan sebagaimana meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.03.1.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1356	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	Rencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.01.0007] [2.15.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1357	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.4.02.0004] [2.15.04.3.03.0004] [2.15.04.4.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1358	2.15.000398	Rencana Tata Ruang Wialayah	Dokumen	Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antarpulau dan antarprovinsi, serta keterkaitan antarkawasan kabupaten / kota.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.05.0002] [2.15.04.4.05.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1359	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	Dalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan Pengawasan dilakukan dalam bentuk: a. b. c. pengamatan (Surveillance); d. pemantauan (Monitoring); dan/atau e. pengujian (test).	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.03.0004] [2.15.04.4.03.0004] [2.15.04.3.05.0004] [2.15.04.4.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1360	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian	Laporan	Dalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkeretaapian	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.04.3.08.0002] [2.15.05.4.09.0002] [2.15.05.3.06.0002] [2.15.05.4.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1361	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1362	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	Berfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1363	2.15.000413	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	Alat pendeteksi rintang jalan di perlintasan sebidang, untuk menginformasikan kepada Masinis (ASP) yang akan melintas di perlintasan melihat Cahaya/Emergency untuk segera mem perlam bat kecepatan dan berhenti sebelum titik perlintasan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1364	2.15.000414	Pos Jaga	Unit	Bangunan Pos yang digunakan sebagai tempat untuk operasional Petugas JPL dalam menjalankan tugas.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1365	2.15.000415	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	T	T	Dinas Perhubungan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1366	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1367	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1368	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1369	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1370	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	T	T	Dinas Perhubungan	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1371	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.01.0004] [2.16.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1372	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.01.0004] [2.16.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1373	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1374	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1375	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1376	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0013] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0017] [2.16.03.2.02.0039] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1377	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0029] [2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.2.02.0016] [2.16.03.2.02.0033]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1378	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0029] [2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.2.02.0016] [2.16.03.2.02.0033]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1379	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.1.02.0020] [2.16.03.2.02.0033] [2.16.03.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1380	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0020] [2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.2.02.0033] [2.16.03.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1381	2.16.000082	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi - Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0030] [2.16.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1382	2.16.000084	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota	-Perhitungan Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah melalui tahapan : a.Pemerintah Daerah mengajukan pertimbangan kelaikan operasi kepada Menteri dan mengajukan pertimbangan kelaikan keamanan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan b.pengajuan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui portal resmi yang diselenggarakan oleh Menteri dengan melampirkan surat permohonan pertimbangan kelaikan operasi dan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala c.Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan evaluasi mandiri atas jaringan intra Pemerintah Daerah yang dikelolanya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh d.Menteri melakukan penilaian kelaikan operasi berdasarkan	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1383	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1384	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1385	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1386	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1387	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1388	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1389	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0017] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0032] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1390	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0017] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0032] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1391	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0027] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0029] [2.16.03.2.02.0032] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1392	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1393	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1394	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1395	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1396	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1397	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1398	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0023] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0019] [2.16.03.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1399	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0023] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0019] [2.16.03.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1400	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0028] [2.16.03.3.01.0015] [2.16.03.4.01.0015] [2.16.03.1.02.0035] [2.16.03.2.02.0028] [2.16.03.3.02.0015] [2.16.03.4.02.0015] [2.16.03.2.02.0035]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1401	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0024] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0026] [2.16.03.2.02.0037]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1402	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1403	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1404	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1405	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. Satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 - 7]	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1406	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0019] [2.16.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1407	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola - Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0019] [2.16.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1408	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1409	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1410	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1411	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginka	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1412	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1413	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1414	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1415	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1416	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0018] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1417	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1418	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1419	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1420	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0021] [2.16.02.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1421	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1422	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1423	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1424	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1425	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0016] [2.16.02.2.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1426	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0016] [2.16.02.2.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1427	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	-Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0020] [2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0016] [2.16.02.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1428	2.16.000156	Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Unit	- Perhitungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah -Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1429	2.16.000157	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	kabupaten/kota	-Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan Sosialisasi program Provinsi Cerdas -Sosialisasi program Provinsi Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan provinsi cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah kota/kabupaten yang berada pada wilayah provinsi .	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0018] [2.16.03.3.01.0013] [2.16.03.3.01.0014] [2.16.03.4.01.0013] [2.16.03.4.01.0014] [2.16.03.1.02.0031]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1430	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1431	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat. - pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan - data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.2.02.0036] [2.16.03.2.02.0030]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1432	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1433	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1434	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Unit Usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.03.1.02.0002] [2.17.04.1.01.0003] [2.17.03.2.01.0003] [2.17.03.2.01.0004] [2.17.04.2.01.0001] [2.17.04.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1435	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.04.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0005] [2.17.05.1.01.0001] [2.17.04.2.01.0003] [2.17.05.2.01.0001] [2.17.06.2.01.0006] [2.17.06.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1436	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.03.1.02.0002] [2.17.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1437	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.08.1.01.0001] [2.17.08.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1438	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.08.1.01.0001] [2.17.08.2.01.0001] [2.17.08.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1439	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.07.1.01.0001] [2.17.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1440	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003] [2.17.07.3.02.0001] [2.17.07.4.02.0001] [2.17.09.3.02.0001] [2.17.09.4.01.0001] [2.17.09.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1441	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1442	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	Unit Usaha	Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0009] [2.17.07.1.01.0003] [2.17.07.1.01.0004] [2.17.07.1.01.0005] [2.17.07.1.01.0006] [2.17.07.1.01.0007] [2.17.07.1.01.0008] [2.17.07.1.01.0009] [2.17.07.1.01.0010] [2.17.07.1.01.0011] [2.17.07.1.01.0012] [2.17.08.1.01.0003] [2.17.08.1.01.0004] [2.17.08.1.01.0005] [2.17.08.1.01.0006] [2.17.08.3.02.0001] [2.17.08.4.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1443	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0002] [2.17.09.3.02.0001] [2.17.03.2.01.0003] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1444	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.1.01.0008] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1445	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0009] [2.17.06.1.01.0007] [2.17.09.3.01.0001] [2.17.09.4.01.0001] [2.17.06.2.01.0009] [2.17.09.4.01.0001] [2.17.09.3.01.0001] [2.17.03.2.01.0003] [2.17.06.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1446	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0009] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1447	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003] [2.17.08.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1448	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1449	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	T	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	[2.17.06.1.01.0006] [2.17.08.4.02.0001] [2.17.06.2.01.0004] [2.17.07.2.01.0002] [2.17.07.2.01.0014] [2.17.07.3.04.0001] [2.17.07.4.04.0001] [2.17.08.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1450	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.05.1.01.0006] [2.18.05.2.01.0005] [1.01.02.3.06.0057] [1.01.02.4.05.0069] [1.01.02.3.05.0072] [1.01.02.4.06.0059]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1451	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.06.1.01.0002] [2.18.04.1.01.0001] [2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.02.0001] [2.18.04.1.02.0007] [2.18.06.1.01.0001] [2.18.06.2.01.0002] [2.18.06.2.01.0001] [2.18.04.2.01.0001] [2.18.04.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1452	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0001] [2.18.04.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1453	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.06.1.01.0002] [2.18.06.3.02.0001] [2.18.06.4.02.0001] [2.18.07.3.01.0001] [2.18.07.3.02.0001] [2.18.07.4.01.0001] [2.18.07.4.02.0001] [2.18.04.2.01.0006] [2.18.06.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1454	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0008] [2.18.04.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1455	2.18.000008	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1456	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Sistem Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.02.0007] [2.18.07.3.02.0002] [2.18.07.4.02.0002] [2.18.02.4.06.0001] [2.18.02.3.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1457	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.01.0008] [2.18.04.1.02.0006] [2.18.04.2.01.0006] [2.18.04.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1458	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.02.0001] [2.18.04.1.01.0005] [2.18.02.2.02.0001] [2.18.04.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1459	2.18.000019	Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.	Dokumen	Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1460	2.18.000020	Peraturan daerah tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	&Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal &	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1461	2.18.000022	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1462	2.18.000023	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1463	2.18.000024	Peraturan daerah/Provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0005] [2.18.04.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1464	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.04.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1465	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001] [2.18.02.2.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1466	2.18.000033	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1467	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.05.1.01.0005] [2.18.05.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1468	2.18.000035	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1469	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.01.0004] [2.18.02.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1470	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.02.1.01.0004] [2.18.02.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1471	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1472	2.18.000039	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1473	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1474	2.18.000044	Dokumen promosi penanaman modal	Dokumen	Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri	T	T	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[2.18.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1475	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.01.0003] [2.19.02.1.01.0008] [2.19.02.1.01.0011] [2.19.02.1.01.0012] [2.19.02.2.01.0003] [2.19.02.2.01.0013] [2.19.02.2.01.0014] [2.19.02.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1476	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.01.0008] [2.19.02.1.01.0011] [2.19.02.1.01.0012] [2.19.02.1.01.0013] [2.19.02.2.01.0001] [2.19.02.2.01.0010] [2.19.02.2.01.0013] [2.19.02.2.01.0014] [2.19.02.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1477	2.19.000066	Pemuda wirausaha muda	Orang	Wirausaha muda usia 16-30 tahun yang memiliki Nomor Induk NIB untuk difasilitasi agar terafiliasi dengan dunia usaha	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.01.0008] [2.19.02.1.01.0009] [2.19.02.1.01.0011] [2.19.02.1.01.0015] [2.19.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1478	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.01.0010] [2.19.02.2.01.0007] [2.19.02.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1479	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.02.0001] [2.19.02.1.02.0003] [2.19.02.1.02.0004] [2.19.02.2.01.0007] [2.19.02.2.02.0001] [2.19.02.2.02.0002] [2.19.02.2.02.0003] [2.19.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1480	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.01.0005] [2.19.02.2.01.0006] [2.19.02.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1481	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.02.0004] [2.19.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1482	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.02.1.01.0014] [2.19.02.1.01.0015] [2.19.02.2.01.0002] [2.19.02.2.01.0010] [2.19.02.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1483	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.03.0001] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.1.03.0009] [2.19.03.2.03.0001] [2.19.03.2.03.0006] [2.19.03.2.03.0008] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.05.0010] [2.19.03.4.01.0003] [2.19.03.2.04.0005] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1484	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.03.0001] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.03.0001] [2.19.03.2.03.0006] [2.19.03.2.03.0008] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.04.0005] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1485	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.01.0002] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.3.05.0001] [2.19.03.4.05.0001] [2.19.03.2.01.0006] [2.19.03.2.02.0006] [2.19.03.3.01.0003] [2.19.03.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1486	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.02.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.3.05.0001] [2.19.03.4.05.0001] [2.19.03.2.02.0002] [2.19.03.2.02.0004] [2.19.03.2.02.0006] [2.19.03.2.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1487	2.19.000079	kompetisi/kejuaraan multi event	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga / Pekan olahraga Daerah pada berbagai cabang olahraga (PORDA)	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.02.0004] [2.19.03.1.02.0006] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.3.05.0001] [2.19.03.4.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1488	2.19.000080	kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan paralimpik di tingkat provinsi (PERPARPROV)	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.02.0004] [2.19.03.1.02.0005] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.3.05.0001] [2.19.03.4.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1489	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.03.0006] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.03.0004] [2.19.03.2.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1490	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.03.0006] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.1.04.0001] [2.19.03.1.04.0002] [2.19.03.1.04.0003] [2.19.03.1.04.0005] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.04.0004] [2.19.03.2.04.0005] [2.19.03.2.04.0006] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1491	2.19.000083	wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.03.0006] [2.19.03.2.04.0004] [2.19.03.2.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1492	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.01.0001] [2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0007] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0004] [2.19.03.2.03.0008] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.04.0006] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1493	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1494	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1495	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.02.0005] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.05.0003] [2.19.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1496	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1497	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.04.1.01.0001] [2.19.04.1.01.0002] [2.19.04.2.01.0002] [2.19.04.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1498	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.04.1.01.0001] [2.19.04.1.01.0003] [2.19.04.2.01.0003] [2.19.04.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1499	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	T	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	[2.19.04.1.01.0001] [2.19.04.1.01.0005] [2.19.04.1.01.0008] [2.19.04.2.01.0005] [2.19.04.2.01.0008] [2.19.04.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1500	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.2.01.0010] [2.20.02.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1501	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0011] [2.20.02.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1502	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1503	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1504	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.2.01.0008] [2.20.02.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1505	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0018] [2.20.02.2.01.0021] [2.20.02.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1506	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.2.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1507	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.2.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1508	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1509	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1510	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1511	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.2.01.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1512	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.20.02.1.01.0021] [2.20.02.2.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1513	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.01.0001] [2.21.02.1.01.0008] [2.21.02.2.01.0001] [2.21.02.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1514	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.01.0001] [2.21.02.1.01.0008] [2.21.02.2.01.0001] [2.21.02.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1515	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.01.0002] [2.21.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1516	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.01.0003] [2.21.02.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1517	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Provinsi	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.01.0002] [2.21.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1518	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.01.0004] [2.21.02.1.01.0006] [2.21.02.2.01.0004] [2.21.02.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1519	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	T	T	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	[2.21.02.1.02.0001] [2.21.02.1.02.0002] [2.21.02.2.02.0001] [2.21.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1520	2.22.000001	Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dokumen	- Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. - Media Luar ruangan : Media Luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang ditempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya.	T	T		[2.22.07.7.01.0006] [2.22.07.7.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1521	2.22.000002	Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	- Arsip : Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. - Sejarah : Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu umat manusia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1522	2.22.000003	Budayawan yang mendapatkan penghargaan	Orang	- Budayawan : Budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. - Penghargaan : Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0004] [2.22.08.5.07.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1523	2.22.000004	Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Buku	- Buku : Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. - Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.03.0004] [2.22.07.7.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1524	2.22.000005	Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Buku	- Buku : Buku adalah karya tulis danjatau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.01.0005] [2.22.07.7.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1525	2.22.000006	Cagar Budaya yang dilakukan pengamanan	Unit	- Cagar Budaya : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. - Pengamanan : Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu dan/ atau membahayakan keselamatan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1526	2.22.000007	Cagar Budaya yang dipelihara	Unit	- Cagar Budaya : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.01.0001] [2.22.05.1.01.0002] [2.22.05.1.02.0001] [2.22.05.1.02.0002] [2.22.05.1.02.0003] [2.22.05.1.02.0004] [2.22.05.1.03.0001] [2.22.05.1.03.0002] [2.22.05.3.01.0005] [2.22.05.3.01.0006] [2.22.05.3.01.0007] [2.22.05.3.03.0003] [2.22.08.5.04.0002] [2.22.02.3.01.0004] [2.22.02.4.01.0004] [2.22.05.3.01.0005] [2.22.05.3.01.0006] [2.22.05.3.02.0004] [2.22.05.3.04.0001] [2.22.05.3.04.0009] [2.22.05.4.01.0005] [2.22.05.4.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1527	2.22.000008	Cagar Budaya yang dipublikasikan	Unit	&- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.&	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0001] [2.22.05.3.04.0001] [2.22.05.4.04.0001] [2.22.05.3.03.0003] [2.22.05.4.03.0003] [2.22.05.4.02.0005] [2.22.05.3.02.0005] [2.22.05.4.01.0007] [2.22.05.3.01.0007] [2.22.05.4.01.0006] [2.22.05.3.01.0005] [2.22.05.4.01.0005] [2.22.02.4.01.0006] [2.22.02.3.01.0006] [2.22.02.4.01.0005] [2.22.02.3.01.0005] [2.22.05.3.01.0006] [2.22.05.4.01.0006] [2.22.05.3.01.0005] [2.22.05.4.01.0005] [2.22.02.4.01.0005] [2.22.02.3.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1528	2.22.000009	Cagar Budaya yang diselamatkan	Unit	- Cagar Budaya : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1529	2.22.000010	Desa Adat yang dibina pemerintahannya	Desa	- Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1530	2.22.000011	Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa	- Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1531	2.22.000012	Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya	Desa	- Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1532	2.22.000013	Desa Adat yang didampingi Penyusunan Pengelolaan Keuangannya	Desa	- Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1533	2.22.000014	Desa Adat yang Didampingi Penyusunan Peningkatan Perekonomiannya	Desa	- Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1534	2.22.000015	Desa Adat yang difasilitasi tata kelola keuangannya	Desa	- Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1535	2.22.000016	Desa Budaya Yang dibina dan dikembangkan	Desa	- Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1536	2.22.000017	Desa Budaya Yang dikembangkan	Desa	- Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1537	2.22.000022	Dokumen Kerjasama Lembaga Pelestari Budaya dengan pemerintah daerah	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Kerjasama : Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1538	2.22.000023	Dokumen Ketahanan Sosial Budaya yang direhabilitasi	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Rehabilitasi : Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1539	2.22.000025	Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Pengembangan : Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Sistem Pertanian Tradisional : Sistem Pertanian Tradisional adalah siklus pertanian tahunan yang terpadu dengan peternakan kerbau dan hewan peliharaan lainnya yang dilakukan oleh petani di Krayan secara turun temurun yang sifatnya adaptif, ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dan tidak menggunakan input bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik dan lain-lain), serta melestarikan varietas lokal dataran tinggi Krayan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.08.0007] [2.22.08.5.06.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1540	2.22.000027	Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0007] [2.22.08.5.07.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1541	2.22.000028	Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen	&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Kesetiakawanan Sosial : Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1542	2.22.000029	Dokumentasi Sengketa Adat	Dokumen	&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1543	2.22.000031	Industri Kreatif yang dikembangkan	Unit	- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.08.0003] [2.22.08.5.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1544	2.22.000033	Kelembagaan Desa yang ditingkatkan	Lembaga	- Kelembagaan Desa/Desa Adat : kelembagaan desa/deda adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1545	2.22.000034	Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang dibina	Keluarga	- Keluarga : keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga - Perkawinan : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.01.0004] [2.22.07.7.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1546	2.22.000035	Kesejarahan yang dikembangkan	Unit	kesejarahan adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1547	2.22.000036	Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Unit	- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Literasi : Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualiatas hidup.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1548	2.22.000040	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit	- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1549	2.22.000041	Koleksi Perpustakaan Bernilai Sejarah Kadipaten yang dikelola	Unit	- Koleksi Perpustakaan : Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1550	2.22.000042	Koleksi Perpustakaan Bernilai Sejarah Kasultanan yang dikelola	Unit	&- Koleksi Perpustakaan : Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1551	2.22.000043	Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan	- Gelar : Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1552	2.22.000045	Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	- Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0011] [2.22.08.5.07.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1553	2.22.000046	Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0005] [2.22.08.5.07.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1554	2.22.000047	Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	&- Gelar : Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0006] [2.22.08.5.07.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1555	2.22.000049	Laporan Hasil Koordinasi Pawongan	Laporan	- Koordinasi : Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1556	2.22.000050	Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Laporan	&- Koordinasi : Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1557	2.22.000051	Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan	Laporan	- Koordinasi : Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1558	2.22.000052	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Peradilan Adat	Laporan	peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1559	2.22.000053	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Laporan	- Pemolisian Masyarakat (Polmas) : Pemolisian Masyarakat (community Policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1560	2.22.000056	Laporan hasil Pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Pengembangan bahasa : Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1561	2.22.000057	Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan	&- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Muatan Lokal : Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.10.0001] [2.22.08.5.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1562	2.22.000058	Laporan hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1563	2.22.000059	Laporan hasil Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan	- Pengembangan bahasa : Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1564	2.22.000060	Laporan hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan	- Pengembangan : Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.08.0001] [2.22.08.5.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1565	2.22.000063	Laporan Hasil Penyelenggaraan Festival Pawongan	Laporan	- Pawongan : Pawongan adalah hubungan antar krama bendega dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1566	2.22.000064	Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Laporan	- Rapat kerja : Rapat kerja adalah rapat/pertemuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. MAA : Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten/Kota adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.03.0003] [2.22.07.7.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1567	2.22.000065	Laporan kegiatan/event terkait pengayaan cagar budaya	Laporan	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1568	2.22.000066	Laporan kegiatan/event terkait pengembangan cagar budaya	Laporan	- Pengembangan bahasa : Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1569	2.22.000068	Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1570	2.22.000071	Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Kelembagaan : Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. - Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0015] [2.22.08.5.07.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1571	2.22.000073	Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Mediasi : Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa. - Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.02.0003] [2.22.07.7.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1572	2.22.000076	Laporan Penetapan Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	- Masyarakat : Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1573	2.22.000080	Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Kewirausahaan : Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. - Desa : desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0017] [2.22.08.5.07.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1574	2.22.000082	Laporan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan	- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Desa : desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0023]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1575	2.22.000083	Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan	- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Pelestarian : Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1576	2.22.000084	Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan	- Sumber daya manusia (SDM) : Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kelembagaan Desa/Desa Adat : kelembagaan desa/deda adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1577	2.22.000085	Laporan Penyelenggaraan Festival Palemahan	Laporan	Festival adalah acara atau perayaan yang dilakukan untuk merayakan sesuatu, seperti tradisi, budaya, musik, seni, makanan, atau olahraga	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1578	2.22.000086	Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan	- Gotong Royong : Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. - Desa : desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1579	2.22.000087	Laporan Selendang Sutera	Laporan	Festival adalah acara atau perayaan yang dilakukan untuk merayakan sesuatu, seperti tradisi, budaya, musik, seni, makanan, atau olahraga	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1580	2.22.000089	Lembaga Adat yang dibina	Lembaga	- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1581	2.22.000090	Lembaga Adat yang dikembangkan	Lembaga	- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1582	2.22.000091	Lembaga Adat yang dimanfaatkan	Lembaga	- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1583	2.22.000092	Lembaga kebudayaan yang dibina	Lembaga	- Lembaga Kebudayaan : Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0002] [2.22.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1584	2.22.000094	Lembaga Penggiat Seni yang dibina	Lembaga	- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0002] [2.22.08.5.07.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1585	2.22.000096	Lembaga tradisional yang dibina	Lembaga	- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1586	2.22.000098	Lembaga yang menjalin Kerja Sama	Lembaga	- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Kerja Sama : Kerja sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1587	2.22.000100	Maestro/empu yang terfasilitsi pengembangan karyanya	Orang	- Maestro : Maestro adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebudayaan yang secara konsisten mendedikasikan keahliannya kepada masyarakat dan berdampak pada pemajuan kebudayaan, serta diakui keberadaannya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kalangan budayawan setempat atau nasional. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1588	2.22.000102	Majalah tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar	- Adat Istiadat : Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1589	2.22.000103	Museum Sonobudoyo yang dikelola	Unit	- Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1590	2.22.000104	Museum Sonobudoyo yang dikembangkan	Unit	- Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1591	2.22.000105	Objek Warisan Budaya yang dikelola	Objek	Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1592	2.22.000107	Objek Cagar Budaya yang dikelola	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1593	2.22.000108	Objek Warisan Budaya yang dipublikasikan	Objek	Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1594	2.22.000111	Objek Cagar Budaya yang dipublikasikan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1595	2.22.000116	Objek Cagar Budaya yang diregistrasi	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1596	2.22.000120	Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan penetapannya	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1597	2.22.000121	Objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi	Objek	Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1598	2.22.000122	Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1599	2.22.000123	Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1600	2.22.000127	Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1601	2.22.000131	Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilindungi	Objek	- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1602	2.22.000132	Objek pemajuan tradisi budaya yang di kembangkan	Objek	Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1603	2.22.000133	Objek pemajuan tradisi budaya yang di manfaatkan	Objek	Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1604	2.22.000137	Objek Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta yang dibina	Objek	Seni dan budaya merupakan produk dari kreatifitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam - lingkungan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1605	2.22.000140	Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	Seni dan budaya merupakan produk dari kreatifitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam - lingkungan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1606	2.22.000143	Orang yang mengakses Data dan Informasi Sejarah	Orang	- Data : Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. - Informasi : Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1607	2.22.000144	Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman	Orang	Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Pasraman : Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1608	2.22.000151	Penerima Penghargaan terhadap kontribusi dalam pemajuan kebudayaan	Orang	- Penghargaan : penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1609	2.22.000154	Penulisan Sejarah Lokal Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	- Penulisan Sejarah : Penulisan Sejarah adalah penulisan fakta-fakta dan interpretasi sejarah yang telah disimpulkan. - Dokumen : dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Sejarah Lokal : Sejarah Lokal adalah sejarah dari suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah. Batasan geografis pengkajian sejarah lokal mencakup tempat tinggal suku bangsa yang mungkin terdiri dari dua atau tiga daerah administratif atau bahkan lingkup pengkajiannya hanya pada sebuah kota bahkan desa.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1610	2.22.000155	Perempuan yang dikembangkan perekonomiannya	Orang	Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.09.0019] [2.22.08.5.07.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1611	2.22.000157	Permuseuman yang dikelola	Unit	Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.2.01.0014] [2.22.08.5.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1612	2.22.000158	Peserta mengikuti Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Orang	- Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	T	T		[2.22.08.5.09.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1613	2.22.000162	Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Orang	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan - Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0002] [2.22.02.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1614	2.22.000163	Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang	- Adat Istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.01.0003] [2.22.07.7.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1615	2.22.000164	Peserta Sosialisasi Hukum Adat	Orang	Hukum adat adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu	T	T		[2.22.07.7.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1616	2.22.000166	Peserta Sosialisasi Lembaga Adat	Orang	- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1617	2.22.000167	Prajuru Desa Adat yang dibina	Orang	Desa Adat : desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1618	2.22.000168	Pranata Adat yang dibina	Kegiatan	- Pranata Adat : Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1619	2.22.000170	Pranata Kebudayaan yang dibina	Kegiatan	- Pranata Kebudayaan : Prana Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0002] [2.22.02.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1620	2.22.000172	pranata tradisional yang dibina	Kegiatan	Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1621	2.22.000173	Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	Unit	Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1622	2.22.000174	Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	- Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.04.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1623	2.22.000175	Produk Hukum Desa Adat	Dokumen	- Produk : Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. - Desa Adat : Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1624	2.22.000176	Produk Hukum Desa Adat yang tersedia	Dokumen	- Produk : Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1625	2.22.000177	Sarana Pembinaan Sejarah	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.04.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1626	2.22.000181	Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara	Unit	- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1627	2.22.000183	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1628	2.22.000186	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	&- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pendidikan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.10.0002] [2.22.08.5.08.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1629	2.22.000187	Sarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang unutk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat berlaku.	T	T		[2.22.02.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1630	2.22.000189	SDM Lembaga Adat yang dibina	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang unutk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat berlaku.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.09.8.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1631	2.22.000191	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1632	2.22.000193	Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.2.01.0004] [2.22.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1633	2.22.000194	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapatkan Sertifikasi	Sertifikat	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1634	2.22.000195	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pelatihan	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. -Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	T	T		[2.22.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1635	2.22.000198	Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Dibina	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1636	2.22.000202	Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Pranata Adat : Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1637	2.22.000204	Taman Budaya Yogyakarta yang dikelola dan dikembangkan	Objek	- Taman Budaya : Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.	T	T		[2.22.08.5.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1638	2.22.000205	Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1639	2.22.000206	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.02.0001] [2.22.05.3.01.0005] [2.22.05.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1640	2.22.000207	Urusan Kebudayaan yang termuat dalam dokumen Renstra	Dokumen	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Dokumen : dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.07.0001] [2.22.02.3.01.0005] [2.22.02.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1641	2.22.000208	Urusan Kebudayaanyang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Dokumen : dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Renja Perangkat Daerah : Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.07.0001] [2.22.02.3.01.0005] [2.22.02.4.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1642	2.22.000209	Insan Perfilman Daerah	Orang	Jumlah Insan Perfilman Daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.10.3.01.0001] [2.22.10.4.01.0001] [2.22.10.4.01.0001] [2.22.10.4.01.0002] [2.22.10.4.01.0003] [2.22.10.4.01.0004] [2.22.10.4.01.0005] [2.22.10.4.01.0006] [2.22.10.4.01.0007] [2.22.10.4.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1643	2.22.000210	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang	Pelatihan peradilan adat adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan peradilan adat. Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan. Keputusan dari peradilan adat bersifat mengikat dan final. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.07.7.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1644	2.22.000214	Jumlah insan perfilman yang dibina	Orang	Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.10.3.01.0001] [2.22.10.4.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1645	2.22.000215	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan	Promosi cagar budaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran, apresiasi, dan partisipasi masyarakat terhadap warisan budaya yang penting bagi sejarah dan identitas budaya. Kegiatan promosi cagar budaya bertujuan untuk menarik minat masyarakat lokal maupun internasional, serta mendukung pelestarian dan keberlanjutan warisan budaya promosi cagar budaya dapat dilakukan dengan cara: - Pameran atau even festival budaya - Wisata budaya dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah - Sosialisasi melalui berbagai media - Pengembangan Aplikasi dan Situs Web Interaktif atau virtual reality - Pendidikan dan pelatihan di sekolah, dengan memasukkan materi cagar budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan informal - Kerjasama dengan Komunitas Lokal - produksi Souvenir dan Cinderamata - Kampanye Digital dan Influencer - Program Sponsor yaitu membuat program dimana individu, kelompok atau perusahaan dapat mensponsori bagian tertentu dari cagar budaya yang bisa dilakukan dalam bentuk bantuan danam perawatan atau dukungan lainnya - Berpartisipasi dalam acara-acara internasional	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.3.02.0007] [2.22.05.4.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1646	2.22.000217	Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papua dalam wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan	Laporan	Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pengembalian cagar budaya merujuk pada proses pemulangan benda-benda budaya, artefak, dan warisan sejarah yang telah diambil atau dipindahkan dari lokasi asalnya ke tempat lain, seringkali ke luar negeri. Pengembalian ini sering kali melibatkan negosiasi diplomatik antara negara asal dan negara yang saat ini memiliki cagar budaya tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya tersebut dapat berupa: - Diplomasi Kebudayaan - Kerjasama dengan Museum dan Lembaga Internasional - Advokasi Hukum dan Legalitas - Pendokumentasian dan registrasi	T	T		[2.22.05.3.02.0006] [2.22.05.4.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1647	2.22.000225	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Unit	Penyediaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu barang yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk, jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama, pemeliharaan dilakukan baik sehari-hari, berkala, darurat maupun preventif, terhadap sarana dan prasrana museum. hal yang biasa dilakukan antara lain untuk pemeliharaan terkait pemeliharan bangunan museum, pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan lainnya. Untuk penyediaan terkait kebutuhan peralatan untuk museum AC, dehumifre, data logger, dll untuk mendukung kegiatan museum. Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum provinsi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan museum dalam rangka untuk mmeberikan layanan museum bagi masyarakat /pengunjung, seperti : 1. revittalisasi bangunan 2. Revitalisasi Pengelolaan Kegiatan 3. dan lain lain	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0003] [2.22.06.1.01.0007] [2.22.06.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1648	2.22.000227	Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Penerima/Pengelola yaitu Lembaga Budaya	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1649	2.22.000228	Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1650	2.22.000229	Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Objek	Ekosistem kultural adalah bagian dari pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan berbasis digital. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1651	2.22.000230	Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1652	2.22.000231	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Laporan	Pemantauan adalah pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui ketentuan perundangan yang berlaku.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.07.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1653	2.22.000233	Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	Terselenggaranya Aktivitas Akademisi komunitas seni dan budaya yogyakarta	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.08.5.10.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1654	2.22.000234	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Penyusunan PPKD Provinsi harus berdasarkan dokumen PPKD Kab/Kota. Penyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. PPKD disusun dengan tahapan: 1. perencanaan 2. konsolidasi data 3. pengolahan data 4. analisis atas hasil pengolahan data 5. penyusunan naskah 6. penetapan PPKD	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.2.01.0003] [2.22.02.1.01.0012] [2.22.02.3.01.0004] [2.22.02.4.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1655	2.22.000235	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	Cagar Budaya (CB) adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional Inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) yang bertujuan untuk melakukan pelindungan kebudayaan. Dalam hal ini, Cagar Budaya yang dimaksud termasuk Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Satuan Objek adalah unit atau rincian dari 10 jenis OPK. Contoh penulisan tari (10 objek tari), permainan rakyat (5 objek permainan rakyat). 1. Pendataan ke lapangan atas OPK, CB, dan ODCB 2. Pengklasifikasian jenis OPK, CB, dan ODCB di daerahz 3. Penginputan OPK, CB, dan ODCB di Data Pokok Kebudayaan (Datahud)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.2.02.0004] [2.22.05.4.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1656	2.22.000236	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	Pengembangan dan Pemanfaatan adalah suatu tindakan dalam upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka penguatan ideologi, Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya (OPK). Dalam hal ini dilakukan melalui giat-giat budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. uan Objek adalah unit atau rincian dari 10 jenis OPK.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1657	2.22.000237	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	Pengembangan dan Pemanfaatan adalah suatu tindakan dalam upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka penguatan ideologi, Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya (OPK). Dalam hal ini dilakukan melalui giat-giat budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. uan Objek adalah unit atau rincian dari 10 jenis OPK.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1658	2.22.000238	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Laporan	Pemantauan dan Evaluasi PPKD Kab/Kota dilakukan secara berkala setiap 1(satu) tahun oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan melalui 5 (lima)kegiatan yaitu: pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penganalisisan, dan penilaian. objek yang dipantau adalah Dokumen PPKD yang telah ditetapkan, Dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD, Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui tahapan: 1. pengumpulan data (borang identifikasi dan borang capaian) 2. pemeriksaan 3. penilaian 4. pelaporan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0015] [2.22.02.3.01.0006] [2.22.02.4.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1659	2.22.000239	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Orang	Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan adalah upaya pemberdayaan SDM Kebudayaan (termasuk pelaku seni, Maestro, Tenaga Ahli Cagar Budaya, SDM Museum/Taman Budaya), dalam rangka peningkatan dan perluasan peran aktif dan inisiatif masyarakat yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang Objek Pemajuan Kebudayaan, dengan melakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi, sesuai kebutuhan dan tuntutan, Data sumber daya manusia kebudayaan bersumber dari hasil inventarisasi SDM Kebudayaan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan melalui: 1. pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan 2. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan, termasuk SDM Museum dan Taman Budaya 3. pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Ahli Cagar Budaya 4. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang kebudayaan 5. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan 6. seleksi gita bahana nusantara 7. pemberian sertifikat kepada orang yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1660	2.22.000240	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Lembaga	Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi. Pembinaan Lembaga dan pranata kebudayaan adalah upaya pemberdayaan Lembaga dan pranata kebudayaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membina kebudayaan, serta penataan sistem proses dan kegiatan kebudayaan secara resmi. Berbagai upaya yang dapat dilalukan melalui: 1. inventarisasi data Lembaga dan Pranata Kebudayaan 2. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan 3. pendampingan terhadap lembaga kebudayaan 4. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan 5. pengembangan jejaring antar lembaga kebudayaan dan antar pranata kebudayaan 6. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang kebudayaan 7. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang kebudayaan 8. pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan 9. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi bidang kebudayaan 10. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi 11. pemberian sertifikat	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.02.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1661	2.22.000241	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Objek	Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali Penetapan WBTb adalah pemberian status Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi Warisan Budaya Takbenda Penetapan WBTb: 1. Pengusulan OPK yang ingin ditetapkan menjadi WBTb 2. Pengumpulan dokumen pendukung untuk penetapan WBTb 3. Pembahasan usulan oleh tim ahli WBTb 4. Sidang penetapan 5. Rekomendasi penetapan WBTb	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.05.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1662	2.22.000242	Revitalisasi Taman Budaya	Unit	Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Taman Budaya, agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pengunjung Taman Budaya, seperti contoh melakukan rehab fisik Gedung Taman Budaya. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya provinsi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan museum dalam rangka untuk memberikan layanan taman budaya bagi masyarakat/pengunjung, seperti : 1. revitalisasi bangunan 2. Revitalisasi Pengelolaan Kegiatan 3. dan lain lain	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0006] [2.22.06.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1663	2.22.000243	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan publik di museum adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Museum dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan publik museum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan Pameran, Belajar bersama, museum keliling, workshop, aneka lomba-lomba alur kisah, sosialisasi museum, publikasi museum dan kegiatan publik lainnya yang mengajak masyarakat untuk mengunjungi museum dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan di museum. Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum provinsi (termasuk apabila terdapat pameran temporer, museum keliling dan pameran tetap museum. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelibatan masyarakat pada kegiatan publik di museum, yaitu penyelenggaraan : 1. 2. Belajar bersama di 3. Akhir pekan di 4. 5. Promosi dan Publikasi 6. Layanan 7. dan lain-lain	T	T		[2.22.06.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1664	2.22.000246	Pengelolaan Koleksi Museum	Unit	Pengelolaan adalah suatu proses sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan dan pemanfaatan sumberdaya sebaik mungkin, agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektfi dan efisien, sedangkan dalam pengelolaan koleksi museum, adalah pengelolaan koleksi yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata, yang didahului dengan registrasi dan inventarisasi, tanggungjawab pengelolaan koleksi adalah seorang kurator yang karena kompetensi keahliannya. Misal kegiatan untuk pengelolaan koleksi Museum antara lain : Kajian Koleksi, Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum provinsi. Koleksi dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyakan/replika, spesimen, hasil rekonstruksi, dan/atau hasil restorasi. Dan harus memenuhi syarat sesuai dengan visi misi museum, jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan dan/atau tidak	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1665	2.22.000248	Pengelolaan Operasional Museum	Layanan	Pengelolaan operasional museum dimaksud adalah proses sistematis yang dilakukan secara terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi melalui layanan-layanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan, serta kegiatan-kegiatan rutin sebagai pendukung dalam pelayanan tersebut. Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum provinsi. Pengelokaan operasional Museum antara lain : 1. Pemeliharaan museum 2. langganan daya dan jasa 3. Gaji 4. Layanan Perencanaan. 5. Layanan Evaluasi 6. dan lain-lain	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1666	2.22.000250	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Kegiatan	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan publik pada Taman Budaya adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Taman Budaya dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan publik Taman Budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya provinsi. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelibatan masyarakat pada kegiatan publik di taman budaya , yaitu penyelenggaraan : 1. Workshop di Bidang Seni Musik, Seni Rupa, Pertunjukan/Teater, Tari, Bahasa-Sastra, dan Seni Media. 2. Pergelaran/Pementasan Karya Seni. 3. Pameran Karya Budaya 4. Festival Seni Budaya/ Lomba di berbagai Bidang 5. Penguatan Program Pekan Kebudayaan Daerah dalam rangka pendukungan Pekan Kebudayaan Nasional. 6. Promosi dan Publikasi Taman Budaya 7. dll Mohon kepada OPD yang membidangi kebudayaan di tingkat provinsi agar mencantumkan juga jumlah orang pada aktivitas kegiatan yang dilaksanakan di taman budaya.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[2.22.06.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1667	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi yang berada diwilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0002] [2.23.02.1.01.0005] [2.23.02.1.01.0008] [2.23.02.1.01.0012] [2.23.02.1.01.0013] [2.23.02.1.01.0014] [2.23.02.1.01.0015] [2.23.02.1.01.0017] [2.23.02.4.03.0001] [2.23.04.3.01.0003] [2.23.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1668	2.23.000055	Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain yang berada di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0002] [2.23.02.1.01.0003] [2.23.02.1.01.0012] [2.23.02.1.01.0013] [2.23.02.1.01.0015] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.04.3.01.0003] [2.23.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1669	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1670	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1671	2.23.000058	Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah menengah sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan yang berada di wilayah Provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0004] [2.23.02.1.01.0013] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.04.3.01.0003] [2.23.04.4.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1672	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (pasal 32 ayat (1) UU No. 20 Tahun 20023 tentang Sisdiknas). Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan khusus yang berada diwilayah provinsi.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0004] [2.23.02.1.01.0013] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.04.3.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1673	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Rata-Rata kunjungan masyarakat/pemustaka ke perpustakaan umum per hari di wilayah provinsi baik secara onsite maupun online	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.02.1.02.0006] [2.23.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1674	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Rata-rata kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.02.1.02.0006] [2.23.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1675	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) per hari di perpustakaan sekolah menengah (SMA/sederajat) di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.02.1.02.0006] [2.23.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1676	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) perhari di perpustakaan satuan pendidikan khusus baik secara online maupun secara onsite	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.02.1.02.0006] [2.23.02.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1677	2.23.000064	Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan umum yang berada di wilayah Provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0009] [2.23.02.1.01.0014] [2.23.03.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1678	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan khusus yang berada di wilayah Provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0009] [2.23.02.1.01.0014] [2.23.03.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1679	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Sekolah Menengah (SMA/SMK sederajat) di wilayah Provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0009] [2.23.02.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1680	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0009] [2.23.03.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1681	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.01.0001] [2.23.03.1.03.0002] [2.23.03.1.04.0002] [2.23.03.1.03.0001] [2.23.03.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1682	2.23.000069	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/produsen	Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam yang berada di wilayah Propinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1683	2.23.000070	Jumlah Koleksi hasil pelaksanaan KCKR yang diolah	Eksemplar	Kegiatan pengolahan meliputi verifikasi, entry data (deskripsi Bibliografis, nomor klasifikasi,subjek, abstrak), upload cover, memasang RFID, tagging dan label. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi hasil serah simpan KCKR di wilayah provinsi yang sudah diolah	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1684	2.23.000071	Penerbitan katalog induk Daerah	Entry	Katalog Induk Daerah (KID) merupakan daftar koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan daerah tertentu di wilayah Provinsi yang diinventarisasi dan didayagunakan sebagai alat silang layan melalui jaringan perpustakaan. Katalog Induk Daerah berfungsi untuk meningkatan jaringan kerjasama katalog antar perpustakaan yang ada di wilayah provinsi tersebut Literatur sekunder merupakan terbitan yang dapat membantu pemustaka untuk mengetahui informasi tentang koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan secara lebih mudah sehingga pemustaka dapat menemukan bahan perpustakaan yang diperlukan secara cepat. Literatur sekunder merupakan suatu alat temu kembali informasi bagi pemustaka. Kegiatannya mengumpulkan semua data bibliografis koleksi setiap perpustakaan dan diidentifikasi ketersediaan judul yang sama dengan memberikan kode lokasi perpustakaan. Melalui kode lokasi ini pemustaka dapat diarahkan di perpustakaan mana saja buku tersebut dapat diakses. Dengan adanya jejaring perpustakaan, akses temu kembali informasi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1685	2.23.000072	Penerbitan Bibliografi Daerah	naskah	Bibliografi Daerah berfungsi untuk menginventarisasi terbitan terbaru di suatu wilayah (Provinsi). Bibliografi Daerah juga sebagai alat pengawasan bibliografi. Data bibliografi terbitan dan publikasi di wilayah Provinsi meliputi terbitan Buku, media cetak terbitan berseri, bahan kartografi, rekaman suara analog, rekaman video analog, Buku elektronik, media terbitan berseri elektronik, bahan kartografi elektronik, hasil penelitian elektronik dengan periode terbit tahunan, musik digital, film digital, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di wilayah provinsi tersebut. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah terbitan bibliografi daerah pada kurun waktu periode satu tahun	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1686	2.23.000073	Pelestarian naskah kuno milik Provinsi	naskah	Naskah kuno semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah naskah kuno milik provinsi yang dilestarikan	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1687	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiiki	Eksemplar	koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.03.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1688	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	kegitan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah provinsi yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi	T	T	DINAS ARPUS JATENG	[2.23.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1689	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.03.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1690	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1691	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1692	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada diwilayah provinsi (tidak termasuk pustakawan)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1693	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0006] [2.23.02.1.01.0016] [2.23.04.3.01.0001] [2.23.04.4.01.0001] [2.23.04.4.01.0002] [2.23.04.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1694	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.04.3.01.0001] [2.23.04.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1695	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.04.3.01.0001] [2.23.04.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1696	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan satuan pendidikan Khusus di wilayah provinsi	T	T	DINAS ARPUS JATENG	[2.23.02.1.01.0016] [2.23.04.3.01.0001] [2.23.04.4.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1697	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1698	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1699	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA /SMK/Sederajat) yang berada di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1700	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1701	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. Jumlah Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1702	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1703	2.23.000092	Pegiat literasi binaan provinsi	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi (duta baca/bunda baca,dll.) diwilayah Provinsi	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1704	2.23.000093	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.02.0004] [2.23.03.3.04.0001] [2.23.03.3.04.0002] [2.23.03.4.04.0001] [2.23.03.4.04.0002] [2.23.04.3.01.0002] [2.23.04.4.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1705	2.23.000094	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan Jumlah perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.23.02.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1706	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0010] [2.24.02.1.01.0012] [2.24.02.1.02.0005] [2.24.02.1.02.0006] [2.24.02.3.06.0001] [2.24.02.2.01.0004] [2.24.02.2.02.0002] [2.24.02.2.02.0003] [2.24.02.2.02.0005] [2.24.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1707	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0008] [2.24.03.1.02.0001] [2.24.03.1.02.0002] [2.24.02.1.01.0012] [2.24.03.2.02.0001] [2.24.03.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1708	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0001] [2.24.02.1.01.0002] [2.24.02.1.01.0003] [2.24.02.1.01.0004] [2.24.02.1.01.0012] [2.24.02.3.06.0002] [2.24.02.4.06.0002] [2.24.03.1.01.0001] [2.24.03.1.01.0004] [2.24.02.2.01.0005] [2.24.02.2.01.0009] [2.24.02.2.01.0010] [2.24.03.2.01.0001] [2.24.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1709	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0012] [2.24.03.1.01.0002] [2.24.03.1.01.0003] [2.24.02.2.01.0003] [2.24.03.2.01.0002] [2.24.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1710	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.03.1.04.0002] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1711	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.03.1.04.0001] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.02.2.02.0005] [2.24.03.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1712	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.03.1.04.0001] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1713	2.24.000028	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.2.01.0006] [2.24.02.1.01.0009] [2.24.02.2.01.0007] [2.24.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1714	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0006] [2.24.02.3.04.0002] [2.24.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1715	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0005] [2.24.02.3.04.0002] [2.24.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1716	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	T	T	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	[2.24.02.1.01.0007] [2.24.02.1.02.0003] [2.24.02.1.03.0002] [2.24.02.3.04.0001] [2.24.02.3.06.0003] [2.24.05.3.01.0001] [2.24.05.3.03.0001] [2.24.05.3.05.0001] [2.24.05.4.04.0001] [2.24.05.4.06.0001] [2.24.02.2.01.0008] [2.24.02.2.03.0002] [2.24.02.3.04.0001] [2.24.02.4.04.0001] [2.24.02.4.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1717	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, bahan kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1718	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Data dan informasi pengendalian penyakit ikan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan dan BLPKIL	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1719	3.25.000062	Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dokumen yang disusun untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan dan CDK Wilayah Timur, CDK Wilayah Barat dan CDK Wilayah Selatan	[3.25.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1720	3.25.000091	Jenis pelaksanaan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis dan tingkat resiko bencana	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1721	3.25.000099	Kapal perikanan yang diawasi dalam Kegiatan penangkapan ikan	Unit	Data kapal perikanan yang memiliki izin penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0014] [3.25.05.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1722	3.25.000105	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	T	T	CDK Wilayah Timur CDK Wilayah Barat CDK Wilayah Selatan	[3.25.02.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1723	3.25.000108	Kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan banyaknya masyarakat yang mendapatkan penambahan ilmu dan pengetahuan melalui pendampingan, teknologi informasi dan penyelenggaraan pelatihan	T	T	CDK Wilayah Timur CDK Wilayah Barat CDK Wilayah Selatan	[3.25.02.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1724	3.25.000111	Kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau&	T	T	CDK Wilayah Timur CDK Wilayah Barat CDK Wilayah Selatan	[3.25.04.1.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1725	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan 3. diagnosa penyakit secara klinis dan Kegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1726	3.25.000128	Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang dicadangkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.3.05.0001] [3.25.02.4.05.0001] [3.25.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1727	3.25.000129	Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Barat 3. CDK Wilayah Selatan 4. Bidang KP3K	[3.25.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1728	3.25.000130	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi	Ha	Luasan Area Penggunaan Lahan Mangrove pada wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi merupakan jumlah besaran area Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak dan atau sama dengan kondisi awal.	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Barat 3. CDK Wilayah Selatan 4. Bidang KP3K	[3.25.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1729	3.25.000131	Masyarakat yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	Jumlah masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1730	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.05.0004] [3.25.04.2.04.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1731	3.25.000151	Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Orang	Jumlah pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Barat 3. CDK Wilayah Selatan 4. Bidang KP3K	[3.25.04.1.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1732	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Polisi Khusus Wilayah Pesisir Pulau - Pulau Kecil (Polsus PWP3K)	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1733	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1734	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.06.0001] [3.25.03.1.06.0003] [3.25.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1735	3.25.000193	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (10 GT Sampai dengan 30 GT)	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.09.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1736	3.25.000196	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (Sampai dengan 10 GT)	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.10.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1737	3.25.000198	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.07.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1738	3.25.000199	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sampai dengan 10 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.08.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1739	3.25.000203	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah banyaknya dokumen terkait prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis yang dikeluarkan untuk Izin melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang mencakup di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0006] [3.25.02.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1740	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1741	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1742	3.25.000230	speedboat pengawas	Unit	Jumlah speedboat pengawasan yang dimiliki	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Barat 3. CDK Wilayah Selatan	[3.25.05.1.01.0010] [3.25.05.1.01.0011] [3.25.05.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1743	3.25.000260	Wadah Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	&Wadah dan segala bentuk bangunan, jalan produksi, saluran irigasi, dan sejenisnya yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya berdasarkan potensi dan tercantum dalam RTRW: - data luas potensi lahan budidaya air payau / tambak (ha) - data luas lahan existing pemanfaatan budidaya air payau / tambak (ha) - data luas potensi lahan budidaya air tawar (ha)&	T	T	BBIAPL	[3.25.04.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1744	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	Jumlah Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0002] [3.25.03.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1745	3.25.000262	Unit penangkapan ikan	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang sesuai dengan izin dan peruntukannya	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. PPP Wonokerto 6. PPN Tasik Agung 7. PPP Juwana / Bajomulyo 8. PPP Morodemak 9. PPP Tawang 10. PPP Karimunjawa 11. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1746	3.25.000263	Kapal di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	&Jumlah kapal penangkap ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi&	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1747	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan Penumbuhan Pokmaswas dilakukan atas prakarsa masyarakat sendiri sedangkan pengembangan Pokmaswas dapat difasilitasi oleh Pemda. Selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pusat	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1748	3.25.000269	Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	Unit	&Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawsan Konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah&	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK Wilayah Barat	[3.25.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1749	3.25.000270	Unit kapal yang aktif (Memiliki Izin yang masih berlaku)	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan yang memiliki izin yang masih aktif sesuai dengan kewenangan Provinsi	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1750	3.25.000271	Pelaku usaha perikanan tangkap (stakeholder)	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (stakeholder) yang memiliki kapal penangkap ikan yang masih aktif	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1751	3.25.000272	Permohonan lokasi pengembangan pelabuhan perikanan yang disertai dengan Detail Engineering Designed (DED)	Dokumen	Jumlah surat permohonan lokasi pengembangan Pelabuhan Perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1752	3.25.000273	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang ditolak	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1753	3.25.000274	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses lebih lanjut	Dokumen	&Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang diproses lebih lanjut&	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1754	3.25.000275	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses dengan catatan	Dokumen	&Jumlah Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang diproses dengan catatan&	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.07.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1755	3.25.000276	Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut	Ton	Jumlah penggunaan pakan ikan untuk pembudidayaan ikan di laut	T	T	BBIAPL	[3.25.04.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1756	3.25.000277	Poduksi benih Ikan Laut	Ekor	Produksi benih ikan laut hasil budidaya	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1757	3.25.000278	Jumlah produksi bibit rumput Laut	Ton	Jumlah produksi bibit rumput laut	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1758	3.25.000282	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0003] [3.25.02.4.03.0005] [3.25.02.3.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1759	3.25.000283	permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0003] [3.25.02.3.03.0005] [3.25.02.4.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1760	3.25.000284	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0003] [3.25.02.4.03.0005] [3.25.02.3.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1761	3.25.000285	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1762	3.25.000286	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses	Dokumen	&Jumlah Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan&	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1763	3.25.000287	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1764	3.25.000291	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk	Dokumen	Jumlah Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1765	3.25.000292	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses	Dokumen	Jumlah Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1766	3.25.000293	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1767	3.25.000296	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang ditolak	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.08.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1768	3.25.000297	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses lebih lanjut	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diproses lebih lanjut	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.08.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1769	3.25.000298	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diproses dengan catatan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.08.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1770	3.25.000299	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1771	3.25.000300	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1772	3.25.000301	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1773	3.25.000303	Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Perkara	Jumlah Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0003] [3.25.05.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1774	3.25.000304	Peta rawan pelanggaran usaha bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	Peta Rawan pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0003] [3.25.05.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1775	3.25.000305	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan	Program/Kegiatan	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan yang dianggarkan melalui APBD	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1776	3.25.000306	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis perizinan berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1777	3.25.000310	Pelabuhan di Wilayah Perairan Darat	Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi di wilayah perairan darat	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1778	3.25.000311	Jumlah dan jenis alat tangkap di Wilayah Perairan Darat	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan di wilayah perairan darat yang sesuai dengan izin dan peruntukannya	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1779	3.25.000312	Kapal di Wilayah Perairan Darat	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan di wilayah perairan darat yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1780	3.25.000313	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap (Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT) yang menjadi kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1781	3.25.000318	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1782	3.25.000320	Lokasi rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Lokasi	Jumlah Lokasi Rehabilitasi Lahan Mangrove pada wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi merupakan jumlah besaran area Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak dan atau sama dengan kondisi awal.	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK Wilayah Barat	[3.25.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1783	3.25.000321	Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Ha	Luasan Lahan Rehabilitasi pada Perairan Pesisir sesuai dengan alokasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1784	3.25.000323	Provinsi yang telah menyusun materi teknis muatan pesisir pada RTRW Provinsi/dokumen final RZWP-3-K	Dokumen	Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K merupakan dokumen tentang muatan tata ruang perairan pesisir dan pulau-pulau yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya akan diintegrasikan dalam RTRW Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1785	3.25.000324	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kelompok	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1786	3.25.000325	Data pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kasus	Jumlah kasus pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0001] [3.25.05.1.01.0008] [3.25.05.1.01.0016] [3.25.05.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1787	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Kasus	Data pelanggaran kapal perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0002] [3.25.05.1.01.0014] [3.25.05.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1788	3.25.000328	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Pengawas Perikanan	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0009] [3.25.05.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1789	3.25.000330	Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.02.0001] [3.25.05.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1790	3.25.000331	Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kasus	Data kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.02.0001] [3.25.05.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1791	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaku Usaha	Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.02.0002] [3.25.05.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1792	3.25.000334	Kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Perkara	Data kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Timur 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.02.0002] [3.25.05.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1793	3.25.000336	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi penolakan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.09.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1794	3.25.000337	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui	Dokumen	&Jumlah Rekomendasi yang disetujui atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT&	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.09.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1795	3.25.000338	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis yang disetujui dengan catatan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.09.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1796	3.25.000339	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1797	3.25.000343	Saluran di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meter Lari	data saluran irigasi perikanan dan jalan produksi perikanan budidaya	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1798	3.25.000344	Sampel pengujian penyakit ikan di laut yang diuji	Sampel	Jumlah sampel pengujian penyakit ikan	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.05.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1799	3.25.000345	Sumber Daya Manusia Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	Orang	data SDM Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.05.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1800	3.25.000346	Lahan pembudidayaan ikan	Ha	Jumlah lahan pembudidayaan ikan dalam Hektar	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1801	3.25.000347	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi penolakan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.10.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1802	3.25.000348	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui	Dokumen	Jumlah Rekomendasi yang disetujui atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.10.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1803	3.25.000349	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis yang disetujui dengan catatan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT&	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.10.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1804	3.25.000362	Wadah Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	Data wadah pembudidayaan di laut (KJA, Jaring Tancap, dan kebun bibit rumput laut)	T	T	1. Bidang UPK 2. BBIAPL	[3.25.04.1.05.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1805	3.25.000363	Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Ton	Jumlah Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	T	T	1. Bidang UPK 2. BBIAPL	[3.25.04.1.06.0002] [3.25.04.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1806	3.25.000365	Produksi Benih	Ekor	Produksi benih ikan air payau dan air tawar yang digunakan untuk usaha budidaya air payau dan air tawar	T	T	1. Bidang UPK 2. BBIAPL	[3.25.04.1.06.0002] [3.25.04.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1807	3.25.000366	Produksi induk	Ekor	Jumlah produksi induk	T	T	BBIAPL	[3.25.04.1.06.0002] [3.25.04.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1808	3.25.000367	Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	jumlah laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1809	3.25.000368	Laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	Dokumen	Jumlah laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	T	T	BLPKIL	[3.25.04.1.06.0002] [3.25.04.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1810	3.25.000371	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran sesuai Skala Usaha dan Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	T	T	1. CDK Wilayah Barat 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK WIlayah Timur	[3.25.06.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1811	3.25.000372	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	T	T	1. CDK Wilayah Barat 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK WIlayah Timur	[3.25.06.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1812	3.25.000373	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	T	T	1. CDK Wilayah Barat 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK WIlayah Timur	[3.25.06.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1813	3.25.000374	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	T	T	1. CDK Wilayah Barat 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK WIlayah Timur	[3.25.06.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1814	3.25.000375	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1815	3.25.000376	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitasi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1816	3.25.000377	Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah hasil pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi merupakan jumlah dokumen hasil rekapitulasi pemetaan kebutuhan bahan baku usaha perikanan Setiap pemegang izin usaha Bidang Pengolahan Ikan wajib membuat laporan kegiatan Usaha yang memuat asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan dan wilayah pemasaran	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1817	3.25.000378	Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1818	3.25.000379	Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1819	3.25.000380	Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1820	3.25.000381	Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1821	3.25.000382	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1822	3.25.000383	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1823	3.25.000387	Volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	Data volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1824	3.25.000388	Volume Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	Data volume pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1825	3.25.000392	Hari Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	Operasi kapal pengawas Kelautan dan perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas Kelautan dan perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	T	T	1. CDK Wilayah Ba	[3.25.05.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1826	3.25.000393	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Dirawat	Unit	1) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan 2) Perawatan kapal pengawas Kelautan dan Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas Kelautan dan perikanan. Perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas Kelautan dan perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) 3) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan 4) Perawatan prediktif adalah perewatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perbaikan mesin pada bagian atas	T	T	1. CDK Wilayah Barat 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK WIlayah Timur	[3.25.05.1.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1827	3.25.000394	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)	Forum	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah merupakan Forum koordinasi antar aparat Penegakan Hukum pada tingkat Daerah Provinsi untuk mengkoordinasikan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di masing-masing wilayah kerjanya sehingga tercipta sinergisitas antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan TPKP di Daerah. Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur di mana seluruh Pemerintah Daerah Provinsi (34 provinsi) telah dibentuk. Forum koordinasi yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah Provinsi tersebut berfungsi untuk: - Koordinasi kegiatan penyidikan TPKP tingkat - Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik TPKP pada tingkat - Penetapan jenis TPKP yang diprioritaskan untuk di proses secara - Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat - Identifikasi, pengaluran, dan analisa signifikansi TPKP	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1828	3.25.000395	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan	Pelaku Usaha	1) Pelaku Usaha Pemanfaatan SDK yaitu setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan yang terdiri dari: pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan pengangkatan benda muatan kapal ekstraksi pelaksanaan bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km2 (seratur kilometer persegi); dan/atau pipa dan/atau kabel bawah penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum (36001); penampungan dan penyaluran air baku (36002).	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1829	3.25.000396	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	1) SDM Pengawasan SDKP terdiri dari Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelollan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil (Polsus PWP3K) dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat dan c. sehat jasmani dan rohani 3) Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K meliputi: a. pegawai negeri sipil yang membidangi pengawasan	T	T	1. Bidang PSDKP 2. CDK Wilayah Barat 3. CDK Wilayah Selatan 4. CDK Wilayah Timur	[3.25.05.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1830	3.25.000397	Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah provinsi. 2) Unit Usaha Pemanfaatan Sumber Daya	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1831	3.25.000398	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Diadakan	Unit	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi/pemerintah daerah. Pengadaan kapal pengawas kelautan dan perikanan bagi Pemda Provinsi ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan provinsi yang dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas IV (12-&25 meter) dan kelas V (&12 meter).	T	T		[3.25.05.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1832	3.25.000399	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	1) Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya kelautan dan 3) Bangunan Operator adalah tempat tinggal untuk pengawas kelautan dan 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dan kelautan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1833	3.25.000400	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	1) Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang per orang atau korporasi dengan ancaman hukuman pidana antara lain berupa kurungan badan dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam UU bidang kelautan dan perikanan. 2) Sanksi pidana di bidang kelautan dan perikanan diterapkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh orang per orang dan/atau korporasi yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan. 3) Penanganan perkara pidana bidang kelautan dan perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam undang-undang yang menjadi kewenangannya atau KUHAP. 4) Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan dalam rangka pengangkatan Pejabat PPNS Perikanan, maka PPNS Perikanan Pusat memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia sedangkan PPNS	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1834	3.25.000412	Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	Dokumen Final RZWP-3-K yang memuat Peta Struktur Ruang Laut, Peta Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta KKPRL dan Matriks KKPRL	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1835	3.25.000413	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memuat dengan dokumen final pengaturan ruang darat dan pengaturan ruang laut.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1836	3.25.000414	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen	Dokumen Hasil Rekomendasi dan Evaluasi dalam rangka peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir (RZWP-3-K)	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1837	3.25.000415	Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1838	3.25.000416	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1839	3.25.000418	Volume Produksi Garam	Ton	Volume produksi garam lokal pada SEGAR merupakan Jumlah volume garam yang dihasilkan oleh rakyat maupun perusahaan yang berada di wilayah SEGAR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lainnya yang tidak berada pada wilayah SEGAR.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1840	3.25.000419	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi	Lokasi	Data lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi sesuai kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1841	3.25.000420	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut sampai dengan 12 Mil	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut yang diawasi sampai dengan 12 Mil	T	T	1. CDK Wilayah Timur 2. CDK Wilayah Selatan 3. CDK Wilayah Barat	[3.25.05.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1842	3.25.000421	Kasus pelanggaran usaha pengolahan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan	Perkara	Data pelanggaran bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan	T	T	Bidang PSDKP	[3.25.05.1.02.0003] [3.25.05.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1843	3.25.000422	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.02.0002] [3.25.05.1.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1844	3.25.000428	Lahan Garam	Ha	Luas Lahan Garam, Luas area yang digunakan untuk produksi garam	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0015] [3.25.02.1.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1845	3.25.000429	Petambak Garam	Orang	Petambak Garam, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi garam	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1846	3.25.000430	Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman	Dokumen	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan menjadi Dokumen Perencanaan dan paling sedikit memuat Detail Engineering Design Usaha Pergaraman dan/atau master plan kawasan.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1847	3.25.000431	Gudang Garam	Unit	Gudang Garam adalah tempat penyimpanan garam di tempat yang aman dan tidak mengurangi kadar garam yang telah dihasilkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1848	3.25.000432	Sarana Usaha Pergaraman	Unit	Sarana Usaha Bagi Petambak Garam seperti : Mesin pemurnian Garam, Mesin Sealer Geomembran dan perlengkapannya, Generator, alat pembersih meja garam, mesin jahit karung	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1849	3.25.000433	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha adalah banyaknya unit/kelompok usaha yang mendapat fasilitasi melalui penyusunan skema pembiayaan usaha, penumbuh kembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit.	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1850	3.25.000435	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru yang melakukan Perizinan Berusaha dalam rangka pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi dan juga Persetujuan penangkapan ikan dengan tujuan wisata yang menjadi kewenangan daerah dalam mendukung penangkapan ikan terukur	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1851	3.25.000436	Kegiatan Turnamen Memancing Di Wilayah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kegiatan	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan secara berkala di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1852	3.25.000437	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan yang dipetakan secara spasial yang terverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1853	3.25.000438	Luas kawasan ekosistem blue carbon Pada Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Ha	Luas kawasan ekosistem blue carbon (Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan) yang dipetakan secara spasial yang terverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1854	3.25.000439	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang mengelola dan melestarikan ekosistem padang lamun dan mangrove di luar kawasan hutan yang mengalami peningkatan kapasitas meliputi: - pemahaman terkait pentingnya ekosistem blue carbon - melakukan pemantauan/monitoring, pengukuran dan verifikasi ekosistem blue carbon - melakukan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim blue carbon yang terintegrasi dengan Sistem MRV Blue Carbon	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1855	3.25.000440	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Kewenangan Provinsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.05.1.02.0003] [3.25.05.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1856	3.25.004101	Rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1857	3.25.004106	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1858	3.25.004107	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1859	3.25.004108	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1860	3.25.004109	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1861	3.25.004110	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pengolahan Ikan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1862	3.25.004111	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pemasaran Ikan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1863	3.25.004112	SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi		&Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan&	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1864	3.25.004113	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1865	3.25.004114	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.06.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1866	3.25.004124	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1867	3.25.004125	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1868	3.25.004126	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1869	3.25.004138	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1870	3.25.004140	Rekomendasi izin tanda daftar Kapal Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi izin TDKP untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1871	3.25.004141	Permohonan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi izin TDKP untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1872	3.25.004142	UPT Pengelola	Unit	SK KDH Penetapan UPT Pengelola	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1873	3.25.004145	Penyedian fasilitas Penunjang	Unit	&Penyediaan Fasilitas penunjang berdasarkan sumber dana/anggaran&	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1874	3.25.004146	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1875	3.25.004147	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1876	3.25.004148	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	T	T		[3.25.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1877	3.25.004149	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang berisi rekomendasi dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1878	3.25.004150	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang berisi rekomendasi dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1879	3.25.004157	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1880	3.25.004158	Data potensi lahan budidaya berdasarkan RZWP3K	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1881	3.25.004159	Data lahan existing yang sudah dimanfaatkan untuk perikanan budidaya laut	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1882	3.25.004160	Data jenis ikan / komoditas yang dibudidayakan	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1883	3.25.004161	Data produksi benih dari unit pembenihan/hatchery	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1884	3.25.004163	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1885	3.25.004164	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota yang memiliki kartu KUSUKA	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1886	3.25.004169	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare), Pembentukan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	T	T	BLIKPL	[3.25.04.1.05.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1887	3.25.004170	Gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	Kelompok	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare), Pembentukan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	T	T	BLIKPL	[3.25.04.1.05.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1888	3.25.004171	Sarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Sarana Laboratorium Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	T	T	BLIKPL	[3.25.04.1.05.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1889	3.25.004172	Prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Prasarana Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	T	T	BLIKPL	[3.25.04.1.05.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1890	3.25.004173	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	T	T	BLIKPL	[3.25.04.1.05.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1891	3.25.004180	Izin penempatan dan pemanfaatan Rumpon	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi surat izin Penempatan Rumpon yang diterbitkan pada perairan yang menjadi kewenangan provinsi	T	T	Bidang Perikanan Tangkap	[3.25.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1892	3.25.004181	Pelabuhan Perikanan	Unit	jumlah prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1893	3.25.004183	Peralatan dan mesin penunjang pendataan penangkapan ikan terukur	Unit	Jumlah sarana pendukung pendataan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	T	T	1. PPP Bajomulyo 2. PPN Tegalsari 3. PPN Tasik Agung 4. PPP Klidanglor	[3.25.03.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1894	3.25.004184	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1895	3.25.004185	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1896	3.25.004186	Unit penangkapan ikan	Unit	jumlah sarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.03.1.01.0007] [3.25.03.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1897	3.25.004187	Kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	Kegiatan	Jumlah kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	T	T	1. PPP Larangan 2. PPP Klidang Lor 3. PPN Tegalsari 4. PPP Asemdoyong 5. Bidang Perikanan tangkap 6. PPP Wonokerto 7. PPN Tasik Agung 8. PPP Juwana / Bajomulyo 9. PPP Morodemak 10. PPP Tawang 11. PPP Karimunjawa 12. PPP Lohgending	[3.25.03.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1898	3.25.004188	mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan	Unit	Jumlah mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan untuk pembudidaya ikan di air payau atau air tawar	T	T	Dinas Kelautan dan Perikanan	[3.25.04.1.06.0002] [3.25.04.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1899	3.26.000006	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	Melaksanakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1900	3.26.000007	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dan sudah berkembang dengan pola verifikasi dan sertifikasi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1901	3.26.000008	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengembalian eksistensi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1902	3.26.000009	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Provinsi untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola stimulasi, identifikasi dan Profiling	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1903	3.26.000010	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARPROV melalui SK penetapan oleh Gubernur	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1904	3.26.000011	Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0009] [3.26.04.1.02.0010] [3.26.04.1.02.0012] [3.26.05.1.01.0001] [3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.1.01.0009] [3.26.05.1.02.0007] [3.26.02.1.04.0009] [3.26.05.1.02.0006] [3.26.05.1.02.0004] [3.26.05.1.02.0005] [3.26.02.2.04.0013] [3.26.04.2.02.0009] [3.26.04.2.02.0010] [3.26.04.2.02.0012] [3.26.05.2.02.0004] [3.26.05.2.02.0005] [3.26.05.2.02.0006] [3.26.05.2.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1905	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1906	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0001] [3.26.02.1.03.0012] [3.26.02.1.01.0004] [3.26.02.1.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1907	3.26.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan provinsi)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1908	3.26.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan provinsi)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1909	3.26.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1910	3.26.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1911	3.26.000030	Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan kajian terkait hasil dari sistem pemasaran yang sudah ada	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0005] [3.26.04.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1912	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1913	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1914	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1915	3.26.000042	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.04.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1916	3.26.000043	Dokumen Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1917	3.26.000045	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0002] [3.26.02.1.03.0008] [3.26.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1918	3.26.000047	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional serta terintegrasi dengan dokumen RTRW dan RDTR daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1919	3.26.000050	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1920	3.26.000053	Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1921	3.26.000055	Laporan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1922	3.26.000056	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yag dilakukan LSP P3 Sub Sekor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.02.0007] [3.26.05.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1923	3.26.000058	Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Bidang Pariwisata	Laporan	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata adalah kegiatan fasilitasi pendirian LSP baik bagi industri (P3) dan pendidikan (P1) bidang pariwisata yang bekerjasama dengan BNSP, berdasarkan NSPK Pedoman BNSP 202 Pedoman Pembentukan Pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1924	3.26.000059	Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 Bidang Pariwisata	Laporan	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata adalah kegiatan fasilitasi pendirian LSP baik bagi industri (P3) dan pendidikan (P1) bidang pariwisata yang bekerjasama dengan BNSP, berdasarkan NSPK Pedoman BNSP 202 Pedoman Pembentukan Pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1925	3.26.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Orang Kreatif	Laporan		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1926	3.26.000071	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor	Laporan	Melakukan indentifikasi UMKM dan produk-produknya, dan mengklasifikasi produk serta UMKM yang dapat dipasarkan secara lebih luas	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1927	3.26.000073	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1928	3.26.000078	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.04.0013] [3.26.05.2.02.0002] [3.26.02.2.04.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1929	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1930	3.26.000118	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dokumen		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1931	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	Rupiah		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1932	3.26.000142	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Sertifikasi	Unit Usaha		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.04.0007] [3.26.02.1.04.0008] [3.26.02.1.04.0012] [3.26.02.2.04.0006] [3.26.02.2.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1933	3.26.000143	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi	Unit Usaha		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.04.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1934	3.26.000148	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait akademisi bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur akademisi bidang pariwisata di tingkat Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1935	3.26.000149	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata di tingkat Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1936	3.26.000150	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait komunitas penggiat bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur komunitas penggiat bidang pariwisata di tingkat Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1937	3.26.000160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1938	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.&	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0019] [3.26.04.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1939	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0009] [3.26.02.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1940	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Data	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0003] [3.26.04.2.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1941	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0010] [3.26.02.2.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1942	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0006] [3.26.03.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1943	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.04.0010] [3.26.02.2.04.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1944	3.26.000170	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1945	3.26.000173	Lokasi pembangunan peningkatan kualitas pada daya tarik wisata unggulan Provinsi yang berbasis alam/budaya/buatan manusia	Lokasi	Mengidentifikasi dan mendata daya tarik wisata unggulan Provinsi yang dilakukan pembangunan/pengembangan fisik dan non fisik	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1946	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0007] [3.26.02.2.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1947	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0007] [3.26.02.2.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1948	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	& Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya. Rencana aksi menjabarkan program/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0017] [3.26.04.2.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1949	3.26.000179	Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1950	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.01.0001] [3.26.04.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1951	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.2.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1952	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0004] [3.26.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1953	3.26.000183	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.1.01.0005] [3.26.02.1.02.0004] [3.26.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1954	3.26.000184	Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1955	3.26.000185	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0002] [3.26.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1956	3.26.000186	Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	Melakukan bimbimgan teknis/workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM Ekraf melalui program Fasilitasi/pendukungan yang dilakukan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1957	3.26.000192	Data infrastruktur ruang kreatif		Ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1958	3.26.000194	Data Kondisi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1959	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.04.0006] [3.26.02.1.04.0009] [3.26.02.1.04.0011] [3.26.02.1.04.0015] [3.26.02.2.04.0007] [3.26.02.2.04.0009] [3.26.02.2.04.0010] [3.26.02.2.04.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1960	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1961	3.26.000197	Destinasi Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1962	3.26.000198	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1963	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.2.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1964	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0004] [3.26.02.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1965	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provins	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1966	3.26.000204	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1967	3.26.000206	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1968	3.26.000207	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0002] [3.26.02.1.03.0009] [3.26.02.3.05.0001] [3.26.02.4.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1969	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.1.01.0004] [3.26.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1970	3.26.000211	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0009] [3.26.02.2.02.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1971	3.26.000213	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1972	3.26.000215	Data jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi setelah difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1973	3.26.000216	Data kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan	Laporan	Memberikan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.02.0003] [3.26.03.4.01.0007] [3.26.05.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1974	3.26.000219	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1975	3.26.000220	Daya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1976	3.26.000223	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1977	3.26.000224	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1978	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.02.0001] [3.26.05.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1979	3.26.000230	Data kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.02.0001] [3.26.05.2.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1980	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1981	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1982	3.26.000236	Data Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata yang difasilitasi pelatihan	Orang	Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0005] [3.26.05.1.01.0006] [3.26.05.1.01.0012] [3.26.05.1.02.0005] [3.26.05.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1983	3.26.000237	Data kegiatan pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Orang	Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1984	3.26.000238	Data ASN di daerah yang memahami tentang kepariwisataan setelah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan	Orang	Melaksanakan Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1985	3.26.000239	Jumlah kegiatan Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan yang telah dilaksanakan	Orang		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1986	3.26.000243	Data Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0013] [3.26.05.1.01.0006] [3.26.05.1.02.0004] [3.26.05.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1987	3.26.000244	Data Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang telah dilaksanakan	Orang		T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1988	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0014] [3.26.05.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1989	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0014] [3.26.05.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1990	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0016] [3.26.05.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1991	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0016] [3.26.05.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1992	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1993	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1994	3.26.000257	Data Pelaku Usaha Ekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1995	3.26.000258	Data ASN di daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan	Orang	Melaksanakan Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1996	3.26.000270	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Lembaga	Penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi kreatif daerah mencakup inisiasi, koordinasi, dan pendirian badan hukum lembaga/asosiasi/pelaku usaha	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1997	3.26.000271	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0014]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1998	3.26.000272	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Orang	Kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif dalam bentuk pemberian konsultasi kekayaan intelektual	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1999	3.26.000278	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.05.3.03.0001] [3.26.05.4.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2000	3.26.000279	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.3.01.0007] [3.26.03.4.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2001	3.26.000280	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.03.3.01.0006] [3.26.03.4.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2002	3.26.000281	Perencanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kab/Kota adalah Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan tingkat Kabupaten/Kota sebagai acuan pelaksanaan yang terdiri atas Penyusunan tahapan kerangka penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota serta formulasi rencana aksi tindak lanjut pengukuran Indeks	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2003	3.26.000282	Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota menggunakan kerangka penilaian berupa indikator yang disesuaikan dengan ketersediaan data setempat dengan menggunakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2004	3.26.000284	Penetapan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota memperoleh ketetapan hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur dari provinsi yang melakukan penilaian dan SK Gubernur tersebut dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2005	3.26.000286	Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Dokumen	Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasia, keterpaduan baik perencanaan maupun pelasksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.1.03.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2006	3.26.000287	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	Tersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: 1. Sosialisasi/Bimtek/Coaching Clinic ttg Standar dan Sertifikasi Usaha (Permenparekraf) 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi UMK dengan usaha berisiko MT atau Tinggi	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.02.2.04.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2007	3.26.000288	Kegiatan / event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2008	3.26.000289	Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Produk	Kegiatan Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki KI mendapatkan nilai tambah dari KI tersebut. Dengan demikian, jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memiliki sertifikat HKI akan mendapat manfaat dari komersialisasi KI. Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan untuk mendorong Inovasi dan Kreatifitas di kalangan pelaku industri ekonomi kreatif, Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembentukan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan, Promosi Kreativitas Lokal, dan Penyediaan Akses Keuangan	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0021]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2009	3.26.000292	Produk yang Memperoleh Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Produk	Kekayaan Intelektual (KI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya dan inovasi yang mereka ciptakan, seperti karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang dilindungi secara hukum.	T	T	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	[3.26.04.1.02.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2010	3.27.000021	Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Laporan	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2011	3.27.000026	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian oleh penyuluh pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2012	3.27.000156	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu	Laporan	Laporan pengelolaan SDG hewan yang sesuai pedoman pembibitan atau budidaya ternak yang baik (GBP/GFP) yang memuat informasi mengenai rumpun, populasi, dan struktur populasi. Penilaian pedoman pembibitan atau budidaya ternak yang baik dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh kepala dinas yang rekomendasi penilaiannya akan dijadikan acuan dalam penerbitan sertifikasi.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2013	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2014	3.27.000223	Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan	Sertifikat	Jumlah keterangan benih tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh institusi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2015	3.27.000224	Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan	Sertifikat	Banyaknya Benih perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2016	3.27.000229	Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner	Unit	Sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.Â	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2017	3.27.000230	Varietas Unggul Baru Tumbuhan dan Mikroorganisme	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah varietas yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dapat digunakan sebagai bahan tanaman	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2018	3.27.000238	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2019	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2020	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.05.0004] [3.27.02.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2021	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2022	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2023	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2024	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2025	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2026	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2027	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2028	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Banyakanya benih batang perkebunan yang berasal dari kebun sumber benih yang ditetapkan dan disertifikasi oleh BPSB/ OPD berwenang melakukan sertifikasi benih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2029	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2030	3.27.000256	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2031	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2032	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2033	3.27.000266	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0012] [3.27.02.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2034	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	Jumlah Benih Ternak yang beredar	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0005] [3.27.02.2.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2035	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2036	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	Banyaknya benih ternak yang tersedia	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.05.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2037	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	Ketersediaan Jumlah Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2038	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2039	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0005] [3.27.02.2.05.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2040	3.27.000280	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2041	3.27.000284	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan Pakan yang berkualitas	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2042	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2043	3.27.000286	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Tanaman Pakan Ternak yang berkualitas	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2044	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0003] [3.27.04.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2045	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Benih/Bibit Ternak hasil produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2046	3.27.000296	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2047	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2048	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.02.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2049	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2050	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2051	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2052	3.27.000312	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.02.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2053	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Tanaman Pakan Ternak yang di produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2054	3.27.000319	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	Banyaknya UPTD inseminasi buatan, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.02.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2055	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.02.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2056	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	Kondisi terkini terkait wilayah kompartemen atau zona yang dinyatakan bebas dari penyakit	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2057	3.27.000326	Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian	Unit	Banyaknya laboratorium yang digunakan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian dalam kondisi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2058	3.27.000327	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.02.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2059	3.27.000333	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2060	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0003] [3.27.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2061	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.2.04.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2062	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2063	3.27.000338	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2064	3.27.000347	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan dalam rangka melindungi konsumen	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.06.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2065	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.06.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2066	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2067	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0009] [3.27.04.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2068	3.27.000367	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	Jumlah penyakit infeksius yang bersumber pada hewan sebagai dampak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan urbanisasi yang progresif	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007] [3.27.05.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2069	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001] [3.27.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2070	3.27.000374	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2071	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.02.0006] [3.27.04.2.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2072	3.27.000377	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2073	3.27.000378	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2074	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2075	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2076	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2077	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2078	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	Koordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2079	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait sarana peredaran pertanian. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2080	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. - Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2081	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.1.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2082	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0022]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2083	3.27.000415	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2084	3.27.000416	Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap benih/bibit ternak bersertifikat yang beredar	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2085	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2086	3.27.000418	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2087	3.27.000419	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terdampak bencana alam	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2088	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2089	3.27.000421	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi	Ha	Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2090	3.27.000422	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal perkebunan melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2091	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2092	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2093	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2094	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2095	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2096	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2097	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2098	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2099	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2100	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2101	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2102	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2103	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2104	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2105	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.06.0001] [3.27.02.2.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2106	3.27.000446	Jumlah pascapanen perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangungan dan alat pascapanen yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2107	3.27.000447	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	pelaksanaan tata kelola yang bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tumbuhan dan organisme	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2108	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.2.03.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2109	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2110	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2111	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.02.0004] [3.27.04.2.02.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2112	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2113	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	Penyediaan Bibit Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus bibit ternak	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.07.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2114	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.02.0007] [3.27.04.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2115	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.02.0007] [3.27.04.2.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2116	3.27.000498	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada satu kawasan wilayah Provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2117	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2118	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2119	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0013] [3.27.02.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2120	3.27.000505	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)	Setek	Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0009] [3.27.02.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2121	3.27.000507	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Bibit Ternak yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2122	3.27.000508	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.04.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2123	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.04.0004] [3.27.04.2.04.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2124	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2125	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0024]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2126	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka mendukung produktivitas hasil peternakan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2127	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan	Produk	unit usaha produk hewan segar berkemasan yang telah untuk emenuhi syarat persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0008] [3.27.04.2.04.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2128	3.27.000547	Jumlah Produksi Benih Ternak	Dosis	Banyaknya produksi benih ternak yang dihasilkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2129	3.27.000548	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2130	3.27.000549	Jumlah Produksi HPT	Ton	Banyaknya produksi hijau pakan ternak yang dihasilkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2131	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2132	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2133	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2134	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2135	3.27.000571	Jumlah rumpun yang dinilai	Rumpun	Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2136	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.2.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2137	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi	Laporan	Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.02.0002] [3.27.03.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2138	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2139	3.27.000584	Jumlah Sebaran Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2140	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2141	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.07.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2142	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2143	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2144	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2145	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.02.0002] [3.27.03.2.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2146	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.01.0004] [3.27.04.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2147	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2148	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	luas area kawasan perkebunan eksisting	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2149	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Ha	Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2150	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	Luas area kawasan tanaman pangan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2151	3.27.000626	Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian	Dokumen	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.03.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2152	3.27.000627	Jumlah unit usaha yang telah dilakukan pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada unit usaha produk hewan	Unit Usaha	unit usaha produk hewan yang telah didampingi untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2153	3.27.000628	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	Ketersediaan unit usaha produk hewan yang telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap penerapan usaha produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersayaratkan	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.04.1.03.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2154	3.27.000656	Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak)	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2155	3.27.000659	Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)	Ton	Jumlah benih hortikultura yang tersedia di tingkat provinsi baik berupa benih dasar, pokok, dan benih sebar	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2156	3.27.000660	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hasil peternakan yang dibutuhkan pokyan/gapoktan maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hasil peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pencuci, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dehidrator dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0008] [3.27.02.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2157	3.27.000661	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi baik	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat dan mesin pascapanen hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik Sarana hasil pascapanen peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2158	3.27.000662	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi rusak	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat dan mesin pascapanen hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak. Sarana pascapanen hasil peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2159	3.27.000663	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hasil peternakan yang dibutuhkan poktan/gapoktan maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hasil peternakan sesuai komoditas seperti mesin pasteurisasi, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin spinner, mesin continous sealer, freezer, cultivator, mesin jahit karung dan sarana pendukung pengolahan hasil peternakan lain	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.01.0008] [3.27.02.1.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2160	3.27.000668	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2161	3.27.000681	Data Pekebun	Pekebun	Jumlah pekebun yang berusaha pada budidaya tanaman perkebunan dan memiliki STDB	T	T	Dinas Pertanian dan Peternakan	[3.27.02.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2162	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0005] [3.28.03.1.04.0010] [3.28.03.1.04.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2163	3.28.000002	Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar	Kasus	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit adalah Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dengan alat ukur Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar dengan satuan laporan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0009] [3.28.03.1.09.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2164	3.28.000003	Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan	Ha	Luas Ekosistem yang dipulihkan melalui kegiatan penanaman bersama masyarakat, pemeliharaan tanaman, pengayaan, penanganan gulma, penanganan IAS (invasif Alien Species), pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0005] [3.28.04.1.01.0014] [3.28.03.1.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2165	3.28.000004	Data Luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Luas Kawasan Hutan yang telah ditargetkan untuk dilakukan Pengamanan Kawasan Hutan (Preventif dan Represif) terkait Perambahan Kawasan hutan dan pertambangan ilegal	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.05.0002] [3.28.03.1.05.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2166	3.28.000005	Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Luas Kawasan mangrove yang dilakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan berupa kegiatan penanaman, pemeliharaan dan kegiatan pendukungnya meliputi prakondisi, penyusunan rancangan teknis, pendampingan, pengawasan dan penilaian, serta monitoring dan evaluasi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2167	3.28.000007	Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan Sumber Benih adalah Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih termasuk pemeliharaannya dengan alat ukur Luas sumber benih yang dibangun dengan satuan Hektar	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2168	3.28.000008	Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Melakukan kegiatan Patroli dan Operasi (Preventif dan Represif) Hasil Hutan Illegal (illegal logging, perburuan liar, dan lain-lainnya terkait dengan ekosistem)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.05.0007] [3.28.03.1.05.0008] [3.28.03.1.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2169	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara termasuk kegiatan penanaman vegetatif, pemeliharaan serta kegiatan pendukungnya	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2170	3.28.000011	Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pedukung pembangunan sumber benih	Ha	Pembangunan Sumber Benih adalah Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih dengan alat ukur Luas sumber benih yang dibangun dengan satuan Hektar	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2171	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	Pelaksanaan prakondisi kawasan perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan) meliputi sosialisasi tingkat tapak, pencermatan PIAPS, fasilitasi usulan dan monitoring termasuk penyelesaian konflik tenurial dalam kerangka perhutanan sosial	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.05.1.01.0003] [3.28.05.1.01.0008] [3.28.05.3.01.0004] [3.28.05.4.01.0004] [3.28.08.3.01.0001] [3.28.08.4.01.0001] [3.28.05.1.01.0009] [3.28.08.3.01.0001] [3.28.08.4.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2172	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Kegiatan penanaman di luar kawasan hutan termasuk Proyek Strategis Nasional/PSN pada greenbelt atau sekitar danau untuk kegiatan penanaman di fasilitas sosial/umum selain di hutan rakyat dan hutan kota	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0004] [3.28.03.1.04.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2173	3.28.000014	desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2174	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan layanan dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan satuan jumlah dokumen	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2175	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung yang memuat luas	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.03.0002] [3.28.03.1.03.0012] [3.28.03.1.03.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2176	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.03.0005] [3.28.03.1.03.0015] [3.28.03.3.12.0001] [3.28.03.4.12.0001] [3.28.03.1.03.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2177	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.03.0004] [3.28.03.1.03.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2178	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	Dokumen	Pelaksamaan kegiatan rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2179	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan	Dokumen	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS termasuk pengelolaan danau	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.06.1.01.0004] [3.28.06.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2180	3.28.000024	Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Laporan	Pembuatan laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2181	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolaan DAS	Dokumen	Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.06.1.01.0001] [3.28.06.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2182	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis	Dokumen	Membentuk forum baru dan/atau mengembangkan forum DAS yang sudah ada termasuk kelompok kerja mangrove daerah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.06.1.01.0005] [3.28.06.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2183	3.28.000030	Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Unit	Melakukan pemantauan pelaksanaan kewajiban pelaporan RKOPHH dan Laporan Kinerja Bulanan PBPHH (Kayu dan Bukan Kayu) Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenanganÂ Provinsi.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.07.0001] [3.28.03.1.07.0006] [3.28.03.1.07.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2184	3.28.000032	Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah	Dokumen	Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan Bukan Kayu) Skala Usaha Kecil dan Menengah berikut pelaksanaan pengenaan sanksi administratif (jikaÃ diperlukan).	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.07.0003] [3.28.03.1.07.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2185	3.28.000035	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap RKUPH dan RKTPH	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.03.0007] [3.28.03.1.03.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2186	3.28.000038	Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah	Kasus	Melakukan Perencanaan Pemulihan Lahan Basah (gambut dan mangrove)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.03.0003] [3.28.04.1.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2187	3.28.000039	Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan	Dokumen	Melakukan fasilitasi terkait pengajuan dan rencana pengelolaan KHDTK, Pengelolaan KHDTK	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.08.0001] [3.28.03.3.11.0001] [3.28.03.4.11.0001] [3.28.03.1.08.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2188	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2189	3.28.000043	Dokumen rencana, laporan kegiatan	Kasus	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kehutanan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terdahap rencana kehutanan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.01.0011] [3.28.02.3.05.0001] [3.28.04.1.01.0011] [3.28.02.3.05.0002] [3.28.02.4.05.0002] [3.28.02.4.05.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2190	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	Kasus	Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung wilayah DAS	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.02.3.02.0001] [3.28.02.4.02.0001] [3.28.06.1.01.0002] [3.28.06.1.01.0008] [3.28.06.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2191	3.28.000045	Kegiatan pemanfaatan Tahura, Masyarakat yang mengikuti kegiatan. Laporan Kegiatan.	Permohonan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Tahura adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam tahura yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Wisata Alam, pemanfaatan air dan energi air, pemanfaatan Panas Bumi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0006] [3.28.04.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2192	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelakasana penanganan kerusakan lahan basah.	Kasus	Melakukan Pananganan Kerusakan Lahan Basah (gambut dan mangrove)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.03.0004] [3.28.04.1.03.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2193	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	Kasus	Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan hasil hutan (ilegal logging dan perburuan liar)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.05.0003] [3.28.03.1.05.0008] [3.28.03.1.05.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2194	3.28.000048	Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan.	Kegiatan	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0002] [3.28.04.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2195	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan.	Kasus	Melakukan intervensi manajemen pengelolaan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam apendix cites meliputi inventarisasi, pemantauan, penyelamatan, pembinaan populasi, pembinaan habitat, serta penilitian dan pengembangan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.03.0006] [3.28.04.1.03.0007] [3.28.04.1.03.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2196	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura.	Kegiatan	Peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2197	3.28.000053	Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar	Kasus	Melakukan pengendalian konflik satwa liar dengan manusia, melalui penanaman tumbuhan pakan satwa, mitigasi konflik satwa dan manusia dengan membentuk pokja penanganan koflik, patroli terpadu	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0003] [3.28.04.1.01.0013] [3.28.04.2.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2198	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali.	Kasus	Melakukan pengendalian kerusakan ekosistem karst melalui kajian kerusakan, kajian ekosistem referensi, mekanisme penanganan dan keterlibatan para pihak dilengkapi dengan peta kawasan.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2199	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	Kelompok	Melaksanakan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan menuju KTH mandiri dan Kelompok Perhutanan Sosial melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.05.1.01.0002] [3.28.05.1.01.0006] [3.28.05.3.01.0005] [3.28.05.4.01.0005] [3.28.08.3.02.0001] [3.28.08.3.03.0001] [3.28.08.3.04.0001] [3.28.08.3.04.0002] [3.28.08.3.04.0003] [3.28.08.3.04.0004] [3.28.08.4.02.0001] [3.28.08.4.03.0001] [3.28.08.4.04.0001] [3.28.08.4.04.0002] [3.28.08.4.04.0003] [3.28.08.4.04.0004] [3.28.08.3.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2200	3.28.000056	Kerja sama Tahura, Laporan Kegiatan Kerjasama, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	Melaksanakan penyelenggaranan kerja sama TAHURA provinsi dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2201	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check.	Kasus	Melakukan inventarisasi dan verifikasi area dengan keanekaragaman hayati tinggi meliputi kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa secara langsung di lapangan/ground check, analisis data sekunder, analisis data hasil ground check untuk dilakukan verifikasi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0003] [3.28.04.1.01.0013] [3.28.02.3.01.0001] [3.28.02.4.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2202	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah	Laporan	Fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH skala Kecil dan Menengah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.06.0002] [3.28.03.1.06.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2203	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi kegiatan pencegahan , penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. (detil jenis-jenis kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan dapat merujuk pada PMK No.216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.05.0005] [3.28.03.1.05.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2204	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Kasus	Melakukan Kegiatan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.07.0002] [3.28.03.1.07.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2205	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan dalam rangka penyelesaian Kasus Pidana (P-21) dan Perdata bidang Kehutanan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.05.0004] [3.28.04.1.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2206	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan.	Kasus	Melaksanakan penyelenggaranan kerja sama TAHURA provinsi dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2207	3.28.000065	Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan.	Kasus	Melakukan Pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (bernilai keanekaragaman hayati tinggi Kewenangan Daerah Provinsi	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2208	3.28.000066	Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, Pengadaan dan Pengedaran bibit, serta Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit dalam Provinsi, laporan Pelayanan Periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran bibit serta kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit.	Kasus	Penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko berupa kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani melalui Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0001] [3.28.03.1.09.0007] [3.28.03.1.09.0008] [3.28.03.1.09.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2209	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	penyuluh	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan (Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan Swasta, Polisi Kehutanan, Manggala Agni, MMP, MPA)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.05.1.01.0001] [3.28.05.1.01.0005] [3.28.05.1.01.0007] [3.28.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2210	3.28.000068	Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl.	Laporan	Melakukan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk Lampiran Cites personil Polisi Kehutanan yang didukung dengan Sarana Prasarana yang memadai	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2211	3.28.000069	Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan.	Personil	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.04.1.01.0002] [3.28.04.1.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2212	3.28.000073	Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih	Kasus	Sertifikat mutu benih adalah terlaksananya sertifikasi sumber benih dengan alat ukur jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Mutu Benih dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2213	3.28.000074	Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit	Kasus	Sertifikat mutu bibit adalah terlaksananya sertifikasi mutu bibit dengan alat ukur jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Mutu Bibit dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2214	3.28.000075	Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit	Kasus	Sertifikat sumber benih adalah pelaksanaan sertifikasi sumber benih dengan alat ukur jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Sumber Benih dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.09.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2215	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS	Lembaga	Membentuk forum baru dan/atau mengembangkan forum DAS yang sudah ada termasuk kelompok kerja mangrove daerah	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.06.1.01.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2216	3.28.000078	Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.04.0005] [3.28.03.1.04.0010] [3.28.03.1.04.0012] [3.28.03.1.04.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
2217	3.28.000079	Unit managemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	Unit	Fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan Menengah untuk meperoleh pasokan bahan baku dan akses Pasar.	T	T	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	[3.28.03.1.06.0008] [3.28.03.1.06.0003] [3.28.03.1.06.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2218	3.29.000004	Data Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor dan impor Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.05.1.03.0002] [3.29.05.1.06.0004] [3.29.05.3.07.0001] [3.29.05.4.07.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2219	3.29.000005	Data Penjualan Tenaga Listrik;	Dokumen	Dokumen Jumlah penjualan tenaga listrik.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2220	3.29.000006	Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin;	Perusahaan	Jumlah perusahaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2221	3.29.000008	Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Unit	Jumlah cekungan air tanah dalam daerah provinsi.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2222	3.29.000009	Data Eksisting Pembangkit Listrik (EBT dan Fosil)	Unit	Jumlah pembangkit listrik yang berbasis EBT dan fosil yang masih beroperasi.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2223	3.29.000010	Data Harga Jual Tenaga Listrik;	Rupiah	Total biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2224	3.29.000011	Data Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Jumlah Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2225	3.29.000012	Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	KmÂ²	Luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.02.1.03.0001] [3.29.02.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2226	3.29.000013	Data Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Unit Usaha	Jumlah Perusahaan Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang telah dilakukan pembinaan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.05.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2227	3.29.000014	Data Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Zona	Jumlah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya yang telah ditetapkan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.02.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2228	3.29.000015	Data Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Jumlah penjualan kelebihan tenaga listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2229	3.29.000016	Data Penyimpangan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kasus	Jumlah kasus penetapan Nilai Perolehan Air Tanah atau nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah khususnya dalam daerah provinsi yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.02.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2230	3.29.000020	Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Kasus	Jumlah kasus Perizinan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.05.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2231	3.29.000022	Data Penyimpangan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Kasus	Jumlah kasus zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya yang implementasinya tidak dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.02.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2232	3.29.000023	Data Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.05.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2233	3.29.000024	Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku	Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Operasi atau izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang masih berlaku.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.02.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2234	3.29.000026	Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	Dokumen jumlah realisasi anggaran penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2235	3.29.000027	Data Realisasi Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik di daerah belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2236	3.29.000030	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang telah direkomendasikan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.05.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2237	3.29.000031	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang telah direkomendasikan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2238	3.29.000033	Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0001] [3.29.06.1.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2239	3.29.000034	Data Rumah Tangga Tidak Mampu	Dokumen	Dokumen Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0001] [3.29.06.1.06.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2240	3.29.000036	Data Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan	Titik	Jumlah Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2241	3.29.000037	Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	Dokuem rencana Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang akan dicapai.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2242	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Wilayah yang Belum Teraliri Listrik.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.06.1.06.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2243	3.29.000039	Data Zona Konservasi Air Tanah;	Zona	Jumlah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya.	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.02.1.01.0001] [3.29.02.3.04.0001] [3.29.02.3.06.0001] [3.29.02.4.04.0001] [3.29.02.4.06.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2244	3.29.000043	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Unit	Penghasil listrik yang bersumber dari Tenaga Sinar matahari (surya)	T	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	[3.29.05.1.07.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2245	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	Bahan Berbahaya		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.02.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2246	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	Barang		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2247	3.30.000005	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.	T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2248	3.30.000006	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.	T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2249	3.30.000007	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.	T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2250	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.02.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2251	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2252	3.30.000011	Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Distributor		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2253	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	Dokumen		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.03.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2254	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2255	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	Kalibrasi		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.02.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2256	3.30.000018	Kegiatan Distribusi yang telah diperiksa	Kegiatan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.03.0005]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2257	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Kegiatan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.03.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2258	3.30.000028	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.07.1.03.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2259	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2260	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2261	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2262	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2263	3.30.000037	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.05.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2264	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.05.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2265	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2266	3.30.000040	Laporan Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang telah berpartisipasi	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2267	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.05.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2268	3.30.000042	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.07.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2269	3.30.000043	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.07.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2270	3.30.000055	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pestisida	Kegiatan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.03.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2271	3.30.000059	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.02.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2272	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota	Pelaku Usaha		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.04.1.02.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2273	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.06.1.02.0007]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2274	3.30.000100	Pusat Distribusi Provinsi yang telah terlaksana	Unit		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.03.1.01.0002]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2275	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.30.02.1.04.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2276	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	Laporan		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2277	3.31.000028	Peninjauan kembali RPIP setiap 5 tahun	Dokumen		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.02.1.01.0006]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2278	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Dokumen		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.02.1.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2279	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.02.1.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2280	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.03.2.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2281	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2282	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2283	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.03.1.01.0003]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2284	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2285	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.03.1.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2286	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen		T	T	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	[3.31.02.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2287	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0008] [3.32.03.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2288	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0014] [3.32.03.2.01.0008] [3.32.03.2.01.0011]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2289	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2290	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satuannya kepala keluarga)	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2291	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0004] [3.32.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2292	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	Jumlah Calon transmigan atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2293	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2294	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2295	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2296	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	Naskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0001] [3.32.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2297	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2298	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	Pemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0004] [3.32.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2299	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0011] [3.32.03.2.01.0012]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2300	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0009]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2301	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0001] [3.32.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2302	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0001] [3.32.03.2.01.0001]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2303	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.2.01.0004]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2304	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0011] [3.32.03.1.01.0015] [3.32.03.1.01.0004] [3.32.03.1.01.0016] [3.32.03.2.01.0004] [3.32.03.2.01.0014] [3.32.03.2.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2305	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0012] [3.32.03.2.01.0015]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2306	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0013] [3.32.03.2.01.0016]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2307	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0016] [3.32.03.2.01.0018]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2308	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0017] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2309	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	T	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	[3.32.03.1.01.0014] [3.32.03.2.01.0011] [3.32.03.2.01.0008]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2310	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses penataan, evaluasi, dan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2311	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses pendampingan, pembinaan, evaluasi, dan/atau rekomendasi dari pemerintah tingkat atas (provinsi atau pusat) kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penataan struktur dan fungsi kelembagaan perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2312	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan adalah dokumen resmi instansi yang memuat informasi sistematis mengenai karakteristik jabatan, beban kerja jabatan, serta nilai/kelas jabatan, yang disusun melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan analisis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.01.0003]	SEKRETARIAT DAERAH
2313	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	dokumen resmi yang memuat bukti, data, laporan, dan informasi terukur mengenai pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan, serta capaian Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar evaluasi, penilaian mandiri, verifikasi, dan pelaporan kinerja Reformasi Birokrasi.	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2314	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Dokumen resmi yang disusun secara periodik sebagai hasil dari proses pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap tingkat pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah berdasarkan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian hasil dengan target yang telah ditetapkan	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2315	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	dokumen resmi yang disusun secara sistematis dan terukur untuk menggambarkan tingkat penerapan nilai-nilai budaya kerja dalam suatu organisasi selama periode tertentu, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta memuat hasil analisis, temuan, hambatan, dan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi dan perilaku kerja pegawai.	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.02.0003]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2316	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	Dokumen resmi yang menjadi bukti tertulis atas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, prosedur, serta mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada OPD dan Kab Kota	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.02.0004]	SEKRETARIAT DAERAH
2317	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik adalah dokumen resmi yang memuat catatan terstruktur mengenai proses, bentuk dukungan, hasil, serta tindak lanjut dari kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.	T	T	Biro Organisasi	[4.01.02.1.02.0005]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2318	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	dokumen resmi yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, fasilitasi, perumusan, penelaahan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan, yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pertanggungjawaban kinerja	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2319	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mencakup fasilitasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, serta bahan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan umum	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2320	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang meliputi penyiapan, pengoordinasian, verifikasi, dan penatausahaan administrasi terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan hubungan kerja Kepala Daerah dan DPRD	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2321	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan pemerintahan, yang meliputi pengkajian, perumusan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan pembagian dan penataan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2322	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	dokumen resmi yang disusun sebagai hasil kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi penilaian atas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disusun secara sistematis, objektif, dan terukur sesuai dengan pedoman yang berlaku, serta digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban kinerja pemerintahan	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.02.0003]	SEKRETARIAT DAERAH
2323	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	kegiatan kerja sama yang dilaksanakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.03.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2324	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	kegiatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dan/atau pihak swasta, yang proses perencanaan, perumusan, koordinasi, fasilitasi, penilaian, penandatanganan, serta pemantauan dan evaluasinya difasilitasi oleh perangkat daerah yang berwenang	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.03.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2325	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah lain, badan usaha, dan/atau pihak terkait lainnya, yang dilakukan evaluasi secara sistematis terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, manfaat, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberlanjutan kerja sama, yang hasilnya dituangkan dalam dokumen evaluasi dan digunakan sebagai bahan perbaikan, pengambilan keputusan, dan pelaporan kinerja kerja sama	T	T	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	[4.01.03.1.03.0003]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2326	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	Kemampuan Biro dalam menghimpun dan memvalidasi data jumlah lembaga dan sarana keagamaan (Masjid, Gereja, Pura, dll) yang aktif.	T	T	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	[4.01.04.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2327	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	Jumlah organisasi, yayasan, atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan mental, karakter, dan kerohanian yang menerima dukungan atau bantuan dari pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun	T	T	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	[4.01.04.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2328	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	dokumen resmi yang disusun oleh perangkat daerah BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH yang memuat seluruh rangkaian proses pengawalan kebijakan pendidikan dari sisi non-teknis.	T	T	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	[4.01.04.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2329	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	dokumen resmi yang disusun oleh perangkat daerah BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH yang memuat seluruh rangkaian proses pengawalan kebijakan kesehatan dari sisi non-teknis.	T	T	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	[4.01.04.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2330	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	dokumen resmi yang disusun oleh perangkat daerah BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH yang memuat seluruh rangkaian proses pengawalan kebijakan sosial dari sisi non-teknis.	T	T	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	[4.01.04.1.02.0003]	SEKRETARIAT DAERAH
2331	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	dokumen resmi yang disusun oleh perangkat daerah BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH yang memuat seluruh rangkaian proses pengawalan kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dari sisi non-teknis.	T	T	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	[4.01.04.1.03.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2332	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	dokumen resmi yang disusun oleh perangkat daerah BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH yang memuat seluruh rangkaian proses pengawalan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari sisi non-teknis.	T	T	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	[4.01.04.1.03.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2333	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun adalah seluruh rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang disiapkan, dirumuskan, dan disusun oleh perangkat daerah bersama Biro Hukum sesuai dengan mekanisme dan tahapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	T	T	Biro Hukum	[4.01.05.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2334	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	Produk Hukum Penetapan yang Disusun adalah seluruh rancangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang disiapkan, dirumuskan, dan disusun oleh perangkat daerah bersama Biro Hukum sesuai dengan mekanisme dan tahapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	T	T	Biro Hukum	[4.01.05.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2335	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	Dokumen Hukum yang didokumentasikan dan diinformasikan oleh Biro Hukum sesuai Standar Pengelolaan dokumen hukum	T	T	Biro Hukum	[4.01.05.1.01.0003]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2336	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	Seluruh Produk Hukum yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk difasilitasi atau dievaluasi Pemerintah Provinsi	T	T	Biro Hukum	[4.01.05.1.01.0004]	SEKRETARIAT DAERAH
2337	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	Masalah Hukum yang diselesaikan adalah semua permasalahan hukum litigasi perdata/TUN atau peradilan lainnya yang diselesaikan oleh Biro hukum	T	T	Biro Hukum	[4.01.05.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2338	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan adalah seluruh permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan aduan masyarakat yang bersifat non litigasi yang ditangani/ difasilitasi/ diselesaikan oleh Biro Hukum serta peran Biro Hukum dalam fasilitasi, evaluasi dan implementasi HAM Daerah	T	T	Biro Hukum	[4.01.05.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2339	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	proses Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	T	T	Biro Perekonomian	[4.01.06.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2340	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	- hasil proses Fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMyang telah dilaksanakan - fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	T	T	Biro Perekonomian	[4.01.06.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2341	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	- hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dalam satu tahun - penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam satu tahun - hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan dalam satu tahun - hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan dalam satu tahun	T	T	Biro Perekonomian	[4.01.06.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2342	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dalam satu tahun	T	T	Biro Perekonomian	[4.01.06.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2343	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	- hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dalam satu tahun	T	T	Biro Perekonomian	[4.01.06.1.02.0003]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2344	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	- Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha - Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	T	T	Biro BUMD dan BLUD	[4.01.06.1.03.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2345	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	- Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi - Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan	T	T	Biro BUMD dan BLUD	[4.01.06.1.03.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2346	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	- Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	T	T	Biro BUMD dan BLUD	[4.01.06.1.03.0004]	SEKRETARIAT DAERAH
2347	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	T	T	Biro BUMD dan BLUD	[4.01.06.1.03.0005]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2348	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat informasi mengenai penyusunan strategi pengadaan berupa Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Standar Harga Satuan (SHS).	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2349	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat informasi fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui Tender/Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung dan e-Purchasing.	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2350	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat informasi mengenai pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan kontrak serta permasalahan yang muncul selama proses pengadaan barang/jasa.	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.01.0003]	SEKRETARIAT DAERAH
2351	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	Laporan yang memuat informasi mengenai pengelolaan aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya, pengelolaan akun pengguna (PA/KPA, PPK, Pokja, Penyedia), Layanan dan Dukungan Pengguna, serta pengamanan sistem dan data (backup dan keamanan akses),	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2352	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat informasi mengenai kegiatan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan fitur, integrasi sistem, peningkatan kapasitas dan keamanan aplikasi, pengujian, implementasi, serta evaluasi kinerja sistem dalam mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2353	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat informasi mengenai pengelolaan data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyajian, dan pemanfaatan data pengadaan dari berbagai sistem pengadaan secara elektronik guna mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan.	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.02.0003]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2354	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.03.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2355	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Laporan yang memuat informasi mengenai penguatan UKPBJ, struktur organisasi UKPBJ, penetapan fungsi dan tugas UKPBJ, kualifikasi dan sertifikasi SDM PBJ dan pengembangan kompetensi SDM, serta SOP dan pedoman pelaksanaan pengadaan.	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.03.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2356	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Laporan yang memuat informasi mengenai pendampingan advokasi pengadaan barang/jasa berupa konsultasi, bimbingan teknis, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh UKPBJ.	T	T	Biro Pengadaan Barang/Jasa	[4.01.07.1.03.0003]	SEKRETARIAT DAERAH
2357	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	-Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengen	T	T	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	[4.01.08.1.01.0001]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2358	4.01.000052	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	Laporan proses Koordinasi, Fasilitasi dan Penge	T	T	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	[4.01.08.1.01.0002]	SEKRETARIAT DAERAH
2359	4.01.000053	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	- Laporan Hasil proses Koordinasi, Fasilitasi dan	T	T	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	[4.01.08.1.01.0003]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2360	4.01.000054	Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	Dokumen hasil proses Koordinasi, Analisis dan I	T	T	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	[4.01.08.1.02.0001]	SEKRETARIAT DAERAH
2361	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelap	T	T	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	[4.01.08.1.02.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2362	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas	T	T	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	[4.01.08.1.02.0003]	SEKRETARIAT DAERAH
2363	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui LBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	T	T	Biro Hukum	[4.01.02.2.03.0002]	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2364	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.05.0004] [4.02.02.2.05.0004]	SEKRETARIAT DPRD
2365	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2366	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.01.0001] [4.02.02.2.01.0001]	SEKRETARIAT DPRD
2367	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.01.0005] [4.02.02.2.01.0005]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2368	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.02.0003] [4.02.02.2.02.0003]	SEKRETARIAT DPRD
2369	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.02.0006] [4.02.02.2.02.0006]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2370	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0001] [4.02.02.2.03.0001]	SEKRETARIAT DPRD
2371	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0002] [4.02.02.2.03.0002]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2372	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0003] [4.02.02.2.03.0003]	SEKRETARIAT DPRD
2373	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0004] [4.02.02.2.03.0004]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2374	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0005] [4.02.02.2.03.0005]	SEKRETARIAT DPRD
2375	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0006] [4.02.02.2.03.0006]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2376	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0007] [4.02.02.2.03.0007]	SEKRETARIAT DPRD
2377	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.03.0008] [4.02.02.2.03.0008]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2378	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.04.0001] [4.02.02.2.04.0001]	SEKRETARIAT DPRD
2379	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.04.0002] [4.02.02.2.04.0002]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2380	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.04.0004] [4.02.02.2.04.0004]	SEKRETARIAT DPRD
2381	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.04.0005] [4.02.02.2.04.0005]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2382	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.04.0007] [4.02.02.2.04.0007]	SEKRETARIAT DPRD
2383	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.05.0002] [4.02.02.2.05.0002]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2384	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.05.0003] [4.02.02.2.05.0003]	SEKRETARIAT DPRD
2385	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.06.0001] [4.02.02.2.06.0001]	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2386	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		T	T	Sekretariat DPRD	[4.02.02.1.06.0002] [4.02.02.2.06.0002]	SEKRETARIAT DPRD
2387	5.01.000001	Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.02.0002] [5.01.02.2.02.0002]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2388	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0004] [5.01.02.2.01.0004]	PERENCANAAN
2389	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2390	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0005]	PERENCANAAN
2391	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.02.0004] [5.01.02.2.02.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2392	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.04.0001] [5.01.02.2.04.0001]	PERENCANAAN
2393	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.02.0001] [5.01.02.2.02.0001]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2394	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.04.0003] [5.01.02.2.04.0003]	PERENCANAAN
2395	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.04.0002] [5.01.02.2.04.0002]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2396	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0001] [5.01.03.2.03.0001]	PERENCANAAN
2397	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0005] [5.01.03.2.03.0005]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2398	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0006]	PERENCANAAN
2399	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.03.0004]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2400	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0001] [5.01.02.2.01.0001]	PERENCANAAN
2401	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.03.0002] [5.01.02.2.03.0002]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2402	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0006] [5.01.03.2.02.0006]	PERENCANAAN
2403	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0006] [5.01.03.2.03.0006]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2404	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0002] [5.01.03.2.03.0002]	PERENCANAAN
2405	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0006] [5.01.03.2.01.0006]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2406	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0002] [5.01.03.2.01.0002]	PERENCANAAN
2407	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0002] [5.01.03.2.02.0002]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2408	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.03.0003] [5.01.02.2.03.0003]	PERENCANAAN
2409	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0007] [5.01.03.2.01.0007]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2410	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0003] [5.01.03.2.01.0003]	PERENCANAAN
2411	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0003] [5.01.03.2.02.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2412	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0007] [5.01.03.2.02.0007]	PERENCANAAN
2413	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0003] [5.01.03.2.03.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2414	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0007] [5.01.03.2.03.0007]	PERENCANAAN
2415	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.03.0001] [5.01.02.2.03.0001]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2416	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0004] [5.01.03.2.03.0004]	PERENCANAAN
2417	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0008] [5.01.03.2.03.0008]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2418	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0008] [5.01.03.2.01.0008]	PERENCANAAN
2419	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0004] [5.01.03.2.01.0004]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2420	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0004] [5.01.03.2.02.0004]	PERENCANAAN
2421	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0008] [5.01.03.2.02.0008]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2422	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.02.0002] [5.01.02.2.02.0002]	PERENCANAAN
2423	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.04.0003] [5.01.02.2.04.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2424	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]	PERENCANAAN
2425	5.01.000047	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.02.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2426	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0002] [5.01.03.2.03.0002]	PERENCANAAN
2427	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0006] [5.01.03.2.03.0006]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2428	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0006] [5.01.03.2.01.0006]	PERENCANAAN
2429	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0002] [5.01.03.2.01.0002]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2430	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0002] [5.01.03.2.02.0002]	PERENCANAAN
2431	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0006] [5.01.03.2.02.0006]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2432	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0003] [5.01.03.2.03.0003]	PERENCANAAN
2433	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.03.0007] [5.01.03.2.03.0007]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2434	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0007] [5.01.03.2.01.0007]	PERENCANAAN
2435	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.01.0003] [5.01.03.2.01.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2436	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0003] [5.01.03.2.02.0003]	PERENCANAAN
2437	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.03.1.02.0007] [5.01.03.2.02.0007]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2438	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0004] [5.01.02.2.01.0004]	PERENCANAAN
2439	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]	PERENCANAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2440	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	T	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	[5.01.02.1.02.0003]	PERENCANAAN
2441	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.01.0001] [5.02.02.2.01.0001]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2442	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.01.0002] [5.02.02.2.01.0002]	KEUANGAN
2443	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.01.0007] [5.02.02.2.01.0007]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2444	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.01.0008] [5.02.02.2.01.0008]	KEUANGAN
2445	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.01.0009] [5.02.02.2.01.0009]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2446	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.01.0013]	KEUANGAN
2447	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.02.0001] [5.02.02.1.02.0002]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2448	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.02.0003]	KEUANGAN
2449	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.02.0004]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2450	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.02.0005]	KEUANGAN
2451	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.02.0011]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2452	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.02.0012]	KEUANGAN
2453	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.03.0001] [5.02.02.2.02.0001]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2454	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.03.0003] [5.02.02.2.02.0003]	KEUANGAN
2455	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.03.0006] [5.02.02.2.02.0006]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2456	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.03.0009] [5.02.02.2.02.0009]	KEUANGAN
2457	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.03.0010] [5.02.02.2.02.0010]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2458	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.03.0011] [5.02.02.2.02.0011]	KEUANGAN
2459	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.04.0002] [5.02.02.2.03.0002]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2460	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.04.0004] [5.02.02.2.03.0004]	KEUANGAN
2461	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.04.0005]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2462	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.04.0008] [5.02.02.2.03.0008]	KEUANGAN
2463	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.04.0009] [5.02.02.2.03.0009]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2464	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.04.0011]	KEUANGAN
2465	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.05.0008] [5.02.02.2.04.0008]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2466	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.05.0009] [5.02.02.2.04.0009]	KEUANGAN
2467	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.05.0010]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2468	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.06.0002] [5.02.02.2.05.0002]	KEUANGAN
2469	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.02.1.06.0003]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2470	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0003] [5.02.03.2.01.0003]	KEUANGAN
2471	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0004] [5.02.03.2.01.0004]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2472	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0005] [5.02.03.2.01.0005]	KEUANGAN
2473	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0006] [5.02.03.2.01.0006]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2474	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0007] [5.02.03.2.01.0007]	KEUANGAN
2475	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah dan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0008] [5.02.03.2.01.0008]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2476	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0009] [5.02.03.2.01.0009]	KEUANGAN
2477	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0010] [5.02.03.2.01.0010]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2478	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0011] [5.02.03.2.01.0011]	KEUANGAN
2479	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	T	T	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	[5.02.03.1.01.0012] [5.02.03.2.01.0012]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2480	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Mengukur Rencana Pengelolaan Pendapatan Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0001] [5.02.04.2.01.0001]	KEUANGAN
2481	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Mengukur Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Pendapatan Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0002]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2482	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Mengukur Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0003] [5.02.04.2.01.0003]	KEUANGAN
2483	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Mengukur Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0004] [5.02.04.2.01.0004]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2484	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Mengukur Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0005]	KEUANGAN
2485	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Mengukur Pelaksanaan Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0006] [5.02.04.2.01.0006]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2486	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	Mengukur Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0008]	KEUANGAN
2487	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	Mengukur Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0009]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2488	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	Mengukur Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0010]	KEUANGAN
2489	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Mengukur Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0011]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2490	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	Mengukur Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0012]	KEUANGAN
2491	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Mengukur Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0013] [5.02.04.2.01.0014]	KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2492	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Mengukur Pelaksanaan Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	T	T	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	[5.02.04.1.01.0014] [5.02.04.2.01.0015]	KEUANGAN
2493	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.01.0003] [5.03.02.2.01.0003]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2494	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.01.0006] [5.03.02.2.01.0006]	KEPEGAWAIAN
2495	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.01.0008] [5.03.02.2.01.0008]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2496	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.01.0010] [5.03.02.2.01.0010]	KEPEGAWAIAN
2497	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.01.0011] [5.03.02.2.01.0011]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2498	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.02.0001] [5.03.02.2.02.0001]	KEPEGAWAIAN
2499	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.02.0002] [5.03.02.2.02.0002]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2500	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.02.0003] [5.03.02.2.02.0003]	KEPEGAWAIAN
2501	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.03.0002] [5.03.02.2.03.0002]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2502	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.03.0004]	KEPEGAWAIAN
2503	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.03.0014]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2504	5.03.000030	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.03.0015] [5.03.02.2.03.0015]	KEPEGAWAIAN
2505	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.04.0002] [5.03.02.2.04.0002]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2506	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.04.0004] [5.03.02.2.04.0004]	KEPEGAWAIAN
2507	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.04.0005] [5.03.02.2.04.0005]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2508	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.04.0007] [5.03.02.2.04.0007]	KEPEGAWAIAN
2509	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.04.0008] [5.03.02.2.04.0008]	KEPEGAWAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2510	5.03.000070	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	T	T	Badan Kepegawaian Daerah	[5.03.02.1.01.0002]	KEPEGAWAIAN
2511	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.01.0001] [5.04.02.2.01.0001]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2512	5.04.000002	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.01.0002] [5.04.02.2.01.0002]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2513	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.01.0003] [5.04.02.2.01.0003]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2514	5.04.000006	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.02.0002]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2515	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.02.0003]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2516	5.04.000010	Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.02.0006]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2517	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.02.0007]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2518	5.04.000012	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.02.0008]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2519	5.04.000014	ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.1.03.0002] [5.04.02.2.03.0002]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2520	5.04.000021	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.2.01.0004]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2521	5.04.000022	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		T	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	[5.04.02.2.02.0001]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2522	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen		T	T	BRIDA	[5.05.02.1.01.0012]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2523	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.01.0013] [5.05.02.2.01.0013]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2524	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.01.0014] [5.05.02.2.01.0014]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2525	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.02.0001] [5.05.02.2.02.0001]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2526	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.04.0001] [5.05.02.2.04.0001]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2527	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.04.0002] [5.05.02.2.04.0002]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2528	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.04.0004] [5.05.02.2.04.0004]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2529	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.1.04.0005] [5.05.02.2.04.0005]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2530	5.05.000050	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.2.01.0003]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2531	5.05.000051	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan		T	T	Badan Riset Daerah	[5.05.02.2.01.0004]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2532	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.01.0001] [6.01.02.2.01.0001]	INSPEKTORAT DAERAH
2533	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.01.0003] [6.01.02.2.01.0003]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2534	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.01.0004] [6.01.02.2.01.0004]	INSPEKTORAT DAERAH
2535	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.01.0005]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2536	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.01.0006] [6.01.02.2.01.0006]	INSPEKTORAT DAERAH
2537	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.01.0007] [6.01.02.2.01.0007]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2538	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.1.02.0002] [6.01.02.2.02.0002]	INSPEKTORAT DAERAH
2539	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		T	T	Inspektorat	[6.01.03.1.01.0001] [6.01.03.2.01.0001]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2540	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		T	T	Inspektorat	[6.01.03.1.01.0002] [6.01.03.2.01.0002]	INSPEKTORAT DAERAH
2541	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		T	T	Inspektorat	[6.01.03.1.02.0001] [6.01.03.2.02.0001]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2542	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		T	T	Inspektorat	[6.01.03.1.02.0002] [6.01.03.2.02.0002]	INSPEKTORAT DAERAH
2543	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		T	T	Inspektorat	[6.01.03.1.02.0003] [6.01.03.2.02.0003]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2544	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		T	T	Inspektorat	[6.01.03.1.02.0004] [6.01.03.2.02.0004]	INSPEKTORAT DAERAH
2545	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		T	T	Inspektorat	[6.01.02.2.01.0005]	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2546	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.03.1.01.0003] [8.01.03.2.01.0003]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2547	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.03.1.01.0004] [8.01.03.2.01.0004]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2548	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.04.1.01.0004]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2549	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.06.1.01.0002] [8.01.06.2.01.0002]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2550	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.06.1.01.0004] [8.01.06.2.01.0004]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2551	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.06.1.01.0005] [8.01.06.2.01.0005]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2552	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	T	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[8.01.02.2.01.0004]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2553	X.XX.000010	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1. Definsi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD. 2. Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah . 3. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD dan aplikasi pendukung lain yang ditentukan. 4. Jenis Data: Data SSD mencakup Data Regsosek, yaitu data seluruh penduduk yang mencakup kondisi sosial ekonomi dan memiliki peringkat kesejahteraan. Tahapan Pengumpulan Data Regsosek dalam Pemutakhiran Regsosek, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek yang ditujukan untuk menjaga keakuratan dan validitas Data Regsosek. 5. Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Regsosek: Koordinasi dan Sosialisasi, Pelatihan/Refreshment, Musyawarah Desa (Pertemuan Ketua Satgas/SLS, Forum Konsultasi Publik, Penetapan Data), Pemutakhiran (Otomasi, Mandiri dan Penjangkauan Aktif), Verifikasi-Validasi, Monitoring di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kab/Kota	T	T	Semua OPD		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2554	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	Laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi Aparatur dan Masyarakat memuat laporan pelaksanaan kegiatan Mudik Gratis Lebaran dan laporan Pelayanan terhadap VIP (Aparatur Pemerintah Daerah)	T	T	Badan Penghubung	[5.07.02.1.01.0001]	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
2555	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	Laporan Hasil pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat memuat laporan pelaksanaan kegiatan Paguyuban Jawa Tengah	T	T	Badan Penghubung	[5.07.02.1.01.0002]	PENGELOLAAN PENGHUBUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2556	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	Laporan Hasil kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya memuat laporan pelaksanaan kegiatan Duta Seni Jawa Tengah, laporan fasilitasi promosi Produk Unggulan Jawa Tengah dan laporan kegiatan Anjungan Jawa TEngah TMII.	T	T	Badan Penghubung	[5.07.02.1.01.0003]	PENGELOLAAN PENGHUBUNG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/163 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DAFTAR DATA DAERAH JAWA
TENGAH JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 - 2029

C. Daftar Data Statistik Tahun 2024

*Sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2024 Tentang Penetapan Data Prioritas Jawa Tengah Tahun 2024

No	ID DDP	Sumber Referensi	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	2024
1		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Anggota Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Triwulanan	Tersedia
2		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
3		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
4		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Penguatan Kelembagaan Koperasi di Wilayah Miskin Ekstrim	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
5		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Koperasi aktif	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Triwulanan	Tersedia
6		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Triwulanan	Tersedia
7		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
8		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
9		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah koperasi yang mendapatkan Peningkatan Skala Usaha Koperasi Melalui Kemitraan Strategis	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
11		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
12		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Akutansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
13		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Bagi SDM Pengawas Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
14		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Digitalisasi Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
15		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
16		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah pelaku usaha berdasarkan Lapangan Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
17		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
18		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
19		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pembinaan Koperasi Pengelola Factory Sharing dan Rumah Kemasan	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
20		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Startup yang dikembangkan melalui Inkubasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
21		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan jenis kelamin Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
22		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah UMKM berdasarkan bentuk usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
23		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah UMKM Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah UMKM yang termasuk Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
25		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah wirausaha per tahun	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
26		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
27		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
28		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
29		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kontribusi koperasi terhadap PDB	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Triwulanan	Tersedia
30		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kontribusi UMKM terhadap PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
31		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kontribusi UMKM terhadap PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
32		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Pertumbuhan wirausaha	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
33		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
34		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Rasio kewirausahaan	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
35		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Volume usaha koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Triwulanan	Tersedia
36		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Kab/Kota	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
37		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Koperasi	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Triwulan	Tersedia
38		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
39		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam sehat	Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tahunan	Tersedia
40		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah industri halal yang difasilitasi	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

41		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Produk	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	Tahunan	Tersedia
42		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
43		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Produk	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
44		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
45		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan perlindungan merk	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
46		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan perbaikan kemasan	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
47		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kawasan Industri (KI) operasional	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
48		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah lulusan pelatihan vokasi industri	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
49		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jumlah Produk Dalam Negeri Bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
50		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Produk tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri > 25% yang masih berlaku	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
51		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Produsen Alat dan Mesin Pertanian	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
52		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah tenaga kerja pada Kawasan Industri	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
53		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Produksi Alat dan Mesin Pertanian	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
54		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

55		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
56		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
57		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah pasar tradisional/rakyat	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
58		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
59		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah promosi terintegrasi	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
60		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah rencana kegiatan promosi produk ke luar negeri	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
61		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
62		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah UMKM yang mengikuti Export Coaching Program	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
63		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase ekspor hasil pertanian (fob)	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
64		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
65		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
66		Renstra SETJEN DPR RI	Pertumbuhan impor produk non migas	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
67		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK per Kab/Ko	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
68		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM per Kab/ko	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
69		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK per Kab/Ko	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
70		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

71		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
72		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Industri berdasarkan jenis (Besar; Kecil & Menengah) dan Kab/Ko	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
73		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Pasar Modern per Kab/Kota	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
74		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Pasar Rakyat per Kab/Kota	Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Tersedia
75		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kapasitas Latih Lembaga Pelatihan Kerja	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
76		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
77		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
78		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
79		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pekerja yang mendapatkan pemahaman tata cara penyusunan PP/PKB	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
80		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Aplikasi Karirhub	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
81		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
82		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
83		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
84		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Online	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
85		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
86		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
87		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah peserta pemagangan dalam negeri	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
88		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah peserta pemagangan luar negeri	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
89		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
90		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
91		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

92		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
93		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
94		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Nonformal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
95		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
96		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
97		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
98		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
99		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Nonformal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
100		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
101		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
102		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia
103		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

104		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Statistik	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan	Tersedia
105		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
106		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah atlet elit junior nasional	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
107		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
108		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
109		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional dan nasional	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
110		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
111		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
112		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
113		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
114		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah sentra pembinaan yang telah beroperasi di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
115		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Peringkat pada Olympic Games	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
116		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Peringkat pada Paralympic Games	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
117		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
118		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO)	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

119		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
120		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
121		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
122		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
123		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Desa Wisata	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
124		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
125		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
126		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Destinasi pariwisata super prioritas	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
127		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
128		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
129		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
130		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Perbatasan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Triwulanan	Tersedia
131		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pengembangan, pendampingan, dan inkubasi di ruang kreatif	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
132		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penyelenggaraan Event	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

133		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
134		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
135		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai tambah ekonomi kreatif	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
136		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Daya Tarik Wisata per Kab/Ko	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
137		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara per Kab/Ko	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
138		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Rata-rata pengeluaran wisatawan selama berwisata di Jawa Tengah	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
139		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Rata-rata Lama Menginap Wisatawan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
140		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
141		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
142		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Perolehan Peringkat pada Pekan Olah Raga Nasional (PON)	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
143		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Perolehan Peringkat pada Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
144		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah perolehan medali pada PON	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
145		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah perolehan medali pada PEPARNAS	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
146		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah perolehan medali pada POTRADNAS	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
147		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Tingkat kebugaran masyarakat Jawa Tengah	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
148		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Persentase pemuda di Jawa Tengah	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
149		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah pemuda yang berhasil mejadi wirausaha setelah dilakukan pelatihan	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia
150		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah produk yang dihasilkan PKKP	Statistik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

151		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
152		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Peternakan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
153		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Unit Pengolahan Pupuk Organik	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
154		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah bantuan unit pengolahan pupuk organik yang disalurkan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
155		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
156		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penggunaan Benih Besertifikat (Padi, Jagung & Kedelai)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
157		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
158		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
159		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Produksi daging	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
160		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
161		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
162		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
163		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan atau Pangan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
164		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
165		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
166		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
167		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibangun	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
168		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
169		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
170		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas lahan beririgasi	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

171		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
172		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas lahan sawah yang menerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
173		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Luas Panen Komoditas Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
174		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
175		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
176		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Luas Tanam Komoditas Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
177		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Luas Total Lahan Pertanian Pangan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
178		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
179		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
180		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Peternakan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
181		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
182			Jumlah korporasi peternak yang dikembangkan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
183		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penggunaan Benih Besertifikat (Padi, Jagung & Kedelai)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
184		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
185		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah ternak sapi/kerbau penerima subsidi premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
186		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kelompok Tani Ternak	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
187		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Produksi daging	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

188		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
189		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
190		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
191		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan atau Pangan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
192		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
193		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
194		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
195			Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Peternakan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
196		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibangun	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
197		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
198		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
199		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas lahan beririgasi	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
200		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
201		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas lahan sawah yang menerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
202		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Luas Panen Komoditas Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
203		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
204		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah)	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
205		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Luas Tanam Komoditas Pertanian	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia
206		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Luas Total Lahan Pertanian Pangan	Statistik	Dinas Pertanian dan Peternakan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

207		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Indeks Ketahanan Pangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
208		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah cadangan beras	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
209		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	jumlah kebutuhan pangan pokok	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
210		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jumlah ketersediaan akses dan pangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
211		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Ketersediaan beras	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
212		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah ketersediaan protein hewani	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
213		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Konsumsi daging	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
214		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Konsumsi ikan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
215		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Konsumsi kacang-kacangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
216		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Konsumsi protein asal ternak	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
217		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Konsumsi sayur dan buah	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
218		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah Penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
219		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah stok pangan pokok	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
220		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Koefisien Variasi Harga Pangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
221		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase daerah rentan rawan pangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
222		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
223		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peningkatan konsumsi daging	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
224		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peningkatan konsumsi protein asal ternak	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
225		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
226		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Rata-rata Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
227		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Bulanan	Tersedia
228		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Tersedia
229		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Angka Konsumsi Ikan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
230		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
231		Indikator Kinerja Utama KKP	Jumlah Kapal Nelayan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
232		UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jumlah kasus Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
233		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

234		Indikator Kinerja Utama KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
235		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
236		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
237		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang dilatih	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
238		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
239		Indikator Kinerja Utama KKP	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
240		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perikanan hasil budidaya	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
241		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perikanan hasil tangkapan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
242		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
243		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi garam	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
244		UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
245		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Produksi ikan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
246		Indikator Kinerja Utama KKP	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
247		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi rumput laut	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
248		Indikator Kinerja Utama KKP	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
249		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
250		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
251		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
252		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Kumulatif Konservasi kawasan kelautan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
253		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (ton)	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
254		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan	Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Tersedia
255		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Intensitas energi primer	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

256		UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jumlah Daya Terpasang Listrik	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tahunan	Tersedia
257		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Konsumsi listrik per kapita	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tahunan	Tersedia
258		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tahunan	Tersedia
259		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pemanfaatan biofuel untuk domestik	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
260		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
261		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pengguna listrik	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
262		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah produksi komoditas tambang mineral logam dan Batubara	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
263		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
264		Renstra SETJEN DPR RI	Lifting minyak dan gas bumi	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Triwulanan	Tersedia
265		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
266		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pemanfaatan biofuel untuk domestik	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
267		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
268		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Porsi kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru Terbarukan terhadap total pembangkit	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
269		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Rasio elektrifikasi	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
270		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
271		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Total kapasitas hasil produksi pembangkit listrik dari energi terbarukan	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
272		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Total konsumsi energi final	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
273		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Total konsumsi final energi terbarukan	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
274		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Total Pasokan Energi Primer	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
275		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Total Pasokan Energi Terbarukan	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

276			Intensitas energi primer	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
277			Intensitas energi final	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
278			Konsumsi listrik per kapita	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
279		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kondisi PETI di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
280		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
281		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
282		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
283		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Statistik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Tersedia
284		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas kawasan Hutan Lindung	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
285		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Indeks Kualitas Air (IKA)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
286		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
287		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
288		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
289		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Indeks kualitas udara (IKU)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
290		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
291		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
292		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Baseline Merkuri yang telah ditetapkan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
293		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
294		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
295		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
296		RAN OGI VIII	Jumlah Persetujuan Lingkungan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
297		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah jenis satwa	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

298		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
299		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
300		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah KPH Efektif	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
301		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
302		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah limbah B3 yang terkelola	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
303		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah limbah cair industri keseluruhan (yang dilaporkan)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
304		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman (yang dilaporkan)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
305		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
306		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
307		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
308		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
309		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal) (orang)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
310		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peraturan atau kebijakan yang sah terkait peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
311		RAN OGI VIII	Jumlah perizinan Berusaha terkait SDA-LH	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
312		RAN OGI VIII	Jumlah persetujuan teknis terkait Pengelolaan Limbah B3	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
313		RAN OGI VIII	Jumlah persetujuan terkait usaha SDA-LH	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
314		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah produksi kayu dari hutan produksi	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

315		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah semua Jenis Sampah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
316		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
317		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
318		RAN OGI VIII	Jumlah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
319		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
320		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
321		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
322		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
323		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
324		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
325		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
326		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Luas kawasan hutan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
327		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas kawasan hutan produksi	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
328		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha)	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
329		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas kawasan konservasi	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
330		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas kawasan konservasi perairan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
331		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Luas Penyebaran Lahan Kritis	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

332		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air 15 Danau Prioritas	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
333		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Rehabilitasi Danau Tangkapan Air (DTA) 15 danau prioritas	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
334		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Rehabilitasi di Kawasan Pesisir	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
335		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
336		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas tutupan hutan per tahun	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
337		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nilai Kualitas air permukaan sebagai air baku	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
338		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Penurunan Emisi CO2	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
339		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Penurunan emisi gas rumah kaca	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
340		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
341		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase sampah nasional yang terkelola	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
342		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase sisa makanan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
343		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
344		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
345		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Rata-rata konsentrasi PM10 dalam satu tahun	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
346		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan.	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
347		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
348		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Tingkat emisi CO2	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
349		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Total Emisi GRK	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
350		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
351		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

352		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
353		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
354		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
355		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	Tersedia
356		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Indeks Desa Membangun 2024	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
357		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
358		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
359		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Berdasarkan Kategori Jenis Usaha	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
360		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
361		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Jumlah Masyarakat Desa yang Diberi Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2024	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
362		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
363		RPJMN/RKP	Data Jumlah Keluarga Baru dan Pertambahannya	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
364		RPJMN/RKP	Data Jumlah lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan melalui kerja sama	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

365		RPJMN/RKP	Data Jumlah Penduduk yang meninggal dan mempunyai akta kematian pada Seluruh Peristiwa	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
366		RPJMN/RKP	Data Kepemilikan Akta Kelahiran pada WNI usia 0-17 Tahun	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
367		RPJMN/RKP	Data Kepemilikan Akta Perceraian pada Individu yang Sudah Bercerai	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
368		RPJMN/RKP	Data Kepemilikan NIK pada WNI Seluruh Usia	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
369		RPJMN/RKP	Data Kepemilikan NIK pada WNI usia 0-17 Tahun	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
370		RPJMN/RKP	Data penduduk menurut usia, dan jenis kelamin berdasarkan periode waktu yang sama	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia
371		RPJMN/RKP | SDGs	Jumlah anak balita pada waktu yang sama	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia
372		RPJMN/RKP	Jumlah anak umur 0-17 tahun	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia
373		RPJMN/RKP	Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia
374		RPJMN/RKP	Jumlah penduduk umur >15 tahun	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia
375		RPJMN/RKP	Jumlah penduduk umur 10–18 tahun pada periode waktu yang sama	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia
376		RPJMN/RKP	jumlah penduduk yang memiliki KTP	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

377		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
378		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa	Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Tersedia
379		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
380		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
381		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kemantapan Jalan Provinsi	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
382		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Presentase dan Kondisi Kemantapan Jalan	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
383		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data kondisi jalan kewenangan provinsi	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
384		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data lalu lintas harian	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
385		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data Jembatan dan Gorong-gorong di Jalan Provinsi	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
386		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
387		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Capaian Akses Air Limbah Domestik per Kab/Ko	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
388		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Capaian Akses Air Minum Perkotaan dan Perdesaan per Kab/Ko	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
389		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Badan Usaha Konstruksi per Kab/ko	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
390		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
391		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Realisasi Investasi PMDN di Jawa Tengah Berdasarkan Kab / Kota	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
392		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Realisasi Investasi PMDN di Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
393		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Realisasi Investasi PMA di Jawa Tengah Berdasarkan Negara	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

394		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Realisasi Investasi PMA di Jawa Tengah Berdasarkan Kab / Kota	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
395		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Realisasi Investasi PMA di Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
396		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
397		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Investasi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Tersedia
398		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data Kawasan Industri	Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semesteran	Tersedia
399		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia
400		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia
401		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia
402		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah RTLH per Kab/Ko	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Triwulan	Tersedia
403		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah RTLH yang ditangani dengan pembiayaan Provinsi per Kab/Ko	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Triwulan	Tersedia
404		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (berdasarkan SK) per Kab/Ko	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia
405		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Luas Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan kewenangan penanganan per Kab/Ko	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia
406		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Per Kabupaten/Kota	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia
407		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	Statistik	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

408		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Bendungan/Waduk di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
409		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Bendung Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
410		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah embung dan long storage Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
411		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Irigasi (Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten)	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
412		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Jumlah Ketersediaan Air Waduk, Embung/Long Storage, dan Bendung Kontrol Poin	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bulanan	Tersedia
413		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah luas daerah irigasi premium	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
414		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi jelek kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
415		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Luas lahan irigasi berdasarkan kewenangan	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
416		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Peta Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
417		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2057	Jumlah Ketersediaan Air Baku	Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	Tersedia
418		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Ketahanan Daerah	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia
419		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia
420		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenisnya per Kab/Ko	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia
421		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia
422		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia
423		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Tersedia
424		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
425		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Bandar Udara	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
426		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Barang Berdasarkan Moda Transportasi	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

427		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Bus yang Mendukung Operasional Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
428		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Umum Massal yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
429		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kota Metropolitan yang Membangun atau Mengembangkan Angkutan Massal Berbasis Jalan	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
430		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kota Metropolitan yang Membangun atau Mengembangkan Angkutan Massal Berbasis Rel	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
431		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kota Selain Kota Metropolitan yang Menerapkan Sistem Angkutan Umum Massal yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
432		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
433		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
434		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
435		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Panjang Jalur Kereta api yang Aktif/Beroperasi	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
436		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Panjang Jalur Kereta Api yang Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi	Statistik	Dinas Perhubungan	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
437		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah moda transportasi umum di Kab/Kota	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
438		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Terminal Tipe A, B dan C di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
439		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
440		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kendaraan	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
441		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

442		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Angkutan Wisata	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
443		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Bis menurut jenisnya (Ekonomi dan Non Ekonomi)	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
444		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
445		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Kunjungan Kapal berdasarkan Pelabuhan	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
446		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah GRT (GT) berdasarkan Pelabuhan	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
447		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Dweeling Time Pelabuhan TPKS Impor Pelabuhan Tanjung Emas	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
448		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Dweeling Time Pelabuhan TPKS Ekspor Pelabuhan Tanjung Emas	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
449		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Penumpang ASDP	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
450		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah penumpang Domestik dan Internasional berdasarkan Bandara	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
451		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah barang Domestik dan Internasional berdasarkan Bandara	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
452		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Penumpang Kereta Api	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
453		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Barang terangkut	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
454		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Stasiun Kereta Api	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
455		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Perlintasan KA	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
456		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
457		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
458		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
459		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
460		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Ruas Jalan Provinsi yang Belum Tertangani	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

461		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
462		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
463		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
464		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
465		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
466		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
467		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
468		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
469		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (Online)	Statistik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Tersedia
470		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah lembaga penyiaran publik lokal	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia
471		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
472		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia
473		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia
474		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Semesteran	Tersedia
475		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

476			Data Sebaran CSIRT	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia
477		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia
478		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	Tahunan	Tersedia
479		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
480		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perpustakaan yang melakukan kegiatan berbasis inklusi sosial	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
481		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
482		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
483		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
484		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
485		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
486		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
487		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
488		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
489		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
490		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Pengunjung Arsip Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
491		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
492		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Tingkat Kegemaran Membaca	Statistik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Tersedia
493		Peraturan BRIN no. 5 tahun 2023 (psl.1), Peraturan Gubernur di daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
494		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah anggaran untuk Kebun Raya	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

495		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yang ada yang dikembangkan	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
496		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kebun Raya Daerah yang dikembangkan	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
497		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah mitra terfasilitasi	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
498		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek yang berkualifikasi S3	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
499		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
500		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
501		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng Yang Difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
502		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
503		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Riset Daerah	Tahunan	Tersedia
504		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Kualitas Keluarga	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
505		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
506		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
507		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

508		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
509		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin menurut bidang (dasar hukum umum, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi, perkawinan dan keluarga)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lebih dari 1 Tahun	Tersedia
510		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bulanan	Tersedia
511		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik dan/atau seksual) yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
512		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Prevalensi anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
513		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
514		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi perempuan dan laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

515		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
516		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka kelahiran remaja pada kelompok umur 15-19 tahun per 1000 wanita di kelompok umur yang sama	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
517		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
518		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
519		Renstra 2020-2024	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
520		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
521		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
522		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
523		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

524		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
525		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
526		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
527		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
528		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
529		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Kab/Ko	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
530		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Korban berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak per Kab/Ko	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
531		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahunan	Tersedia
532		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
533		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
534		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	cakupan anak yg mendapatkan vaksinasi DPT dosis 3	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

535		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	cakupan anak yg mendapatkan vaksinasi PCV dosis 2	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
536		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	presentase bayi usia 6 bulan yg diberi asi eksklusif	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
537		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	jumlah ibu hamil dengan anemia	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
538		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	jumlah ibu hamil dengan pemeriksaan K6	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
539		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	jumlah kasus baru HIV (ODHIV)	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
540		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah posyandu aktif	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
541		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	jumlah kasus kusta	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
542		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	jumlah kasus filariasi	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
543		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	jumlah kasus API	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
544			Jumlah Kematian Ibu	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
545		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah puskesmas	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
546		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
547		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
548		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	jumlah penemuan & pengobatan kasus TB	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
549			jumlah kesembuhan TB	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
550		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis tenaga kesehatan tertentu	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
551		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	cakupan anak yang mendapatkan vaksin campak anak dosis 2	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
552		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	cakupan imunisasi dasar lengkap	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
553		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
554			Persentase kabupaten/kota sehat	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
555		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
556		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	jumlah penderita kusta selesai berobat (RFT)	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
557		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
558		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
559		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

560		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase KK dengan akses sanitasi layak	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
561		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
562			Jumlah kasus baru DBD	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
563			Kondisi Penyakit Tidak Menular	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
564			Cakupan Layanan Kesehatan Usia Lanjut	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
565		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
566		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Data Statistik Aparatur Sipil Negara Indonesia (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
567		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jabatan fungsional tertentu dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
568		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jenis jabatan dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
569		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jenis kelamin dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
570		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut kelompok umur dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
571		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut lokasi kerja dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
572		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut golongan dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
573		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut golongan ruang dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
574		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut jenis Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
575		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

576		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
577		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2150	PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
578		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2152	Indeks Sistem Merit	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
579		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2152	jumlah pns yang pensiun di Jawa Tengah	Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Tahunan	Tersedia
580		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
581		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pemerataan Guru	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
582		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah anak tidak sekolah pada SD/sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
583		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah anak tidak sekolah pada SMA/sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
584		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah anak tidak sekolah pada SMP/sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
585		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek literasi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
586		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek numerasi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
587		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
588		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
589		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
590		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

591		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah guru di jenjang PAUD/sederajat, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/sederajat dan SMK/sederajat berdasarkan status kepegawaian	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
592		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah guru di sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan status kepegawaian	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
593		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan menurut jenis pembiayaan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
594		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	Statistik	Dinas Pendidikan	Semesteran	Tersedia
595		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
596		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
597		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
598		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SD	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
599		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
600		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendapatkan pelatiha	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
601		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SLB	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
602		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
603		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
604		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMA	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
605		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
606		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
607		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMK	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

608		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
609		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
610		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMP	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
611		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
612		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik TK	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
613		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
614		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peserta didik SD	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
615		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peserta didik SLB	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
616		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peserta didik SMA	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
617		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peserta didik SMK	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
618		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peserta didik SMP	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
619		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah peserta didik TK	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
620		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah registrasi benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
621		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah registrasi warisan budaya takbenda	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
622		Renstra SETJEN DPR RI	Jumlah satuan pendidikan sesuai kewenangan yang sudah menerapkan materi ajar kewirausahaan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
623		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah satuan pendidikan SD	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
624		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah satuan pendidikan SLB	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
625		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah satuan pendidikan SMA	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
626		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah satuan pendidikan SMK	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
627		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah satuan pendidikan SMP	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

628		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah satuan pendidikan TK	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
629		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
630		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
631		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
632		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
633		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
634		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Budaya Literasi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
635		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
636		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
637		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
638		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
639		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
640		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kab/Kota berdasarkan kategori SPM Pendidikan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
641		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	Statistik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Tersedia
642		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
643		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
644		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

645		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
646		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
647		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
648		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
649		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
650		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
651		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	presentase satuan pendidikan sesuai kewenangan yg mengimplementasikan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
652		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
653		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
654		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
655		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
656		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
657		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
658		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

659		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
660		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
661		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kemampuan Literasi dan Numerasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Tersedia
662		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah PPKS per Kab/Ko	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
663		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah PPKS yang diintervensi per Kab/Ko	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
664		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah PPKS berdasarkan jenis per Kab/Ko	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
665		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah PSKS berdasarkan jenis per Kab/Ko	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
666		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
667		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
668		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
669		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah SLRT Desa/Kelurahan berdasarkan kab/kota	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
670		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Keterserapan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
671		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data KUBE Di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
672		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Penyandang Disabilitas Usia Sekolah	Statistik	Dinas Sosial	Tahunan	Tersedia
673		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia
674		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Statistik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan	Tersedia
675		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Statistik	Inspektorat	Tahunan	Tersedia
676		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Tingkat Kepatuhan dan Pelaporan LHKPN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Inspektorat	Tahunan	Tersedia
677		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Tingkat Maturitas SPIP	Statistik	Inspektorat	Tahunan	Tersedia
678		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Satpol PP	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

679		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	Statistik	Satpol PP	Tahunan	Tersedia
680		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Statistik	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia
681		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	Statistik	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia
682		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	Statistik	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia
683		Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	Jumlah Anggota DPRD berdasarkan Partai, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Statistik	Sekretariat DPRD	Tahunan	Tersedia
684		Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi bidang kesehatan	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
685		Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026	Jenis 10 besar penyakit yang diderita pasien	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
686		Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026	Jumlah Kunjungan Pasien	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
687		Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026	Indikator Pelayanan Rawat Inap	Statistik	Dinas Kesehatan	Tahunan	Tersedia
688			Daftar Kerjasama yang dilakukan Pemprov Jateng	Statistik	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Tahunan	Tersedia
689		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
690		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
691		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat menurut Kelompok Pengeluaran	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
692		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat menurut Kelompok Pengeluaran	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
693		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Garis kemiskinan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
694		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Harapan Lama Sekolah	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
695		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Demokrasi Indonesia	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

696		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
697		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
698		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kesetaraan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
699		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Desa	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
700		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
701		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
702		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
703		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
704		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
705		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
706		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
707		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
708		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
709		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pembangunan Manusia	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
710		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pembangunan Manusia per jenis kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
711		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
712		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
713		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Inflasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
714		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Keterwakilan di Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
715		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
716		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah K/L/D/I yang meminta rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
717		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah K/L/D/I yang telah menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
718		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

719		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah Pekerja Formal yang memiliki Jaminan Sosial (Kesehatan, Kecelakaan kerja, Kematian, hari tua, pensiun kehilangan pekerjaan dan cuti)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
720		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Jumlah pekerja setengah penganggur (orang)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
721		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi dan kegiatan seminggu yang lalu	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
722		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
723		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
724		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
725		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Jumlah penduduk menurut kelompok umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
726		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan teknisi dan sejenis	Statistik	Badan Pusat Statistik	Semesteran	Tersedia
727		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
728		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
729		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan tata usaha dan sejenis	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
730		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan tenaga usaha jasa	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
731		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan tenaga usaha penjualan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

732		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
733		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
734		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah pengangguran (orang)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
735		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
736		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
737		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah publikasi hasil Sensus Pertanian 2023	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
738		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Jumlah publikasi statistik bidang Neraca Ekonomi dan Bidang Statistik Makroekonomi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
739		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Tingkat Penghunian Kamar Hotel	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
740		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kontribusi ekspor industri pengolahan terhadap total ekspor non migas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
741		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahunan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
742		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
743		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor informasi dan komunikasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
744		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Per Kapita	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
745		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut provinsi/kabupaten/kota	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
746		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai ekspor nonmigas menurut HS 2 digit	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
747		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nilai tambah industri manufaktur	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
748		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
749		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
750		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

751		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nilai Tukar Petani (NTP)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
752		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
753		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
754		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
755		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
756		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase Anak Usia 10-17 tahun yang bekerja menurut Jenis Kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
757		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase anak yang tidak bersekolah menurut kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
758		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase angka melek aksara/huruf penduduk usia 15 tahun ke atas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
759		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
760		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
761		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase dan Jumlah Anak Usia 10-17 tahun yang bekerja menurut Kelompok Umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
762		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
763		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase K/L/D/I yang telah menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
764		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Kemiskinan Perdesaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Semesteran	Tersedia
765		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
766		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
767		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase Pekerja Infomal yang memiliki Jaminan Sosial (Kesehatan, Kecelakaan kerja dan Kematian)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
768		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

769		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
770		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
771		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
772		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
773		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
774		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Penduduk umur 10-18 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
775		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
776		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
777		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
778		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan keluhan kesehatan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari (Angka Kesakitan)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
779		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

780		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
781		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang mempunyai nomor induk kependudukan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
782		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
783		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
784		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
785		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
786		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
787		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
788		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
789		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran ALH yang terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

790		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran ALH yang terakhirnya di fasilitas kesehatan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
791		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran Anak Lahir Hidup (ALH) yang terakhir tidak di fasilitas kesehatan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
792		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
793		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Perkembangan ekspor nonmigas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Bulanan	Tersedia
794		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
795		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
796		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
797		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan tahan bangunan tempat tinggal berupa sertifikat	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
798		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal sewa/kontrak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
799		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
800		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga menurut kepemilikan dan penggunaan fasilitas buang air besar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

801		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase rumah tangga menurut luas lantai rumah bangunan tempat tinggal	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
802		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
803		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
804		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kepemilikan serta penggunaan fasilitas buang air besar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
805		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
806		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
807		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase rumah tangga menurut jenis atap, jenis lantai dan jenis dinding	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
808		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
809		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat selama Setahun Terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
810		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
811		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
812		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
813		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
814		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
815		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

816		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
817		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha	Statistik	Badan Pusat Statistik	Triwulanan	Tersedia
818		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
819		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Produk Domestik Bruto (PDB) Per kapita	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
820		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Produktivitas Jagung	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
821		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Produktivitas Kedelai	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
822		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Produktivitas Padi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
823		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
824		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
825		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi Lapangan Kerja Informal, Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
826		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
827		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
828		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
829		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik	Badan Pusat Statistik	> Dua Tahunan	Tersedia
830		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
831		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

832		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
833		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
834		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
835		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan > 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
836		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan > 25 persen dari total pengeluaran rumah tangga	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
837		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Proporsi wanita pernah kawin 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
838		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
839		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
840		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Angka Partisipasi Murni (APM)pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk Pedesaan/Perkotaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
841		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Rasio Gini	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
842		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
843		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
844		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Semesteran	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

845		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
846		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
847		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Tingkat Setengah Pengangguran	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
848		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
849		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Unmet need pelayanan kesehatan: Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitas sehari-harinya dalam sebulan terakhir namun tidak rawat jalan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
850		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Upah Rata-Rata per Jam Pekerja	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
851		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Volume Produksi jagung	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
852		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Volume Produksi Padi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia
853		Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota	Statistik	Badan Pusat Statistik	Tahunan	Tersedia

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/163 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DAFTAR DATA DAERAH JAWA
TENGAH JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 - 2029

D. Daftar Data Geospasial Tematik Tahun 2024

*Sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2024 Tentang Penetapan Data Prioritas Jawa Tengah Tahun 2024

NO.	ID DDP	SUMBER REFERENSI	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	Jenis Data	INSTANSI PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN (update peta)	SKALA	2024
1		Data ODS	Peta Sebaran Koperasi	Geospasial	Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop)	Tahunan		Tersedia
2		Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kemenkop UKM RI	Peta Sebaran UKM	Geospasial	Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop)	Tahunan		Tersedia
3		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Pasar Rakyat	Geospasial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
4		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Pasar Modern	Geospasial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
5		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Lokasi Industri	Geospasial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
6		RKPD Jawa Tengah 2024	Balai pelatihan dan jenis pelatihannya	Geospasial	Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans)	Tahunan		Tersedia
7		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Usaha Pariwisata	Geospasial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan		Tersedia
8		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Desa Wisata	Geospasial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan		Tersedia
9		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Sarana Olahraga	Geospasial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan		Tersedia
10		RKPD Jawa Tengah 2024	Daya Tarik Wisata	Geospasial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan		Tersedia
11		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran hotel berbintang	Geospasial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan		Tersedia
12		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran BanKeu Desa Wisata	Geospasial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Tahunan		Tersedia
13		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Kawasan Peternakan	Geospasial	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan(Disnakeswan)	pertahun, update 2022		Tersedia
14		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta sebaran lokasi Puskeswan	Geospasial	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan(Disnakeswan)	Data Statis		Tersedia
15			Peta produktivitas pertanian	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun)	2019	1:50.000	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	ID DDP	SUMBER REFERENSI	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	Jenis Data	INSTANSI PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN (update peta)	SKALA	2024
16		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta sebaran komoditas perkebunan	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun)	2021	1:50.000	Tersedia
17			Peta LP2B	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan		1:50.000	Tersedia
18			Peta jenis lahan	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2019	1:50.000	Tersedia
19			IGT. Jenis Tanah	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2010		Tersedia
20			Lahan Baku Sawah (skala Provinsi)	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2019 Update 2022	1:250.000	Tersedia
21			Lahan Sawah dilindungi (skala Provinsi)	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2021 Update 2022	1:250.000	Tersedia
22			data balai-balai	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2021	1.1.000 - 1.2000	Tersedia
23		RKPD Jawa Tengah 2024	data pupuk sesuai dengan pedoman kementan (peraturan kementan)	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun)	2022		Tersedia
24		RKPD Jawa Tengah 2024	data irigasi (sesuai kewenangan pertanian)	Geospasial	Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun)	2023	1.100	Tersedia
25		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta RZWP3K Prov. Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dilutkan)	Pra Loket (Review Materi Teknis, Raperda), Harus di Undangkan Tahun 2023	1:250.000	Tersedia
26		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Lokasi Pelabuhan Perikanan Prov. Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dilutkan)			Tersedia
27		RKPD Jawa Tengah 2024	Data Produksi Perikanan	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dilutkan)	update 2022		Tersedia
28		RKPD Jawa Tengah 2024	Sebaran Tambak Garam di Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dilutkan)			Tersedia
29		RKPD Jawa Tengah 2024	Sebaran Hama dan Penyakit Ikan di Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dilutkan)			Tersedia
30			Titik Lokasi Balai	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Statis		Tersedia
31			Zonasi Potensi Penangkapan Ikan	Geospasial	Dinas Kelautan dan Perikanan			Tersedia
32		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta WIUP Mineral	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2022	1:500; 1:1000; 1:1500	Tersedia
33		RKPD Jawa Tengah 2024	IGT. Kawasan Pertambangan	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2022	1:2.000.000	Tersedia
34		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Sumur Pantau	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2023	1:10.000	Tersedia
35		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Infrastruktur EBT di Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tahunan		Tersedia
36			Peta cekungan air tanah	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2022	1:100.000	Tersedia
37			Peta bentang alam karst	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2014	1:100.000	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	ID DDP	SUMBER REFERENSI	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	Jenis Data	INSTANSI PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN (update peta)	SKALA	2024
38			Peta rawan Gerakan tanah	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2010	1:100.000	Tersedia
39			IGT. Hidrogeologi	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)		1:100.000	Tersedia
40			IGT. Potensi Mineral Batuan	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2019	1:1000.000	Tersedia
41			IGT. Potensi Mineral Bukan Logam	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2019	1:1000.000	Tersedia
42			Peta potensi bahan galian	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 2019	1:1000.000	Tersedia
43			Peta Geologi	Geospasial	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	TAHUN 1992	1:100.000	Tersedia
44		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Hutan Rakyat	Geospasial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)	5 Tahunan	1::250.000	Tersedia
45			Peta Kawasan Konservasi	Geospasial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)			Tersedia
46		RKPD Jawa Tengah 2024	Data Sebaran Klasifikasi BUMDes	Geospasial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdes)	Tahunan		Tersedia
47		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta pengembangan kawasan pedesaan	Geospasial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdes)	Tahunan		Tersedia
48		RKPD Jawa Tengah 2024	Jaringan jalan	Geospasial	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK)	5 Tahun, update 2023		Tersedia
49			Jaringan air minum	Geospasial	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK)	Pertahun		Tersedia
50		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Perizinan Kewenangan Provinsi	Geospasial	DPMPTSP	Bulanan (dari 4 Agust 2021)	1:250.000	Tersedia
51		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Kawasan Industri	Geospasial	DPMPTSP	Tahunan		Tersedia
52		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Peluang Investasi	Geospasial	DPMPTSP	Tahunan		Tersedia
53		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Investasi se-Jawa Tengah	Geospasial	DPMPTSP	Triwulanan (dari 2019)	1:250.000	Tersedia
54		RKPD Jawa Tengah 2024	Sebaran Lokasi Rusunawa	Geospasial	Dinas Perakim	Tahunan		Tersedia
55		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Existing Kawasan Permukiman Kumuh	Geospasial	Dinas Perakim	Tahunan		Tersedia
56		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran BanKeu RTLH Desa	Geospasial	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim)	Tahunan		Tersedia
57		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta sebaran lokasi embung Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia
58		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Neraca SDA di WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	ID DDP	SUMBER REFERENSI	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	Jenis Data	INSTANSI PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN (update peta)	SKALA	2024
59		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Pemanfaatan SDA Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia
60		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran lokasi pengendali banjir dan pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia
61		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Titik Sebaran Kejadian Banjir di Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia
62		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:250.000	Tersedia
63		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:250.000	Tersedia
64		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Tematik RTRW Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:250.000	Tersedia
65		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Isohyet	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
66		RKPD Jawa Tengah 2024	IGT Pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:5.000	Tersedia
67		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Kawasan Peruntukan Industri	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan		Tersedia
68			Peta Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:5.000	Tersedia
69			Peta Sungai di WS. Kew. Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:250.000	Tersedia
70			Peta lokasi sebaran mata air di WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia
71			Peta Sebaran Pos Hidroklimatologi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:25.000	Tersedia
72			Luasan Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru)	Tahunan	1:5.000	Tersedia
73		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Jaringan transportasi Angkutan Umum Masal di Wilayah Aglomerasi Perkotaan	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
74		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Terminal Tipe B	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
75		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Dermaga Penyebrangan Sungai Lintas Kab/Kota dalam wilayah satu Provinsi	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
76		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Stasiun Kereta Api	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	ID DDP	SUMBER REFERENSI	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	Jenis Data	INSTANSI PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN (update peta)	SKALA	2024
77		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Bandara	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
78		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Pelabuhan	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
79		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Perlintasan Jalan Provinsi dengan Jaringan Rel Kereta Api (Sebidang atau Tidak sebidang)	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
80		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Halte Trans Jateng	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
81		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
82		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Provinsi	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
83		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
84		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Kondisi Rambu di Ruas Jalan Provinsi	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
85		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Kondisi Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan di Ruas Jalan Provinsi	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
86		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Koridor Rencana Trans Jateng	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
87		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Persebaran Terminal Tipe A	Geospasial	Dinas Perhubungan (Dishub)	Tahunan		Tersedia
88		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Jaringan Fiber Optik	Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Tahunan		Tersedia
89		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Lokasi Radio	Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Tahunan		Tersedia
90		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Lokasi Stasiun TV	Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Tahunan		Tersedia
91		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Cakupan Coverage Siaran TV Digital LPP TVRI	Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Tahunan		Tersedia
92		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Titik Lokasi yang dilayani internet desa	Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Tahunan		Tersedia
93		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta sebaran lokasi kawasan SAINS dan Teknologi (Technopark)	Geospasial	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	Tahunan		Tersedia
94		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta sebaran lokasi kebun raya	Geospasial	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	Tahunan		Tersedia
95		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta sebaran laboratorium riset di Jawa Tengah	Geospasial	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	Tahunan		Tersedia
96		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Rumah Sakit	Geospasial	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Tahunan		Tersedia
97		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Puskesmas	Geospasial	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Tahunan		Tersedia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	ID DDP	SUMBER REFERENSI	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	Jenis Data	INSTANSI PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN (update peta)	SKALA	2024
98		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Klinik	Geospasial	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Tahunan		Tersedia
99		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Bankeu Jamban Desa	Geospasial	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Tahunan		Tersedia
100		RKPD Jawa Tengah 2024	data lokasi presensi (aplikasi hanya utk admin presensi/terbatas)	Geospasial	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Tahunan		Tersedia
101		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Titik Lokasi Sekolah	Geospasial	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
102		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Titik Lokasi Siswa	Geospasial	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
103		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Peta Sebaran Sarana pendidikan dan pembelajaran	Geospasial	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	Tahunan	1:50.000	Tersedia
104		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tahunan)	Geospasial	Dinas Sosial (Dinsos)	Tahunan		Tersedia
105		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta letak panti kewenangan Dinsos Prov. Jateng	Geospasial	Dinas Sosial (Dinsos)	Tahunan		Tersedia
106		RKPD Jawa Tengah 2024	Persebaran Tanah Aset Pemda	Geospasial	BPKAD	Tahunan		Tersedia
107		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Sebaran Kube	Geospasial	Dinas Sosial (Dinsos)	Tahunan		Tersedia
108		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta risiko pencegahan korupsi	Geospasial	Inspektorat	Tahunan		Tersedia
109		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta Tingkat Potensi Rawan Trantib Provinsi Jawa Tengah	Geospasial	Satpol PP	Tahunan	1 : 25.000	Tersedia
110		RKPD Jawa Tengah 2024	Peta potensi rawan kebakaran	Geospasial	Satpol PP	Tahunan		Tersedia
111		Permendagri Batas Wilayah	Peta Batas Wilayah dan Toponimi	Geospasial	Biro Pemodaker, Setda	Tahunan		Tersedia
112		RKPD Jawa Tengah 2024	Sebaran BUMD provinsi dan kab/kota	Geospasial	Biro Perekonomian	Tahunan		Tersedia
113		RKPD Jawa Tengah 2024	Pajak Kendaraan Bermotor (titik lokasi UPPD)	Geospasial	Bapenda	Tahunan	1:250.000	Tersedia
114			Peta Bahaya	Geospasial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Per 5 Tahun (Update 2026)	1:500.000	Tersedia
115			Peta Resiko	Geospasial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Per 5 Tahun (Update 2026)	1:500.000	Tersedia

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).